



2023

PROFIL

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II DUMAI



(0765) 38267



balaikarkesdumai@gmail.com



kkp_dumai@yahoo.co.id



Jl. Datuk Laksamana No. 4 Dumai



Kkpdumai Kespel



Kkpdumai Kespel

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya maka Profil Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik, Sesuai Permenkes No. 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja Pelabuhan, Bandar Udara, dan Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN).

Berbagai data dan informasi yang dimuat dalam Profil ini dapat digunakan sebagai masukan untuk penyusunan program pembangunan kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai, dengan adanya profil ini diharapkan menjadi sarana media komunikasi, data dan informasi berbagai pihak yang membutuhkan dan bahan acuan bagi pengelola program dalam mendukung perencanaan pada masa yang akan datang.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Profil Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai tahun 2023 ini. Untuk itu masukan dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dalam penyusunan profil dimasa akan datang menjadi lebih baik lagi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku profil ini.

Kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna meningkatkan mutu Profil ini pada tahun-tahun yang akan datang, terima kasih sedalam – dalamnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan berpartisipasi dalam pembuatan Profil ini

Dumai, Januari 2024
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Dumai



Luhrhadi, SKM, M.Kes
NIP 196903301991031002

TIM PENYUSUN

PROFIL TAHUN 2023

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II DUMAI



JUFRIHADI, SKM, M.KES
KONTRIBUTOR



TISA TANTRI, SE
EDITOR



dr. UPIK
EDITOR



AZUAR NAZAR, SE, M.Si
EDITOR



ABDI CANDRA, SKM, M.Si
EDITOR



ORPINE RIDAWATI S, SE
PENYUSUN PROFIL SUBBAG ADUM



YENTI FITRI, SKM, M. Kes
PENYUSUN PROFIL SUBSTANSI PKSE



dr. ASRO HAYANI HARAHAHAP
PENYUSUN PROFIL SUBSTANSI UKLW



ABDUL GANI, AMKL
PENYUSUN PROFIL SUBSTANSI PRL

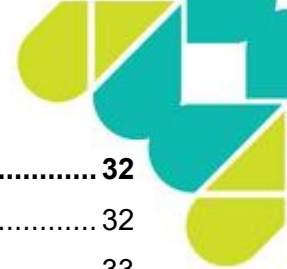


WAHYU RAMADHAN, SE
SEKRETARIAT

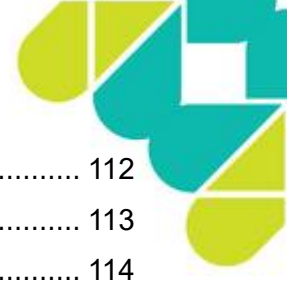


DAFTAR ISI

COVER.....	1
KATA PENGANTAR	2
TIM PENYUSUN PROFIL TAHUN 2023.....	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR.....	7
DAFTAR TABEL	9
DAFTAR GRAFIK	10
BAB I PENDAHULUAN	13
A. LATAR BELAKANG	13
B. TUJUAN.....	14
1. Tujuan Umum	14
2. Tujuan Khusus.....	14
C. LINGKUP KEGIATAN.....	14
D. ORGANISASI.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM.....	16
A. SEJARAH KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II DUMAI	16
B. DATA UMUM WILAYAH	18
1. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Bengkalis	22
3. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi.....	23
4. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Sungai Pakning.....	24
5. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Panipahan.....	24
6. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Tanjung Medang	25
7. Wilayah Kerja (Kawasan Industri Dumai) Pelintung	25
8. Wilayah Kerja Bandara Udara Pinang Kampai	26
C. VISI DAN MISI.....	26
D. TUJUAN DAN SASARAN	28
1. Tujuan	28
2. Sasaran.....	28
E. KEBIJAKAN DAN STRATEGI	29
1. Kebijakan	29
2. Strategi.....	30
F. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	31
1. Tugas Pokok KKP	31
2. Fungsi KKP	31



G. STRUKTUR ORGANISASI.....	32
1. Sub Bagian Administrasi Umum	32
2. Subtansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi.....	33
3. Subtansi Pengendalian Risiko Lingkungan.....	33
4. Subtansi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah	33
5. Instalasi.....	33
6. Wilayah Kerja.....	33
7. Kelompok Jabatan Fungsional.....	33
BAB III KEGIATAN DAN PENCAPAIAN SASARAN.....	35
A. SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM.....	35
1. Sumber Daya Manusia	35
2. Sarana dan Prasarana	38
B. SUBSTANSI PENGENDALIAN KARANTINA DAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI ...	45
1. Pengawasan dan Pemeriksaan Alat Angkut	45
2. Penerbitan Dokumen Kesehatan.....	55
3. Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi.....	65
C. SUBSTANSI PENGENDALIAN RESIKO LINGKUNGAN.....	78
1. Layanan Pengendalian Risiko Lingkungan	78
2. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	87
3. Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1).....	88
4. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	89
5. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	90
6. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0.....	91
7. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	92
8. Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	93
9. Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan.....	93
10. Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis.	94
D. SUBSTANSI UPAYA KESEHATAN LINTAS WILAYAH	96
1. Program Kesehatan Terbatas	96
2. Layanan Kesehatan dan Pengawasan Pada Situasi Khusus.....	98
3. Pelaksanaan deteksi dini (skrining) HIV.....	103
4. Deteksi Dini Terduga TBC	105
5. Pengawasan Terhadap Pelaku Perjalanan Pada Situasi Khusus Haji dan Umrah ..	106
6. Vaksinasi Internasional	107
7. Penerbitan Dokumen Laik Terbang Dan Izin Angkut Orang Sakit	109
8. Penerbitan Sertifikat P3K.....	110

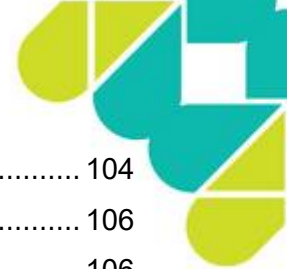


9. Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan	112
10. Pengawasan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah.....	113
11. Pelayanan Rujukan	114
12. Kegiatan Sosialisasi	116
BAB IV PENUTUP	117



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 KANTOR INDUK.....	19
GAMBAR 2.2 KANTOR WILAYAH KERJA BAGAN SIAPIAPI	19
GAMBAR 2.3 KANTOR WILAYAH KERJA BENGKALIS	19
GAMBAR 2.4 KANTOR WILAYAH KERJA SUNGAI PAKNING	20
GAMBAR 2.5 KANTOR WILAYAH KERJA TANJUNG MEDANG	20
GAMBAR 2.6 KANTOR WILAYAH KERJA PANIPAHAN	20
GAMBAR 2.7 KANTOR WILAYAH KERJA PELINTUNG	20
GAMBAR 2.8 PELABUHAN LAUT DUMAI	21
GAMBAR 2.9 WILAYAH KERJA PELABUHAN LAUT BENGKALIS	22
GAMBAR 2.10 POS PELABUHAN SELAT BARU.....	23
GAMBAR 2.11 PELABUHAN LAUT RORO.....	23
GAMBAR 2.12 WILAYAH KERJA PELABUHAN LAUT BAGAN SIAPIAPI	24
GAMBAR 2.13 WILAYAH KERJA PELABUHAN LAUT SUNGAI PAKNING	24
GAMBAR 2.14 WILAYAH KERJA PELABUHAN LAUT PANIPAHAN.....	24
GAMBAR 2.15 WILAYAH KERJA PELABUHAN LAUT TANJUNG MEDANG.....	25
GAMBAR 2.16 WILAYAH KERJA PELINTUNG.....	25
GAMBAR 2.17 WILAYAH KERJA BANDARA UDARA PINANG KAMPAI	26
GAMBAR 2.18 STRUKTUR ORGANISASI	34
GAMBAR 3.1 PEMERIKSAAN KEDATANGAN KAPAL DALAM KARANTINA.....	45
GAMBAR 3.2 PEMERIKSAAN KEDATANGAN KAPAL DARI DALAM NEGERI	48
GAMBAR 3.3 PEMERIKSAAN KEBERANGKATAN KAPAL.....	51
GAMBAR 3.4 DOKUMEN SSCEC DAN HEALTH BOOK.....	58
GAMBAR 3.5 PENERBITAN DOKUMEN ICV	60
GAMBAR 3.6 PENGAWASAN LALU LINTAS JENAZAH	62
GAMBAR 3.7 SAMPEL DAN <i>HEALTH CERTIFICATE</i> OMKABA	64
GAMBAR 3.8 PENGAWASAN LALU LINTAS PENUNPANG LUAR NEGERI	66
GAMBAR 3.9 PENGAWASAN LALU LINTAS PENUMPANG DALAM NEGERI	68
GAMBAR 3.10 PENGAWASAN/PEMERIKSAAN ANAK BUAH KAPAL (ABK)	70
GAMBAR 3.11 RAPAT BERSAMA LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR	77
GAMBAR 3.12 KUNJUNGAN POLIKLINIK KKP KELAS II DUMAI	97
GAMBAR 3.13 PELAYANAN KESEHATAN POSKO LEBARAN 2023/1444 H.....	98
GAMBAR 3.14 PELAYANAN KESEHATAN EVENT KEAGAMAAN BAKAR TONGKANG....	99
GAMBAR 3.15 PELAYANAN KESEHATAN EVENT KEAGAMAAN MANDI SAFAR.....	99
GAMBAR 3.16 PELAYANAN KESEHATAN BAKTI SOSIAL DALAM RANGKA HKN.....	100
GAMBAR 3.17 PELAYANAN KESEHATAN POSKO NATAL 2023.....	102



GAMBAR 3.18 DETEKSI DINI HIV PADA KKP KELAS II DUMAI	104
GAMBAR 3.19 DETEKSI DINI TERDUGA TBC	106
GAMBAR 3.20 PENGAWASAN VAKSINASI JAMAAH HAJI	106
GAMBAR 3.21 PELAYANAN VAKSINASI PADA KKP KELAS II DUMAI	107
GAMBAR 3.22 PENERBITAN SURAT IJIN ANGKUT ORANG SAKIT TAHUN 2023	110
GAMBAR 3.23 PENGAWASAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN KAPAL TAHUN 2023	112
GAMBAR 3.24 PENANGANAN KEGAWATDARURATAN TAHUN 2023	113
GAMBAR 3.25 PENGAWASAN PMI BERMASALAH TAHUN 2023	114
GAMBAR 3.26 PELAYANAN RUJUKAN TAHUN 2023	115
GAMBAR 3.27 SOSIALISASI EDUTAIMENT DAN DETEKSI DINI PENYAKIT TBC	116
GAMBAR 3.28 SOSIALISASI TBC RESISTEN OBAT	116

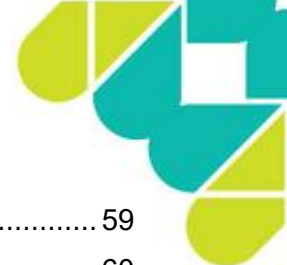


DAFTAR TABEL

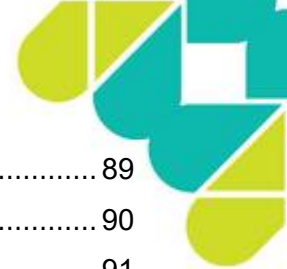
TABEL 3.1 LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA NERACA.....	38
TABEL 3.2 ALOKASI ANGGARAN PER JENIS BELANJA.....	39
TABEL 3.3 PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN	39
TABEL 3.4 REVISI DIPA	43
TABEL 3.5 TARGET DAN REALISASI PNPB	44
TABEL 3.7 DISTRIBUSI FREKUENSI SURVEILANS PENYAKIT MENULAR	74
TABEL 3.8 DISTRIBUSI FREKUENSI SURVEILANS PENYAKIT TIDAK MENULAR.....	76
TABEL 3.9 DISTRIBUSI PENGAWASAN SANITASI TPM.....	79
TABEL 3.10 DISTRIBUSI PENGAWASAN SANITASI TTU	82
TABEL 3.11 JUMLAH SARANA AIR BERSIH YANG DIAWASI.....	84
TABEL 3.12 PELAKSANAAN TINDAKAN PENYEHATAN ALAT ANGKUT	86
TABEL 3.13 CAPAIAN INDIKATOR 3 KKP.....	87

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 3.1 DISTRIBUSI PEGAWAI KKP KELAS II DUMAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2023	35
GRAFIK 3.2 DISTRIBUSI PEGAWAI KKP KELAS II DUMAI BERDASARKAN PENDIDIKAN TAHUN 2023.....	36
GRAFIK 3.3 DISTRIBUSI PEGAWAI KKP KELAS II DUMAI BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2023.....	36
GRAFIK 3.4 DISTRIBUSI PEGAWAI KKP KELAS II DUMAI BERDASARKAN JABATAN TAHUN 2023.....	37
GRAFIK 3.5 DISTRIBUSI PEGAWAI KKP KELAS II DUMAI BERDASARKAN LOKASI KERJA TAHUN 2023	37
GRAFIK 3.6 DISTRIBUSI PENGAWASAN / PEMERIKSAAN KEDATANGAN KAPAL DARI LUAR NEGERI TAHUN 2023.....	46
GRAFIK 3.7 DISTRIBUSI PENGAWASAN / PEMERIKSAAN KEDATANGAN KAPAL DARI LUAR NEGERI TAHUN 2019 S/D 2023	47
GRAFIK 3.8 KAPAL DARI PELABUHAN DALAM NEGERI TAHUN 2023	49
GRAFIK 3.9 DISTRIBUSI PENGAWASAN/PEMERIKSAAN KEDATANGAN KAPAL DARI PELABUHAN DALAM NEGERI TAHUN 2019 S/D 2023	49
GRAFIK 3.10 DISTRIBUSI PENGAWASAN / PEMERIKSAAN KEBERANGKATAN KAPAL LUAR NEGERI TAHUN 2023.....	52
GRAFIK 3.11 DISTRIBUSI PENGAWASAN KEBERANGKATAN KAPAL LUAR NEGERI TAHUN 2019 S/D 2023.....	52
GRAFIK 3.12 DISTRIBUSI PENGAWASAN / PEMERIKSAAN KE BERANGKATAN KAPAL DALAM NEGERI TAHUN 2023	53
GRAFIK 3.13 DISTRIBUSI PENGAWASAN KEBERANGKATAN KAPAL DALAM NEGERI TAHUN 2019 S/D 2023.....	53
GRAFIK 3.14 DISTRIBUSI PENGAWASAN / PEMERIKSAAN KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN PESAWAT DI BANDARA PINANG KAMPAI TAHUN 2023	54
GRAFIK 3.15 DISTRIBUSI PENGAWASAN/PEMERIKSAAN KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN PESAWAT DI BANDARA PINANG KAMPAI TAHUN 2019 S/D 2023	55
GRAFIK 3.16 DISTRIBUSI PENERBITAN DOKUMEN COP DAN PHQC TAHUN 2023	56
GRAFIK 3.17 DISTRIBUSI PENERBITAN DOKUMEN COP DAN PHQC TAHUN 2019 S/D 2023	57
GRAFIK 3.18 DISTRIBUSI PENERBITAN DOKUMEN SSCEC/SSCC DAN BUKU KESEHATAN TAHUN 2023.....	58



GRAFIK 3.19 DISTRIBUSI PENERBITAN DOKUMEN SSCEC/SSCC DAN BUKU KESEHATAN TAHUN 2019 S/D 2023	59
GRAFIK 3.20 DISTRIBUSI PENERBITAN DOKUMEN ICV TAHUN 2023	60
GRAFIK 3.21 DISTRIBUSI PENERBITAN INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION (ICV) TAHUN 2019 S/D 2023	61
GRAFIK 3.22 DISTRIBUSI PENGAWASAN LALU LINTAS JENAZAH TAHUN 2023	62
GRAFIK 3.23 DISTRIBUSI PENGAWASAN LALU LINTAS JENAZAH TAHUN 2019 S/D TAHUN 2023	63
GRAFIK 3.24 DISTRIBUSI PENGAWASAN DAN PENERBITAN SURAT IZIN <i>HEALTH CERTIFICATE</i> OMKABA TAHUN 2023	64
GRAFIK 3.25 DISTRIBUSI PENGAWASAN KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN PENUMPANG KAPAL DARI / KE LUAR NEGERI TAHUN 2023	66
GRAFIK 3.26 DISTRIBUSI PENGAWASAN / PEMERIKSAAN PENUMPANG KAPAL DARI / KE LUAR NEGERI TAHUN 2019 S/D 2023	67
GRAFIK 3.27 DISTRIBUSI PENGAWASAN / PEMERIKSAAN PENUMPANG KAPAL DARI/KE DALAM NEGERI TAHUN 2023	67
GRAFIK 3.28 DISTRIBUSI PENGAWASAN / PEMERIKSAAN PENUMPANG KAPAL DARI/KE PELABUHAN DALAM NEGERI TAHUN 2019 S/D 2023	68
GRAFIK 3.29 DISTRIBUSI PENGAWASAN/PEMERIKSAAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) DARI/KELUAR NEGERI TAHUN 2023.....	69
GRAFIK 3.30 DISTRIBUSI PENGAWASAN / PEMERIKSAAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) DARI / KELUAR NEGERI TAHUN 2019 S/D 2023.....	70
GRAFIK 3.31 DISTRIBUSI PENGAWASAN / PEMERIKSAAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) DARI / KE DALAM NEGERI TAHUN 2023	71
GRAFIK 3.32 DISTRIBUSI PENGAWASAN/PEMERIKSAAN KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN PENUMPANG PESAWAT TAHUN 2023	71
GRAFIK 3.33 DISTRIBUSI PENGAWASAN / PEMERIKSAAN KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN PENUMPANG PESAWAT TAHUN 2019 S/D 2023	72
GRAFIK 3.34 DISTRIBUSI PENGAWASAN / PEMERIKSAAN KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KRU PESAWAT TAHUN 2023	72
GRAFIK 3.35 DISTRIBUSI PENGAWASAN / PEMERIKSAAN KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KRU PESAWAT TAHUN 2019 S/D 2023	73
GRAFIK 3.39 DISTRIBUSI PENGAWASAN GPBL	82
GRAFIK 3.41 PERBANDINGAN FAKTOR RISIKO TTU	83
GRAFIK 3.44 INDEKS PINJAL BERDASARKAN PELABUHAN	88
GRAFIK 3.45 JENIS TIKUS TERTANGKAP DALAM SURVEI PES TAHUN 2023.....	88
GRAFIK 3.46 INDEX HABITAT ANOPHELES BERDASARKAN PELABUHAN	89



GRAFIK 3.47 INDEX POPULASI KECOJA BERDASARKAN PELABUHAN	89
GRAFIK 3.48 JUMLAH LOKASI SURVEI BERDASARKAN PELABUHAN	90
GRAFIK 3.49 JUMLAH LOKASI SURVEI BERDASARKAN PELABUHAN	91
GRAFIK 3.50 HOUSE INDEX BERDASARKAN PELABUHAN	91
GRAFIK 3.51 HOUSE INDEX BERDASARKAN PELABUHAN	92
GRAFIK 3.52 JUMLAH TTU YANG DIPERIKSA BERDASARKAN KATEGORI.....	93
GRAFIK 3.53 JUMLAH TPM YANG DIPERIKSA BERDASARKAN KATEGORI	94
GRAFIK 3.54 JUMLAH KUNJUNGAN POLIKLINIK	96
GRAFIK 3.55 JUMLAH KUNJUNGAN POLIKLINIK TAHUN 2017 - 2023	98
GRAFIK 3.56 CAPAIAN PENGOBATAN MASSAL BERDASARKAN KELOMPOK USIA ...	100
GRAFIK 3.57 CAPAIAN PENGOBATAN MASSAL BERDASARKAN JENIS KELAMIN	101
GRAFIK 3.58 CAPAIAN PENGOBATAN MASSAL BERDASARKAN PEKERJAAN	101
GRAFIK 3.59 CAPAIAN PENGOBATAN MASSAL BERDASARKAN 10 DIAGNOSIS PENYAKIT TERBANYAK	102
GRAFIK 3.60 JUMLAH DETEKSI DINI HIV TAHUN 2023.....	103
GRAFIK 3.61 DETEKSI DINI TERDUGA TBC PADA KKP KELAS II DUMAI TAHUN 2023	105
GRAFIK 3.62 PELAYANAN VAKSINASI MENINGITIS, VAKSINASI YELLOW FEVER DAN VAKSINASI COVID 19 TAHUN 2023	108
GRAFIK 3.63 PELAYANAN VAKSINASI MENINGITIS PADA POLIKLINIK KKP KELAS II DUMAI TAHUN 2017 S/D 2023.....	108
GRAFIK 3.64 PENERBITAN SURAT IJIN ANGKUT ORANG SAKIT TAHUN 2023	109
GRAFIK 3.65 PENERBITAN SERTIFIKAT P3K KAPAL TAHUN 2023	111
GRAFIK. 3.66 PELAYANAN KEGAWATDARURATAN MEDIK TAHUN 2023	112
GRAFIK 3.67 PELAYANAN KEGAWADARURATAN MEDIK BERDASARKAN PENYAKIT TAHUN 2023.....	113
GRAFIK 3.68 PENGAWASAN PMI BERMASALAH TAHUN 2023	114
GRAFIK 3.69 PELAYANAN RUJUKAN BERDASARKAN PENYAKIT TAHUN 2024.....	115
GRAFIK 3.70 PELAYANAN RUJUKAN BERDASARKAN PENYAKIT	116



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Profil Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai merupakan salah satu bentuk informasi kesehatan yang secara berkala diterbitkan setiap tahun untuk menggambarkan tentang perkembangan pembangunan bidang kesehatan di unit kerja masing-masing. Maka dikembangkan suatu sistem informasi pada unit kerja yang salah satunya antara lain penyusunan profil dimana dalam profil tersebut memuat semua dokumen data dan informasi yang berisikan tentang kegiatan dan pencapaian kegiatan serta semua aspek yang mendukung ataupun menghambat proses kegiatan pembangunan kesehatan pada unit kerja tersebut.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai unit pelaksana teknis (UPT), di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai amanat Permenkes RI No.33 tahun 2021 yang telah diubah dengan Permenkes RI No.10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, Tugas dan fungsi tersebut antara lain melakukan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit berpotensi wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan terbatas, pengawasan Omkaba, pengamanan penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme unsur biologi, kimia, radiasi di wilayah kerja baik Pelabuhan Laut, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN).

Agar diperoleh pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut maka perlu didukung oleh data dan informasi dari tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan Buku profil Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai tahun 2023 disusun untuk memberikan gambaran secara ringkas mengenai sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai. Buku Profil ini membuat gambaran visual tentang organisasi, pelaksanaan dan pencapaian kegiatan program serta ketatausahaan (kepegawaian dan keuangan) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai.



B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

- a. Untuk mengetahui gambaran/informasi dan data pencapaian kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai Tahun 2023.
- b. Untuk mengetahui perbandingan/trend hasil kegiatan kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai Tahun 2023 dengan kegiatan tahun sebelumnya.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran, informasi dan data Karantina dan Surveilans Epidemiologi gambaran, informasi dan dan Kesehatan Lintas Wilayah di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai.
- b. Untuk mengetahui gambaran, informasi dan data Pengendalian Resiko Lingkungan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai.
- c. Untuk mengetahui gambaran, informasi dan data Kesehatan Lintas Wilayah di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai.
- d. Untuk mengetahui gambaran, informasi dan data tentang Administrasi Umum di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai.

C. LINGKUP KEGIATAN

Kebijakan ada arah/tindakan yang diambil Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, arah kebijakan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai sebagai telah disusun didalam Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko di pintu masuk Negara.
2. Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi.
3. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
4. Penguatan sinergisme dan kolaborasi dan integrasi program.
5. Penguatan sinergisme dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait di pelabuhan dan bandara.

Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Kantor Kantor Pelabuhan Kelas II Dumai telah menetapkan tujuan strategis yang mendukung strategi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020 - 2024 sertanmengacu pada strategi Kementerian Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan sebagai berikut :



1. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan faktor risiko di pintu masuk negara.
2. Peningkatan respon kejadian penyakit dan faktor risiko di pintu masuk negara.
3. Peningkatan pelayanan kegawatdaruratan terbatas di pintu masuk negara.
4. Peningkatan pengawasan faktor risiko lingkungan di pintu masuk negara.
5. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko di pintu masuk negara.
6. Peningkatan pengamatan penyakit dan factor risiko di pintu masuk negara.
7. Peningkatan komunikasi dan advokasi.
8. Penguatan akuntabilitas kinerja.
9. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
10. Kerjasama lintas sektor dan program.
11. Peningkatan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja, keuangan, dan pelaksanaan kegiatan dalam rapat bulanan.
12. Meningkatkan rasa nasionalisme melalui upacara bendera setiap Senin pagi.
13. Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai setiap tahunnya.

D. ORGANISASI

Dalam menjalankan peran pemerintah ini Kantor Kantor Pelabuhan Kelas II Dumai membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat yaitu :

1. UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
2. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
4. Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
6. Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020 - 2024.
7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara.
8. Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 -2024.
9. Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai Tahun 2020 - 2024.
10. Permenkes 32 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan.
11. Permenkes Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. SEJARAH KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II DUMAI

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai jika ditinjau dari sejarah maka telah berlangsung lama (lebih dari 50 tahun) yaitu mulai bulan Juli tahun 1964 bernama Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut (DKPL) dengan Aminudin, B.Sc sebagai Kepala Dinas, pada bulan Juli tahun 1965 berganti Kepala Dinas dari Aminudin, B.Sc kepada Dokter Broto Wasisto. Pada tahun 1969 nama Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut berubah menjadi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) pimpinan atau Kepala Kantor tetap Dr. Broto Wasisto. Kemudian tahun 1970 terjadi pergantian Kepala Kantor dari Dr. Broto Wasisto kepada Dr. Zubir. Kepemimpinan Dr. Zubir berakhir tahun 1994 karena masa pensiun dan digantikan dengan Dr. Achmad Fadjar yang menjabat Kepala KKP Dumai dari tahun 1994 sampai memasuki masa pensiun pada bulan Februari 2005.

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai dari Maret 2005 s/d Desember 2005 masih kosong karena belum ditunjuk Pejabat Definitif yang menggantikan Pejabat lama, pada bulan Januari 2006 ditunjuk S. Adhi Nugroho, SKM sebagai Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai s/d bulan Mei 2007, dan dari bulan Juni 2007 s/d 2009 Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai dijabat oleh Bapak Rahmat Subakti, SKM. M.Hm. Pada tahun 2009 terjadi pergantian atau mutasi Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai dari Bapak Rahmat Subakti, SKM kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai yang baru yaitu Bapak Kostan Sidauruk, S.Si yang menjabat dari tahun 2009 sampai dengan Oktober tahun 2014. Bulan Oktober 2014 terjadi mutasi/pergantian Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai dari Bapak Kostan Sidauruk, S.Si kepada Bapak H.Efrizon, SKM, Kepemimpinan Bapak H. Efrizon, SKM berakhir Januari Tahun 2021 karena masa pensiun, dari bulan Januari 2021 s/d Maret 2022 masih kosong karena belum ditunjuk Pejabat Definitif, selama Kekosongan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai pada Januari Tahun 2021 s/d Maret 2022 dijabat oleh Plt. Kepala Kantor oleh Bapak Amzal, SKM, pada Tahun 2022 dilaksanakan Pelantikan Pejabat Definitif di Lingkungan Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI, Pejabat Definitif yang dilantik untuk menjadi Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai yang baru dijabat oleh Bapak Ismail Bakhri Siregar, S.Si, M.Kes terhitung TMT April 2022 s/d Mei 2023.



Pada Bulan Mei Tahun 2023 Kepemimpinan Bapak Ismail Bakhri Siregar, S.Si, M.Kes berakhir karena memasuki masa pensiun, selama Bulan Mei Tahun 2023 s/d September Tahun 2023 di Lingkungan Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI belum ada Pelantikan Pejabat Definitif, selama kekosongan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai dijabat oleh Plt. Kepala Kantor dr. R. Melda Indri Purnama, MM dari Bulan Mei Tahun 2023 s/d September Tahun 2023, Pada Bulan September Tahun 2023 Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI melaksanakan Mutasi/Penggantian/Pelantikan Pejabat Definitif Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai yang baru yaitu Bapak Jufrihadi, SKM, M.Kes dari Bulan Oktober Tahun 2023 sampai dengan saat ini.

Keberadaan KKP Kelas II Dumai merupakan salah satu unsur CIQP di Pelabuhan Dumai. Pengertian CIQP adalah C berarti Custom atau instansi Bea dan Cukai. I berarti Immigration atau Imigrasi, Q berarti Quarantine atau karantina dan sekarang bernama Kantor Kesehatan Pelabuhan sedang P artinya Port yang diartikan sebagai tugas Kesahbandaran atau sekarang bernama Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai sebelumnya pernah bernama Kantor Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut (DKPL) Dumai kemudian berubah menjadi Kantor Kesehatan Pelabuhan Dumai yang biasa disingkat KKP Kelas II Dumai. Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah melalui alat pengangkut di laut, di udara dan di darat.

Istilah Karantina mulanya timbul sebagai suatu usaha untuk menghindarkan diri dari penularan angkutan laut yang membawa atau terjangkit penyakit menular dengan cara diasingkan terlebih dahulu diluar pelabuhan selama 40 hari. Dari segi geografis terletak pada Pantai Timur Sumatera dengan letak koordinat $01^{\circ} 41'10''\text{LS}$ dan $101^{\circ}27'20''\text{BT}$, berada di jalan Datuk Laksamana Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai adalah Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan berkedudukan di wilayah Pemerintah Kota Dumai namun secara operasional teknis kerjanya meliputi Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir.

B. DATA UMUM WILAYAH

Kota Dumai adalah ibu kota Kota Dumai, Kota Dumai memiliki kawasan yang strategis dan terletak di tepi pantai laut dan menghadap Selat Malaka, berbatasan dengan Malaysia.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Dumai

No	Kecamatan	Luas (km ²)
1	Bukit Kapur	54.734
2	Medang Kampai	18.512
3	Sungai Sembilan	45.298
4	Dumai Barat	46.198
5	Dumai Timur	72.106
6	Dumai Kota	40.708
7	Dumai Selatan	54.276

Kota Dumai terdiri dari tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Kapur, Medang Kampai, Sungai Sembilan, Dumai Barat, Dumai Timur, Dumai Kota dan Dumai Selatan seluas 2.066,72 km² dengan jumlah penduduk keseluruhan berjumlah 331.832 jiwa.

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Dumai

Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu kecamatan Sungai Sembilan 1.420,92 (km²) sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Dumai Kota 5,29 (km²). Secara geografis wilayah Kota Dumai terletak 100° 51' 30" - 100° 59' 8" Lintang Utara dan pada 114° 24' - 114° 34' Bujur Timur dengan luas wilayah 2.066,72 km², batas-batasnya sebagai berikut :



- Batas Utara : Selat Rupat
- Batas Selatan : Kabupaten Bengkalis
- Batas Timur : Kabupaten Bengkalis
- Batas Barat : Kabupaten Rokan Hilir

Permukaan tanah datar dengan sebagian sedikit bergelombang dengan ketinggian dari muka laut 0 – 30 m, kecuali daerah dekat pantai.

**GAMBAR KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II DUMAI
WILAYAH KANTOR INDUK DAN WILAYAH KERJA TAHUN 2023**



Gambar 2.1 Kantor Induk



Gambar 2.2 Kantor Wilayah Kerja Bagan Siapi Api



Gambar 2.3 Kantor Wilayah Kerja Bengkalis



Gambar 2.4 Kantor Wilayah Kerja Sungai Pakning



Gambar 2.5 Kantor Wilayah Kerja Tanjung Medang



Gambar 2.6 Kantor Wilayah Kerja Panipahan



Gambar 2.7 Kantor Wilayah Kerja Pelintung



Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang - Undang No. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang - Undang No. 2 tentang Karantina Udara. Secara kelembagaan, eksistensi KKP didasarkan atas Permenkes RI Nomor: 33 tahun 2021 sebagai perubahan atas Permenkes Nomor: 77 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai selaku unit pelaksana teknis dalam rangka terselenggaranya *good governance* menyampaikan Profil kepada pejabat Eselon I di Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI. Berdasarkan Permenkes RI Nomor 33 tahun 2021, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai berkedudukan di Dumai dan mempunyai 8 (delapan) wilayah kerja sebagai berikut :

1. Pelabuhan Laut Bengkalis
2. Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi
3. Pelabuhan Laut Sungai Pakning
4. Pelabuhan Laut Panipahan
5. Pelabuhan Laut Tanjung Medang
6. Kawasan Industri Pelitung
7. Bandara Udara Pinang Kampai

GAMBAR PELABUHAN LAUT DUMAI
WILAYAH KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II DUMAI TAHUN 2023



Gambar 2.8 Pelabuhan Laut Dumai

Pelabuhan Laut Dumai terletak pada pantai timur Sumatera dengan letak koordinat 01°41'10" LS da 101°27'20" BT. Pelabuhan Dumai mempunyai 3 jenis pelabuhan yaitu :

1. Pelabuhan Umum
2. Pelabuhan Pertamina
3. Pelabuhan Chevron

Pelabuhan Umum dikelola oleh PT. Persero Pelindo I Cabang Dumai dengan luar areal ± 200 hektar. Pelabuhan umum ini mempunyai kapal-kapal barang dan kapal penumpang baik kapal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pelabuhan Pertamina merupakan pelabuhan khusus yang melayani kapal-kapal tanker pengangkut BBM. Pelabuhan ini bersifat khusus dan dikelola secara khusus pula oleh Pertamina. Pelabuhan ini melayani kapal tanker baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pelabuhan Chevron sifatnya sama dengan pelabuhan Pertamina yaitu pelabuhan yang melayani kapal tanker pengangkut BBM hanya pengelolanya adalah PT. Chevron.

1. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Bengkalis



Gambar 2.9 Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Bengkalis

Pelabuhan laut Bengkalis terletak di ibukota Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Terletak di Selat Bengkalis pantai timur Sumatera. Jarak antara Pelabuhan Dumai dan Bengkalis adalah 39 mill laut atau 1,5 jam dengan perjalanan ferry yang ada saat ini. Pelabuhan Bengkalis merupakan pelabuhan umum yang dikelola oleh PT. Pelindo I dengan kegiatan bongkar muat barang dan naik turun penumpang.

Pelabuhan Bengkalis juga dikunjungi kapal dari luar negeri terutama Malaysia. Di Willker Bengkalis terdapat pos pelabuhan yang juga melakukan kegiatan bongkat muat barang, arus penumpang yaitu antara lain :

1. Pos Pelabuhan Selat Baru



Pelabuhan Selat Baru terletak di Pulau Bengkalis berjarak 15 km dari Kota Bengkalis. Letaknya berhadapan langsung dengan Selat Malaka. dermaga dan sarana pendukung lainnya yang pembangunannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis.

Gambar 2.10 Pos Pelabuhan Selat Baru

2. Pelabuhan Laut Roro



Gambar 2.11 Pelabuhan Laut Roro

Pelabuhan laut Roro masih berada dalam wilayah kerja Bengkalis. Pelabuhan laut ini mulai beroperasi sekitar 7 tahun yang lalu.

3. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi.



Pelabuhan Laut Bagansiapiapi terletak di Selat Barkey pantai timur Sumatera dan Kota Bagan Siapiapi merupakan ibukota Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Jarak antara Dumai dan Bagan Siapiapi dapat ditempuh melalui laut sejauh 93 mill laut dan melaluli jalan darat sejauh 135 km. Dalam kegiatannya Pelabuhan Laut



Bagansiapiapi melayani kapal-kapal domestik internasional dengan berbagai jenis kapal baik kapal penumpang maupun barang, Status Pelabuhan Laut Bagansiapiapi adalah pelabuhan umum yang diusahakan dan terbuka untuk perdagangan luar negeri dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Gambar 2.12 Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Bagan SiapiApi

4. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Sungai Pakning.



Gambar 2.13 Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Sungai Pakning

Pelabuhan Laut Sungai Pakning terletak di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis yang dapat ditempuh dengan jalan darat maupun jalan laut. Jarak dari kota Dumai ke Sungai Pakning ± 110 km dapat dicapai dengan transportasi darat dengan jarak tempuh selama 1 jam 45 menit. Dalam kegiatannya Pelabuhan Laut Sungai Pakning melayani kapal-kapal domestik internasional dengan berbagai jenis kapal baik kapal penumpang maupun barang. Status Pelabuhan Laut Sungai Pakning adalah pelabuhan umum yang diusahakan dan terbuka untuk perdagangan luar negeri dan dikelola oleh PT. Pelindo I.

5. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Panipahan

Pelabuhan Laut Panipahan terletak di pantai timur Sumatera di kecamatan Pasir Limau Kapas ibu kotanya Panipahan kabupaten Rokan Hilir di Provinsi Riau. Jarak Dumai ke Panipahan adalah 102 mill dari laut sedangkan bila dari Bagan Siapiapi seluas 46 mill dari laut Untuk menuju ke Panipahan hanya dapat dilalui lewat transportasi laut melalui Bagan Siapiapi ataupun Dumai.



Gambar 2.14 Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Panipahan

6. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Tanjung Medang

Pelabuhan Laut Tanjung Medang terletak di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Letaknya berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Pelabuhan Tanjung Medang belum banyak berkembang namun demikian kegiatan kapal ekspor terutama ekspor ikan segar sudah ada oleh karena itu Pelabuhan Laut Tanjung Medang mulai diaktifkan pada bulan September 2014 karena sudah ditempatkan petugas sebanyak 2 petugas.



Gambar 2.15 Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Tanjung Medang

7. Wilayah Kerja (Kawasan Industri Dumai) Pelintang



Gambar 2.16 Wilayah Kerja Pelintang

Terletak lebih kurang 60 km sebelah timur Kota Dumai dan dapat ditempuh dengan jalan darat.

8. Wilayah Kerja Bandara Udara Pinang Kampai

Terletak di Selatan Kota Dumai. Bandara ini memiliki panjang landasan pacu 1800 m x 45 meter dengan tipe aspal (ASP). Bandara ini terutama sekali digunakan untuk kepentingan perusahaan minyak yang beroperasi di kota Dumai seperti PT Pertamina dan PT Chevron Pacific Indonesia. Namun mulai tahun 2009 sampai dengan 2014 rute-rute yang pernah dibuka adalah tujuan Pekanbaru dan Jakarta. Sedangkan tahun 2015 rute yang pernah dibuka adalah



Gambar 2.17 Wilayah Kerja Bandara Udara Pinang Kampai

tujuan Batam dan Jakarta. Sarana dan prasarana Bandara Pinang Kampai adalah milik Pertamina, sejak tahun 2008 di kelola oleh Pemerintah Kota Dumai (Dishub). Pada Tahun 2016 telah dibuka rute tujuan Batam dan Medan. Dan pada Tahun 2019 dibuka rute tujuan Pekanbaru, Pada tahun 2021 saat pandemi Covid – 19 Masuk ke Indonesia Pengoperasian Bandara Pinang Kampai untuk sementara dihentikan sampai saat ini.

C. VISI DAN MISI

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta Masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan Makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Direktorat Jenderal P2P menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas”.



Selaras dengan visi Ditjen P2P, Kantor Kesehatan Pelabuhan menjabarkan visi Kantor Kesehatan Pelabuhan yakni “Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko”.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya dibidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaikan Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.



Untuk mewujudkan tercapainya visi, Ditjen P2P telah menetapkan misi tahun 2022-2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni:

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit;
2. Perbaikan Kualitas Lingkungan;
3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko;
4. Penguatan sistem tata kelola kesehatan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi KKP yakni:

1. Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara;
3. Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

D. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai adalah "Terselenggaranya pencegahan keluar dan masuknya penyakit menular dan potensial wabah dan terkendalinya risiko kesehatan lingkungan melalui pelabuhan laut Dumai dan seluruh wilayah kerjanya"

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di Pintu Masuk Negara dengan indikator sebagai berikut :

- a. Indek deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/ PLBDN dengan target Indek 0,98.
- b. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dengan persentase 99%.
- c. Indek pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dengan indik 0,97.
- d. Nilai kinerja anggaran dengan nilai 86.
- e. Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan nilai 96.
- f. Nilai Kinerja Implementasi WBK Satker dengan target nilai 80.
- g. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dengan persentase 90%.
- h. Persentase realisasi anggaran tahun 2023 dengan serapan anggaran 95%.



E. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Kebijakan

Kebijakan yang digunakan sebagai dasar dalam mencapai tujuan dan sasaran program Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai adalah melalui :

- a. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dari masyarakat, serta pengendalian faktor risiko di lingkungan pelabuhan.
- b. Pengembangan dan memperkuat jejaring surveilans epidemiologi faktor risiko dengan fokus pemantauan wilayah setempat dan kewaspadaan dini dengan keterlibatan semua stakeholders.
- c. Pemantapan jejaring lintas program, lintas sektor, serta kemitraan dengan masyarakat termasuk swasta dalam percepatan program lingkungan sehat melalui pertukaran informasi, pelatihan, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan pemanfaatan sumberdaya lainnya.
- d. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang kesehatan lingkungan yang secara fungsional merupakan sumberdaya inti dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program lingkungan sehat.
- e. Peningkatan cakupan, jangkauan, dan pemerataan pengendalian faktor risiko secara berkualitas di lingkungan pelabuhan.
- f. Membangun komitmen, mendorong peran dan menjadi bagian integral pembangunan kesehatan dalam mewujudkan masyarakat pelabuhan yang sehat dan produktif .
- g. Penatalaksanaan kasus secara cepat dan tepat, imunisasi, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta pengendalian faktor risiko di pelabuhan.
- h. Pengembangan dan memperkuat jejaring surveilans epidemiologi dengan fokus pemantauan wilayah setempat dan kewaspadaan dini, guna mengantisipasi ancaman penyebaran penyakit antar daerah maupun antar negara.
- i. Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan KLB/wabah dan bencana maupun kesehatan matra.
- j. Pemantapan jejaring lintas program, lintas sektor, serta kemitraan dengan masyarakat termasuk swasta untuk percepatan program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular melalui pertukaran informasi, pelatihan, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan pemanfaatan sumber daya lainnya.
- k. Peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit sehingga mampu menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat pelabuhan.



1. Peningkatan cakupan, jangkauan, dan pemerataan pelayanan penatalaksanaan kasus penyakit secara berkualitas.
2. Strategi
Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai memiliki strategi sebagai berikut :
 1. Pelayanan kesehatan bagi penumpang pada situasi khusus.
 2. Diklat PPGD dan BTCLS.
 3. Pengumpulan data surveilans epidemiologi.
 4. Pengamatan K3JH jemaah haji di wilayah kerja.
 5. Penyelenggaraan SKD KLB.
 6. Konsultasi program ke Pusat.
 7. Bimbingan teknis ke wilayah kerja.
 8. Peningkatan kompetensi bidang surveilans epidemiologi.
 9. Pengelolaan simkespel.
 10. Penanggulangan kejadian PHEIC.
 11. Pemeriksaan kapal dalam karantina.
 12. Penerbitan SSCC setelah dilakukan tindakan penyehatan terhadap alat angkut
 13. Penerbitan SSCEC setelah dilakukan pemeriksaan sanitasi kapal.
 14. Penerbitan PHC untuk kapal yang berangkat.
 15. Pengawasan fisik dan dokumen OMKABA.
 16. Penerbitan dan legalisasi dokumen ICV bagi calon haji/umroh.
 17. Pengawasan pelayanan vaksinasi meningitis pada jemaah calon haji.
 18. Pendampingan jemaah calon haji ke embarkasi dan dari debarkasi.
 19. Penerbitan sertifikat P3K kapal.
 20. Pengujian kesehatan.
 21. Pelayanan kesehatan terbatas.
 22. Pengawasan lalu lintas orang sakit.
 23. Pengawasan lalu lintas jenazah.
 24. Pemebrantasan vektor/foging.
 25. Pemberantasan pinjal dan tikus.
 26. Screening HIV-AIDS.
 27. Sosialisasi HIV-AIDS, IMS dan TB.
 28. Pengendalian penyakit tidak menular di wilayah kerja.
 29. Deteksi dini penyakit tidak menular di wilayah kerja.
 30. Pengawasan dan pemeriksaan sampel air bersih.
 31. Pemeriksaan sampel makanan.
 32. Penyusunan laporan PP 39 dan RPD.



33. Penyusunan SBK dan aplikasi RKAKL.
34. Pertemuan Reviu RKAKL.
35. Penyusunan DESK anggaran.
36. Revisi DIPA.
37. Kordinasi penyusunan laporan tahunan dengan BPPK.
38. Penyusunan laporan SAI.
39. Pertemuan keuangan di pusat.
40. Pertemuan ke BPKP Provinsi.
41. Penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah.
42. Penyusunan target dan PAGU PNBPNBP.
43. Penyusunan dokumen dan laporan realisas PNBPNBP.
44. Sosialisasi aplikasi TRPNBP.
45. Rekonsiliasi BMN.
46. Penyusunan laporan BMN tingkat satker.
47. Sosialisasi kepegawaian.
48. Pembayaran gaji dan tunjangan PNS.
49. Pengadaan pakaian dinas pegawai dan tenaga honorer.
50. Pemeliharaan halaman dan gedung kantor.
51. Pemeliharaan peralatan dan mesin.

F. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok KKP

Melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara (Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan).

2. Fungsi KKP

- a. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran.
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko Kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan.
- c. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko Kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan.
- d. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko Kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan.
- e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus.
- f. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan.



- g. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan.
- h. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan.
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan.
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan.
- k. Pelaksanaan urusan administrasi KKP.

G. STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 tahun 2021 sebagai perubahan atas Permenkes Nomor 77 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan menjelaskan bahwa Struktur organisasinya terdiri dari Sub Bagian Administrasi Umum, Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Upaya Kesehatan Lintas Wilayah. Disamping itu dilengkapi dengan Instalasi, Koordinator Wilayah Kerja, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sub Bagian Administrasi Umum

Sub Bagian Administrasi Umum dalam struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai mempunyai tugas menyusun laporan, pengelolaan, informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. Uraian tugas Sub Bagian Administrasi Umum adalah:

- a. Menyusun rancangan usulan anggaran dan program/kegiatan Sub Bagian Administrasi Umum.
- b. Menyusun rancangan Standar Prosedur Operasional / Kerja.
- c. Menyusun rancangan rencana pelaksanaan operasional program / kegiatan Bagian Administrasi Umum.
- d. Mengkoordinir urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan.
- e. Menyusun rancangan rencana pengelolaan keuangan/anggaran Bagian Administrasi Umum.
- f. Menyusun rancangan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai.
- g. Menyusun rancangan usulan pengadaan, pemeliharaan, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana.



- h. Menyusun rancangan usulan kebutuhan sumber daya manusia.
- i. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan sub bagian di lingkungan Bagian Administrasi Umum.
- j. Menyusun laporan berkala dan tahunan Bagian Administrasi Umum.
- k. Menyusun informasi hasil pelaksanaan program/kegiatan Bagian Administrasi Umum.
- l. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan ke dalam DP3/SKP.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Subtansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi

Subtansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif (OMKABA), jejaring kerja, dan kemitraan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

3. Subtansi Pengendalian Risiko Lingkungan

Subtansi Pengendalian Risiko Lingkungan melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan dan pengawasan hygiene sanitasi kapal/pesawat/alat transportasi lainnya di lingkungan bandara, Pelabuhan dan lintas batas darat negara.

4. Subtansi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah

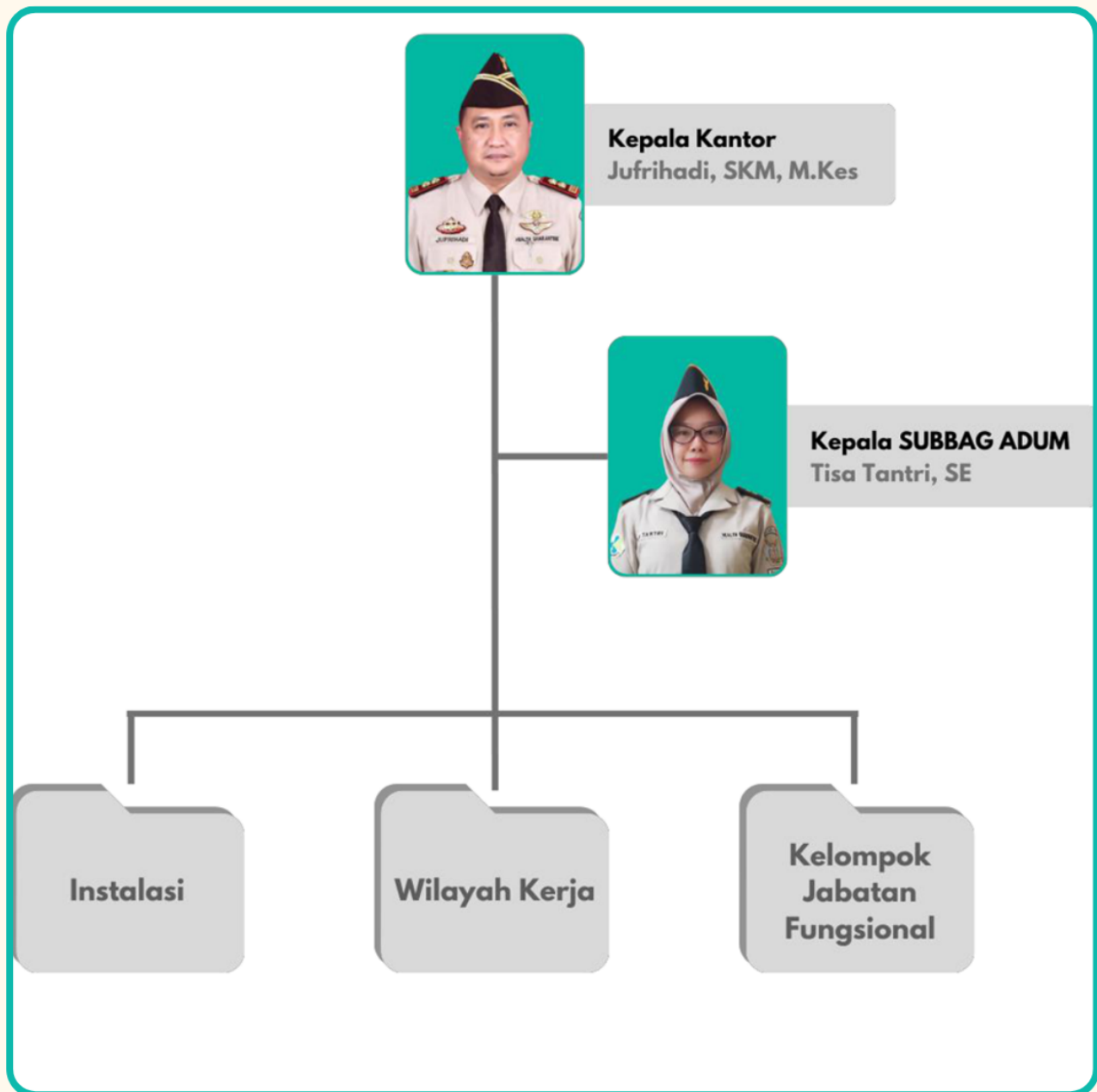
Subtansi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, jejaring kerja, kemitraan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

5. Instalasi.

6. Wilayah Kerja.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II DUMAI
TAHUN 2023**



**Gambar 2.18 Struktur Organisasi
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai tahun 2023**

BAB III

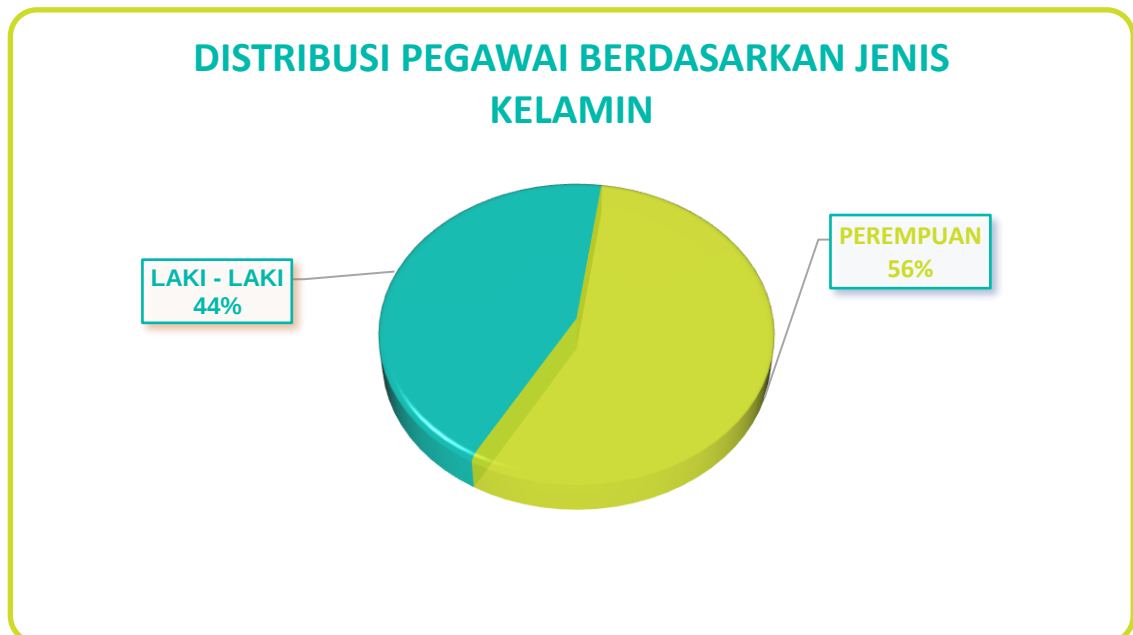
KEGIATAN DAN PENCAPAIAN SASARAN

Hasil kerja merupakan capaian secara kualitas dan kuantitas yang didapat dari kegiatan yang dilakukan. Hasil kerja dinilai dengan Pengukuran kinerja yakni dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru dalam kurun waktu Januari – Desember 2023. Hasil pencapaian Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru selama tahun 2023 sebagai berikut :

A. SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

1. Sumber Daya Manusia

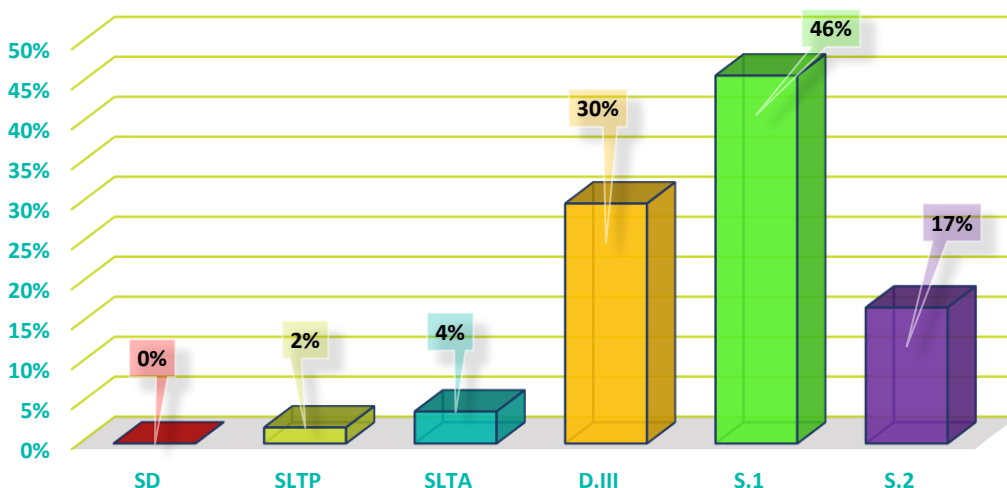
Jumlah Pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai pada akhir tahun 2023 dengan gambaran sebagai berikut :



Grafik 3.1 Distribusi Pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa dari 52 orang pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai terdapat 56% pegawai dengan jenis kelamin Perempuan sedangkan pegawai yang berjenis kelamin laki – laki sebanyak 44% dari jumlah pegawai.

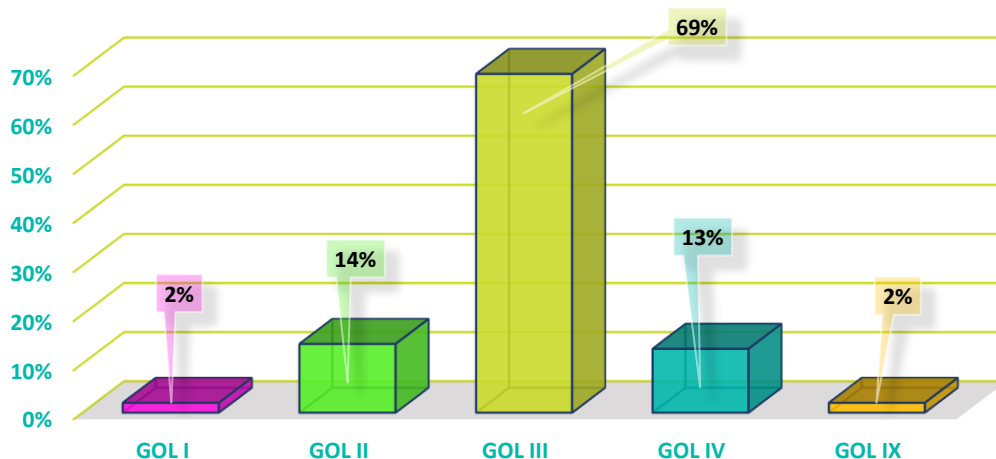
DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN



Grafik 3.2 Distribusi Pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023

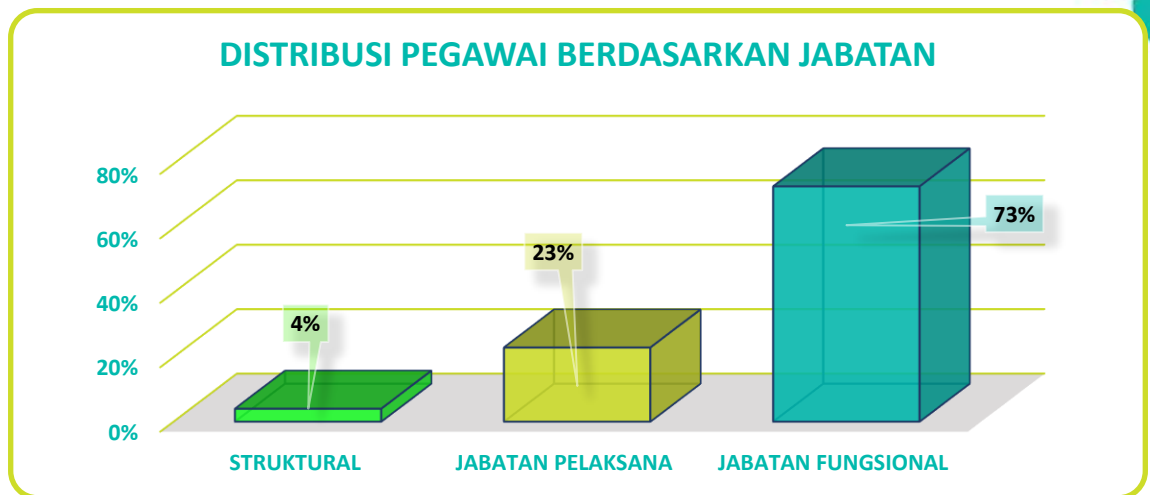
Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa dari 52 orang pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai Sebagian besar memiliki Tingkat Pendidikan Sarjana (S2) sebanyak 9 pegawai (17%), 24 pegawai (46%) berpendidikan Sarjana (S1), 16 pegawai (30%) berpendidikan Diploma III, 2 pegawai berpendidikan SLTA dan 1 pegawai berpendidikan SLTP.

DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



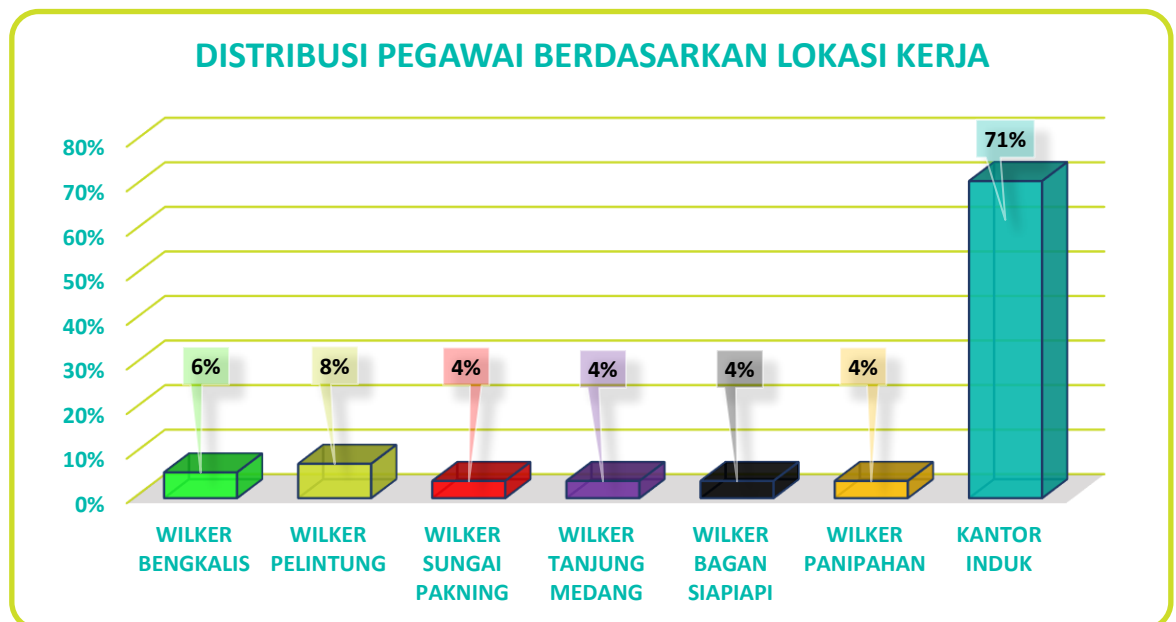
Grafik 3.3 Distribusi Pegawai Kkp Kelas II Dumai Berdasarkan Golongan Tahun 2023

Berdasarkan grafik diketahui bahwa pada tahun 2023 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai memiliki 7 (13%) pegawai golongan IV, 36 (69%) pegawai golongan III, 1 (2%) pegawai PPPK golongan IX, 7 (14%) pegawai golongan II, dan 1 (2%) pegawai golongan I.



Grafik 3.4 Distribusi Pegawai Kkp Kelas II Dumai Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa jabatan fungsional memiliki proporsi terbesar jabatan pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai yaitu sebanyak 38 pegawai (73%), jika dibandingkan dengan tahun 2022 jumlah pegawai dengan jabatan fungsional terus mengalami peningkatan dengan banyak ASN yang dilantik ke dalam jabatan fungsional di tahun 2023. Sedangkan posisi pemangku jabatan pelaksana tahun 2023 sebanyak 12 pegawai (23%) dan terdapat 2 pegawai (4%) menduduki jabatan struktural.



Grafik 3.5 Distribusi Pegawai Kkp Kelas II Dumai Berdasarkan Lokasi Kerja Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas, sebagian besar pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai berada pada Kantor Induk sebanyak 37 orang Pegawai dengan persentase 71%.



2. Sarana dan Prasarana

Nilai BMN posisi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 16.202.411.296,00 (Enam belas milyar dua ratus dua juta empat ratus sebelas ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri dari Persediaan sebesar Rp 354.747.396,00, Aset tetap sebesar Rp 15.832.597.650,00 dan aset lainnya sebesar Rp 15.066.250,00.

Penambahan dan Pengurangan peralatan dan mesin ditahun 2023 adalah sebesar Rp 976.431.650,-

Penambahan :

- 1 Unit mobil Hiace Rp 696.400.000,-
- 3 buah clinical Thermometer Rp 6.000.000,-
- 1 buah water test Rp 7.500.000,-
- Alat Kesehatan umum lainnya Rp 104.243.000,-
- 1 buah Dust Sampler Rp 3.150.000,-
- 3 Set Detektor Biologi Rp 352.500.000,-
- 1 buah serial printer Rp 6.116.150,-

Pengurangan :

- 1 unit Mobil ambulance Rp 199.477.500,-

**Tabel 3.1 Laporan Posisi Barang Milik Negara Neraca
Pertanggal 31 Desember 2023 Tahun Anggaran 2023**

Uraian	31 Desember 2023
Aset Lancar	354.747.396
Aset Tetap	15.832.597.650
Aset Lainnya	15.066.250
Jumlah Aset	16.202.411.296
Kewajiban Jangka Pendek	0
Ekuitas	16.202.411.296
Total Kewajiban dan Ekuitas	16.202.411.296

a. Dana

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai target kinerjanya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai di dukung oleh sumber daya anggaran sesuai Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) yang telah di



tetapkan. Pagu awal anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp. 14.598.189.000,- dana tersebut bersumber RM (rupiah murni) sebesar Rp. 13.040.124.000, dan dana bersumber PNB (Pendapatan Negara bukan pajak sebesar Rp. 1.558.065.000,-.

b. Alokasi Belanja

Pada kurun waktu tahun anggaran 2023 dapat dilihat profil anggaran keseluruhan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai adalah sebagai berikut

**Tabel 3.2 Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja
Kantor Kesehatan Kelas II Dumai Tahun Anggaran 2023**

Jenis Belanja	Pagu
Belanja Pegawai	Rp. 6.485.495.000
Belanja Barang	Rp. 6.299.826.000
Belanja Modal	Rp. 710.650.000
Total	Rp. 13.495.971.000

c. Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai didasarkan pada Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai tahun 2020-2024 yang merupakan sasaran prioritas program-program pencegahan dan pengendalian penyakit. Rencana kegiatan ini dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2023. Adapun program kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai pada tahun 2023 diuraikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.3 Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai Tahun 2023**

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	TVRO	RVRO	Progres
1	DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4249 Dukungan Pelayanan Kekarantina di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	PEA Koordinasi (kegiatan)	001 Koordinasi Pelayanan Kekarantina di Pintu Masuk Negara dan Wilayah (HS) (kegiatan)	198.204.000,0000	183.778.658,0000	6,0000	6,0000	100,00
2	DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4249 Dukungan Pelayanan Kekarantina di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	PEF Sosialisasi dan Diseminasi (orang)	001 Sosialisasi dan Diseminasi (HS) (orang)	86.395.000,0000	83.263.504,0000	110,0000	110,0000	100,00
3	DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4249 Dukungan Pelayanan Kekarantina di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat (Orang, Akta, Keping, Bidang)	012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (HS) (Orang)	72.270.000,0000	67.899.614,0000	1.700,0000	1.701,0000	100,00



No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	TVRO	RVRO	Progres
4	DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4249 Dukungan Pelayanan Kekarantina di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (HS) (layanan)	185.630.000,000	156.522.190,000	4,000	4,000	100,00
5	DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4249 Dukungan Pelayanan Kekarantina di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	017 layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut (HS) (layanan)	227.229.000,000	214.077.539,000	6,000	6,000	100,00
6	DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4249 Dukungan Pelayanan Kekarantina di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	U01 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan penyeberangan (HS) (layanan)	198.000.000,000	198.000.000,000	330,000	330,000	100,00
7	DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4249 Dukungan Pelayanan Kekarantina di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	U04 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus (HS) (layanan)	200.790.000,000	196.100.000,000	138,000	138,000	100,00
8	DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4249 Dukungan Pelayanan Kekarantina di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	U07 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD (HS) (layanan)	35.968.000,000	32.804.200,000	32,000	32,000	100,00
9	DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4249 Dukungan Pelayanan Kekarantina di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	U08 Layanan survei faktor risiko penyakit pes (HS) (layanan)	186.120.000,000	185.730.000,000	72,000	72,000	100,00
10	DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4249 Dukungan Pelayanan Kekarantina di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	U09 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare (HS) (layanan)	14.048.000,000	13.988.000,000	32,000	32,000	100,00
11	DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4249 Dukungan Pelayanan Kekarantina di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	U11 Layanan survei faktor risiko penyakit DBD (HS) (layanan)	42.240.000,000	42.237.000,000	132,000	132,000	100,00
12	DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4249 Dukungan Pelayanan Kekarantina di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	U12 Layanan survei faktor risiko penyakit malaria (HS) (layanan)	21.280.000,000	20.980.000,000	14,000	14,000	100,00
13	DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4249 Dukungan Pelayanan Kekarantina di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	U13 Layanan survei faktor risiko penyakit diare (HS) (layanan)	20.480.000,000	20.480.000,000	64,000	64,000	100,00
14	DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4249 Dukungan Pelayanan Kekarantina di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	U14 Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS (HS) (layanan)	25.480.000,000	25.480.000,000	20,000	20,000	100,00
15	DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4249 Dukungan Pelayanan Kekarantina di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	U15 Layanan survei faktor risiko penyakit TB (HS) (layanan)	54.150.000,000	54.150.000,000	10,000	10,000	100,00
16	DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4249 Dukungan Pelayanan Kekarantina di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	U19 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan (HS) (layanan)	257.400.000,000	257.400.000,000	429,000	429,000	100,00
17	DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4249 Dukungan Pelayanan Kekarantina di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	RAE Sarana Bidang Kesehatan (Paket, Unit)	001 Pengadaan alat dan bahan kekarantina kesehatan di pintu masuk (HS) (Paket)	1.055.854.000,000	1.052.123.730,000	58,000	58,000	100,00
18	DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4249 Dukungan Pelayanan Kekarantina di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	TBC Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	001 Pelatihan kesehatan (HS) (Orang)	584.620.000,000	568.335.759,000	35,000	58,000	100,00



No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	TVRO	RVRO	Progres
19	WA Program Dukungan Manajemen	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	AEA Koordinasi (kegiatan)	501 Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program (kegiatan)	59.140.000,0000	57.777.335,0000	6,0000	6,0000	100,00
20	WA Program Dukungan Manajemen	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	AEA Koordinasi (kegiatan)	502 Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program (kegiatan)	80.540.000,0000	73.941.873,0000	17,0000	17,0000	100,00
21	WA Program Dukungan Manajemen	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	AEA Koordinasi (kegiatan)	503 Koordinasi lintas program lintas sektor pengelolaan keuangan dan anggaran (kegiatan)	49.380.000,0000	47.161.161,0000	10,0000	10,0000	100,00
22	WA Program Dukungan Manajemen	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	AEA Koordinasi (kegiatan)	504 Koordinasi lintas program lintas sektor hukum dan organisasi (kegiatan)	8.540.000,0000	8.055.300,0000	1,0000	1,0000	100,00
23	WA Program Dukungan Manajemen	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	AEA Koordinasi (kegiatan)	505 Koordinasi lintas program lintas sektor kepegawaian dan umum (kegiatan)	51.240.000,0000	49.876.078,0000	1,0000	1,0000	100,00
24	WA Program Dukungan Manajemen	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	956 Layanan BMN (Layanan)	44.270.000,0000	41.005.255,0000	5,0000	5,0000	100,00
25	WA Program Dukungan Manajemen	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	957 Layanan Hukum (Layanan)	10.270.000,0000	8.945.000,0000	3,0000	3,0000	100,00
26	WA Program Dukungan Manajemen	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	958 Layanan Hubungan Masyarakat (Layanan)	120.000.000,0000	120.000.000,0000	1,0000	1,0000	100,00
27	WA Program Dukungan Manajemen	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	14.000.000,0000	10.500.000,0000	1,0000	1,0000	100,00
28	WA Program Dukungan Manajemen	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	962 Layanan Umum (Layanan)	26.040.000,0000	23.948.980,0000	2,0000	2,0000	100,00
29	WA Program Dukungan Manajemen	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	963 Layanan Data dan Informasi (Layanan)	1.000.000,0000	1.000.000,0000	1,0000	1,0000	100,00
30	WA Program Dukungan Manajemen	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	8.796.746.000,0000	8.694.925.909,0000	12,0000	12,0000	100,00
31	WA Program Dukungan Manajemen	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	EBC Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	954 Layanan Manajemen SDM (Orang)	27.006.000,0000	24.665.948,0000	10,0000	10,0000	100,00
32	WA Program Dukungan Manajemen	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	EBC Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	305.169.000,0000	287.574.094,0000	21,0000	27,0000	100,00



No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	TVRO	RVRO	Progres
33	WA Program Dukungan Manajemen	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	186.289.000,0000	185.208.939,0000	3,0000	3,0000	100,00
34	WA Program Dukungan Manajemen	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	69.331.000,0000	69.122.419,0000	6,0000	6,0000	100,00
35	WA Program Dukungan Manajemen	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	126.072.000,0000	124.709.242,0000	7,0000	7,0000	100,00
36	WA Program Dukungan Manajemen	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (Dokumen)	54.780.000,0000	54.635.646,0000	1,0000	1,0000	100,00

Berdasarkan tabel di atas bahwa adanya RVRO (100%) dalam layanan dukungan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara pada tahun 2023 dengan realisasi anggaran Rp. 3.373.350.194 (97,32%). Capaian realisasi volume rincian output pada Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara pada tahun 2023 tercapai 100%.

Sedangkan pada layanan dukungan manajemen pelaksanaan program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2023 mempunyai TVRO dan capaian RVRO (100%) dengan realisasi anggaran Rp. 9.882.682.976 (98,53%).

d. Keuangan

Sebagai upaya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi serta mendukung adanya kebijakan-kebijakan penganggaran secara nasional, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai mengalami revisi sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan anggaran, baik untuk revisi dalam rangka pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kinerja (POK) maupun revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Selama tahun 2023 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai melakukan revisi sebanyak tiga belas kali melalui aplikasi online SAKTI Kemenkeu . Adapun garis besar perubahan anggaran tersebut dapat dijabarkan pada tabel berikut.



Tabel 3.4 Revisi DIPA
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai Tahun 2023

DIPA / Tgl	NILAI PAGU (Rp)	DIGITAL STAMP	PERUBAHAN
DIPA Awal	14.598.189.000,-	3812-7758-0716-8705	-
DIPA Revisi-1 26 - 12 - 2022	14.598.189.000,-	9003-0306-9545-5361	Pemutakhiran / Penyesuaian rencana penarikan dana pada halaman III DIPA
DIPA Revisi-2 15 - 02 - 2023	14.598.189.000,-	9003-0306-9545-5361	Pemutakhiran/Penyesuaian POK (detil belanja) pada RO PN dan Non PN
DIPA Revisi-3 17 - 03 - 2023	14.598.189.000,-	9003-0306-9545-5361	Pemutakhiran/Penyesuaian rencana penarikan dana pada halaman III DIPA
DIPA Revisi-4 14 - 04 - 2023	14.598.189.000,-	9003-0306-9545-5361	Pemutakhiran/Penyesuaian rencana penarikan dana pada halaman III DIPA Pemutakhiran/Penyesuaian POK (detil belanja) pada RO Non PN
DIPA Revisi-5 07 - 07 - 2023	14.598.189.000,-	9003-0306-9545-5361	Pemutakhiran/Penyesuaian POK (detil belanja) pada RO PN dan Non PN
DIPA Revisi-6 10 - 07 - 2023	14.598.189.000,-	9003-0306-9545-5361	Pemutakhiran/Penyesuaian POK (detil belanja) pada RO PN dan Non PN
DIPA Revisi-7 18 - 07 - 2023	13.495.971.000,-	6067-2375-0212-6591	Pemutakhiran/Penyesuaian rencana penarikan dana pada halaman III DIPA Pemutakhiran/Penyesuaian POK (detil belanja) pada RO Non PN
DIPA Revisi-8 07- 09 - 2023	13.495.971.000,-	6067-2375-0212-6591	Penambahan alokasi pagu anggaran belanja modal yang dapat dimanfaatkan dari sisa pagu anggaran belanja kontraktual
DIPA Revisi-9 16 - 10 - 2023	13.495.971.000,-	6067-2375-0212-6591	Pemutakhiran/Penyesuaian POK (detil belanja) pada RO PN dan Non PN
DIPA Revisi-10 24 - 11 - 2023	13.495.971.000,-	6067-2375-0212-6591	
DIPA Revisi-11 30 - 11 - 2023	13.495.971.000,-	2834-5815-0359-1609	
DIPA Revisi-12 20- 12 - 2023	13.495.971.000,-	2834-5815-0359-1609	
DIPA Revisi-13 29- 12 - 2023	13.495.971.000,-	2834-5815-0359-1609	



Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki target PNBP sebesar Rp.1.812.430.000 (satu milyar delapan ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan penggunaan pagu PNBP sebesar Rp. 2.197.404.534 (dua milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah, Realisasi target dan penggunaan PNBP dapat terlihat dari tabel berikut.

**Tabel 3.5 Target dan Realisasi PNPB
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai Tahun 2023**

TARGET PENGGUNAAN PNBP (Rp)	PENGGUNAAN PNBP (Rp)	REALISASI PENERIMAAN PNPB	
		TARGET	PENGGUNAAN
1.558.065.000	1.499.369.929	1.812.430.000	2.197.404.534

**Tabel 3.6 Sumber Pendapatan Kantor
Kantor Kesehatan Kelas II Dumai Tahun 2023**

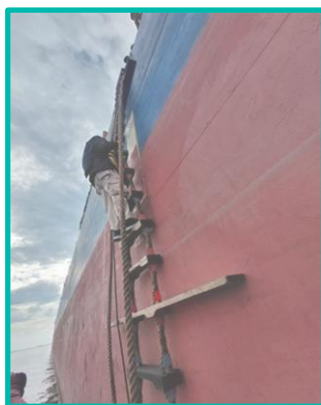
Pendapatan Penjualan Peralatan dan mesin (425122)	Rp. 63.812.000
Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan (425313)	Rp. 66.350.000,
Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan (425314)	Rp. 2.014.100.000,
Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan (425315)	Rp. 51.850.000,
Pendapatan sewa tanah,Gedung dan bangunan (425131)	Rp. 552.534,
Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (425911)	Rp. 740.000,
TOTAL	Rp. 2.197.404.534

B. SUBSTANSI PENGENDALIAN KARANTINA DAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI

1. Pengawasan dan Pemeriksaan Alat Angkut

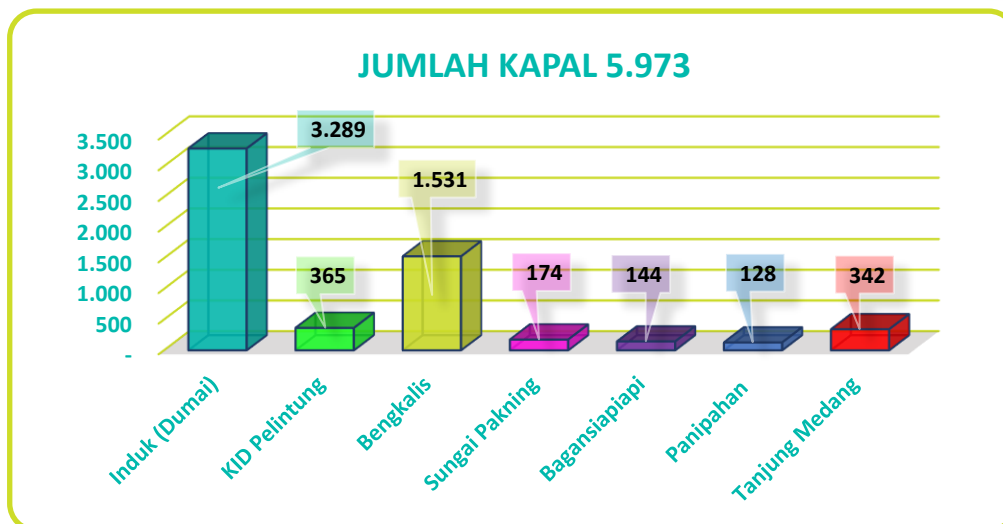
a. Pengawasan dan Pemeriksaan Kedatangan Kapal dari Luar Negeri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan pada pasal 19 dinyatakan bahwa setiap kapal yang datang dari luar negeri atau mengambil penumpang/barang dari luar negeri berada dalam status karantina. Nakhoda kapal sebagaimana kapal dimaksud hanya dapat menurunkan atau menaikkan orang atau barang setelah diberikan surat persetujuan kekarantinaan oleh petugas atau pejabat karantina kesehatan.



Gambar 3.1
Pemeriksaan Kedatangan Kapal Dalam Karantina

Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kedatangan kapal dalam karantina dilaksanakan oleh tim boarding Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai sesuai standar kekarantinaan pada setiap kedatangan. Kapal dinyatakan bebas karantina apabila setelah pemeriksaan memenuhi semua persyaratan dokumen yang telah ditentukan. Sedangkan dari aspek kesehatan tidak ditemuinya adanya masalah kesehatan atau faktor risiko yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Gambaran pelaksanaan kegiatan pengawasan/ pemeriksaan kapal dari luar negeri yang dilaksanakan oleh KKP Kelas II Dumai pada tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 3.6 Distribusi Pengawasan / Pemeriksaan Kedatangan Kapal Dari Luar Negeri Tahun 2023

Dilihat dari grafik 3.6 jumlah pengawasan/pemeriksaan kedatangan kapal dalam karantina dari luar negeri yang dilakukan oleh KKP Kelas II Dumai pada tahun 2023 adalah sebanyak 5.973 kapal dengan jumlah terbanyak adalah pada wilayah induk sebanyak 3.289 kapal dan jumlah paling kecil pada wilayah kerja Panipahan sebanyak 128 kapal yang datang dari luar negeri.

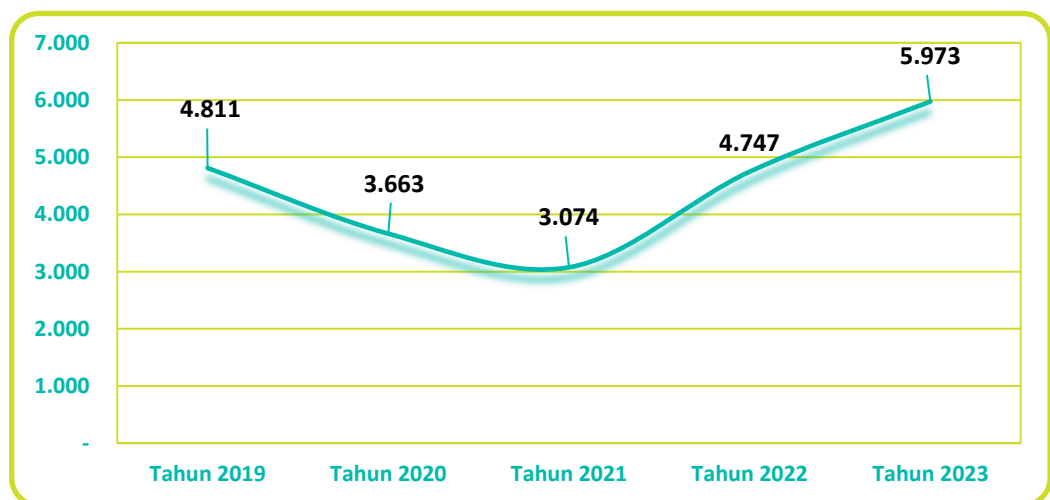
Kedatangan kapal dari luar negeri pada wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Dumai pada umumnya datang dari pelabuhan negara Singapura, Malaysia, India, China, beberapa negara asia, eropa dan Afrika lainnya. Jenis kapal yang masuk melalui Pelabuhan pada wilayah induk dan wilayah kerja KKP Kelas II Dumai adalah kapal tanker yang akan melakukan bongkar muat komoditas CPO/minyak goreng, minyak mentah, bahan kimia, bahan baku pelumas, dan lain-lain. Sedangkan kapal kargo yang akan melakukan bongkar muat komoditas pupuk, sisa hasil pengolahan sawit, dan lain-lain. Sementara kapal-kapal rakyat yang akan melakukan bongkar muat komoditas buah-buahan, sembako, dan lain-lain. Adapun kapal penumpang cepat/ speed boat dari Malaysia yang masuk melalui pelabuhan Dumai dan Bengkalis beroperasi seperti biasanya dikarenakan masa pandemic covid-19 sudah beralih menjadi endemi.

Semenjak WHO menetapkan COVID-19 sebagai endemi akan tetapi pemeriksaan terhadap kedatangan kapal dari luar negeri masih tetap diperketat karena bisa saja masa inkubasi terhadap beberapa penyakit *emerging* dan *re-emerging* masih ditemukan. Pemeriksaan semua kapal dari luar negeri wajib berlabuh di zona karantina untuk dilakukan pemeriksaan sebelum melakukan aktifitas di area pelabuhan.

Hasil pengawasan/pemeriksaan kapal dalam karantina dari luar negeri pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Hasil Pengawasan/pemeriksaan terhadap kedatangan kapal dari wilayah terjangkit akan dilakukan tindakan berupa pemberian izin lepas karantina terbatas terhadap kapal jika ada dugaan masalah KKM atau faktor risikonya untuk dilakukan pemeriksaan, penanganan dan tindakan lebih lanjut.
2. Kapal-kapal dengan dokumen tidak lengkap atau tidak valid diwajibkan untuk melengkapi atau memperbaharui dokumen sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Semua kapal yang telah dinyatakan bebas dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan/atau faktor risikonya diberikan *Certificate of Pratique/Free Pratique* untuk selanjutnya dapat melakukan aktifitas di area pelabuhan.

Untuk melihat jumlah kedatangan kapal yang dilakukan pengawasan / pemeriksaan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 3.7 Distribusi Pengawasan / Pemeriksaan Kedatangan Kapal Dari Luar Negeri Tahun 2019 S/D 2023

Berdasarkan grafik 3.7 di atas dapat dilihat bahwa jumlah kedatangan kapal dalam karantina dari luar negeri yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, hal ini merupakan dampak dari ditetapkannya endemi COVID-19 yang menyebabkan mulai tingginya mobilisasi dan operasional kapal yang datang dan berangkat melalui pintu masuk KKP Kelas II Dumai baik wilayah induk maupun wilayah kerja.

b. *Pengawasan Kedatangan Kapal dari Pelabuhan Dalam Negeri.*

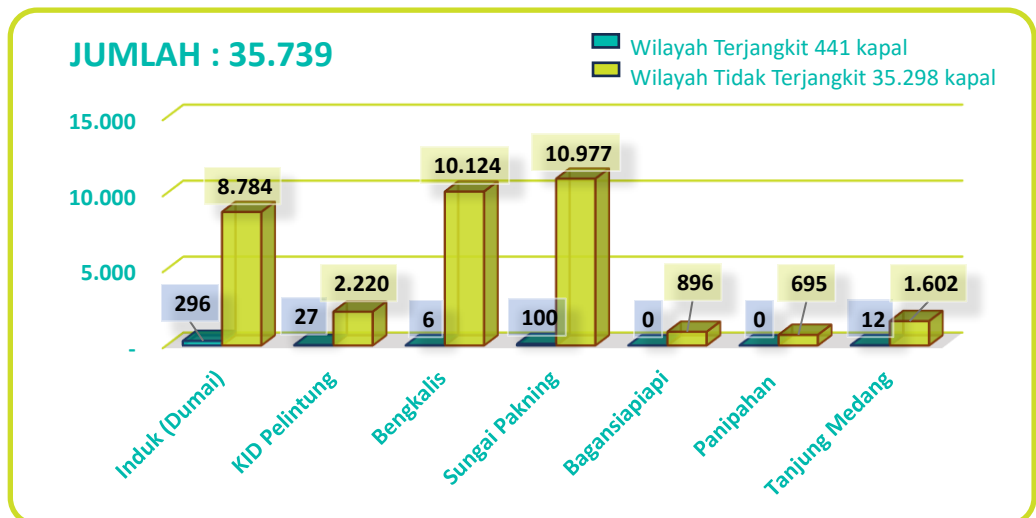
Pengawasan kedatangan kapal dari pelabuhan dalam negeri terdiri dari kedatangan dari pelabuhan wilayah terjangkau dan pelabuhan tidak terjangkau. Kedatangan dari pelabuhan wilayah terjangkau maka kapal tersebut harus mengikuti prosedur kedatangan kapal dalam karantina. Pemeriksaan dilakukan oleh tim boarding KKP Kelas II Dumai sesuai dengan standar pemeriksaan kapal dalam karantina.



Gambar 3.2
Pemeriksaan Kedatangan Kapal dari Dalam Negeri

Penentuan kedatangan kapal dari wilayah terjangkau pada tahun 2023 berpedoman pada ketentuan oleh Kementerian Kesehatan yang dapat diakses melalui Website <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>. Wilayah terjangkau yang dimaksud adalah kedatangan kapal dari suatu wilayah Kabupaten/kota lain masih sebagai wilayah dengan transmisi lokal COVID-19. Sedangkan kedatangan kapal dari pelabuhan wilayah tidak terjangkau dilakukan pemeriksaan jika adanya laporan atau indikasi kejadian penyakit KKM.

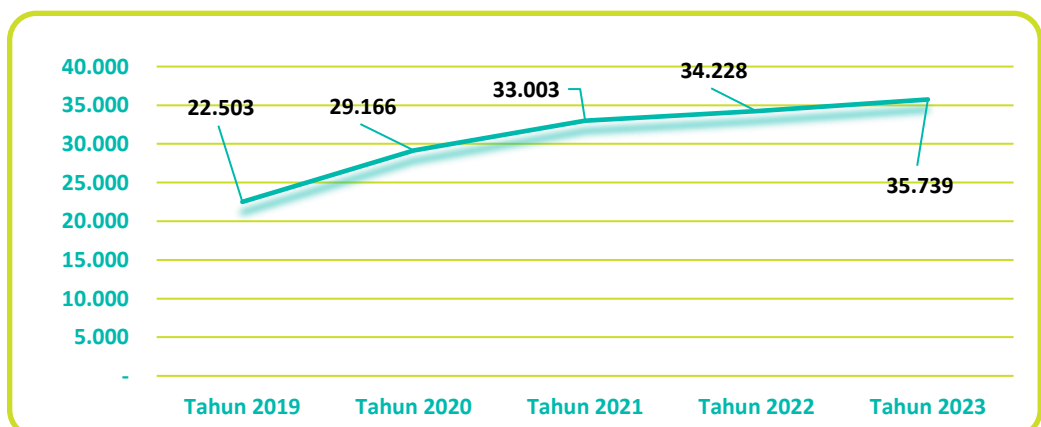
Jumlah pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan terhadap kedatangan kapal dari dalam negeri pada tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 3.8
Distribusi Pengawasan / Pemeriksaan Kedatangan Kapal Dari Pelabuhan Dalam Negeri Tahun 2023

Berdasarkan grafik 3.8 di atas terlihat bahwa kedatangan kapal dari dalam negeri pada tahun 2023 yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan adalah sebanyak 35.739 yang terdiri dari sebanyak 441 datang dari wilayah terjangkit dan sebanyak 35.298 dari wilayah tidak terjangkit. Kapal dari wilayah terjangkit terbanyak melalui wilayah induk yaitu sebanyak 296 kapal, sedangkan jumlah paling kecil melalui Wilayah Kerja Pelabuhan Panipahan dan Bagan Siapiapi yaitu tidak ada kedatangan kapal. Sedangkan Kapal dari wilayah tidak terjangkit terbanyak melalui wilayah Sungai Pakning yaitu sebanyak 10.977 kapal, sedangkan jumlah paling kecil melalui Wilayah Kerja Pelabuhan Panipahan yaitu sebanyak 695 kapal.

Untuk melihat jumlah kedatangan kapal dari dalam negeri yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 3.9 Distribusi Pengawasan/Pemeriksaan Kedatangan Kapal Dari Pelabuhan Dalam Negeri Tahun 2019 S/D 2023



Berdasarkan grafik 3.9 terlihat bahwa pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan terhadap kedatangan kapal dari dalam negeri pada tahun 2023 terus meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena meningkatnya aktivitas pada pelabuhan-pelabuhan di wilayah induk serta wilayah kerja lainnya seperti pelabuhan penyeberangan (roro) di Pelabuhan Induk (adanya penambahan tujuan Dumai- Alai Insit), Sungai Pakning dan Bengkalis.

Jenis kapal dalam negeri yang keluar masuk melalui pelabuhan pada wilayah Kerja KKP Dumai yaitu kapal tanker, kapal kargo, kapal penumpang (Ferry/Roro), Tugboat, Tongkang, serta kapal rakyat (Pelra) dan lain-lain.

Hasil pengawasan/pemeriksaan terhadap kapal yang datang dari dalam negeri yang dilakukan pada tahun 2023 adalah :

1. Hasil Pengawasan/pemeriksaan terhadap kedatangan kapal dari dalam negeri wilayah terjangkau akan dilakukan tindakan berupa pemberian izin lepas karantina terbatas terhadap kapal jika ada dugaan masalah KKMD atau faktor risikonya untuk dilakukan pemeriksaan, penanganan dan tindakan lebih lanjut.
2. Bagi kapal yang datang dari wilayah dalam negeri terjangkau diberikan *Certificate of Pratique (Free Pratique)* apabila hasil pemeriksaan tidak ditemukan masalah KKM atau faktor risikonya untuk selanjutnya diizinkan melakukan aktivitas di pelabuhan.
3. Kapal yang berasal dari pelabuhan dalam negeri tidak terjangkau diizinkan langsung melakukan aktivitas apabila tidak terdapat masalah KKMD atau faktor risikonya.

c. *Pengawasan/Pemeriksaan Keberangkatan Kapal.*

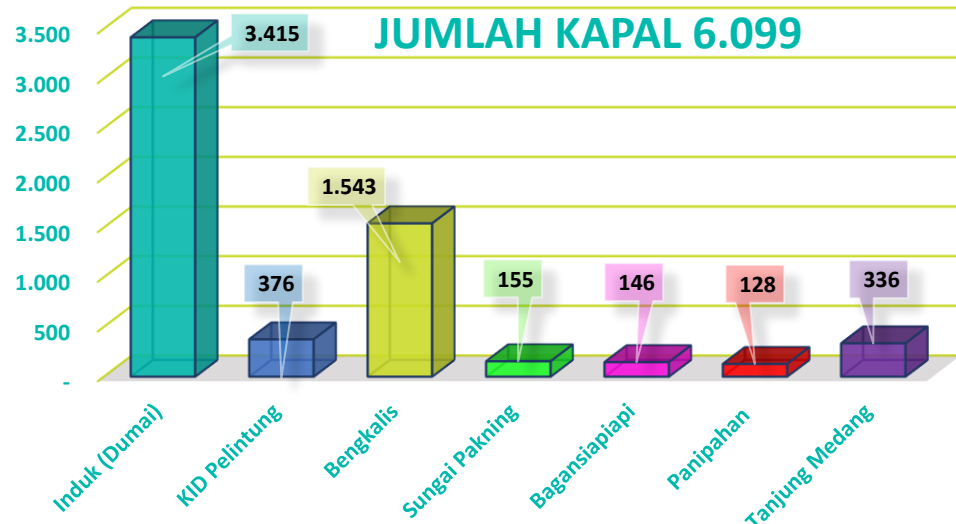
Kegiatan pengawasan/pemeriksaan keberangkatan kapal adalah dalam rangka penerbitan dokumen izin berlayar karantina kesehatan atau yang disebut dengan *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)* sebagaimana tercantum dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang menyatakan bahwa pihak Kesyahbandaran tidak dibenarkan menerbitkan surat izin berlayar karantina kesehatan atau yang disebut dengan *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)* yang diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan.



Gambar 3.3
Pemeriksaan Keberangkatan Kapal

Pemeriksaan yang dilakukan adalah berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen kesehatan kapal serta pemeriksaan agar kapal yang berangkat dapat dinyatakan bebas masalah KKM atau faktor risikonya. Apabila dari hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan maka pihak kapal harus melengkapi atau memperbaharui terlebih dahulu. Sedangkan jika ditemukan masalah KKM atau faktor risikonya maka terlebih dahulu harus dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan berlaku.

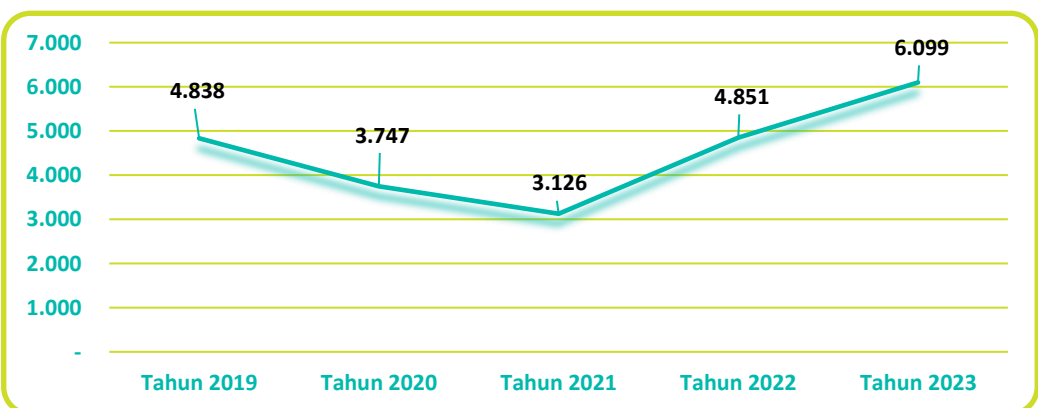
Distribusi jumlah keberangkatan kapal yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan pada tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 3.10 Distribusi Pengawasan / Pemeriksaan Keberangkatan Kapal Luar Negeri Tahun 2023

Berdasarkan grafik 3.10 terlihat bahwa total keberangkatan kapal luar negeri yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan tahun 2023 adalah sebanyak 6.099 kapal. Jumlah terbanyak keberangkatan kapal luar negeri adalah pada wilayah induk sebanyak 3.415 dan jumlah paling kecil adalah Wilayah Kerja Panipahan sebanyak 128 kapal.

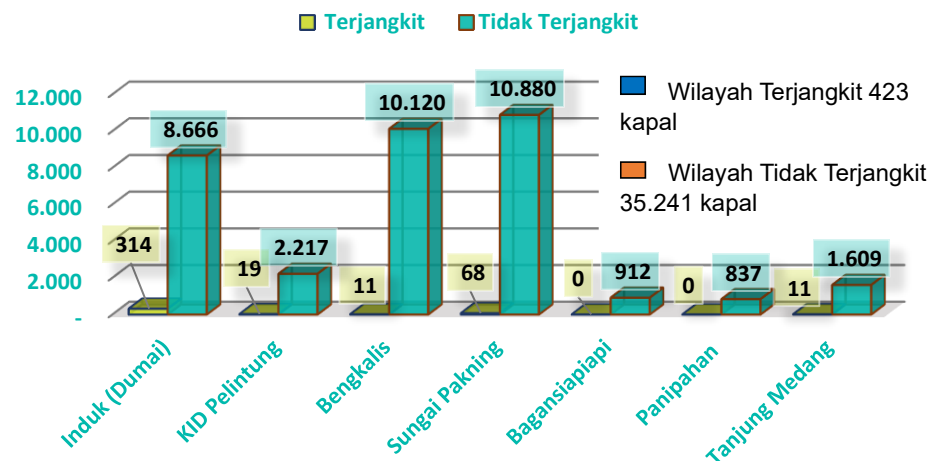
Jumlah pengawasan/pemeriksaan keberangkatan kapal luar negeri yang dilaksanakan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 3.11 Distribusi Pengawasan Keberangkatan Kapal Luar Negeri Tahun 2019 S/D 2023

Berdasarkan grafik 3.11 di atas dapat dilihat bahwa jumlah keberangkatan kapal luar negeri yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan pada tahun 2023 mulai mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, hal ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19 menuju endemi yang menyebabkan tingginya mobilisasi dan operasional keberangkatan kapal melalui pintu masuk di area kerja KKP Kelas II Dumai.

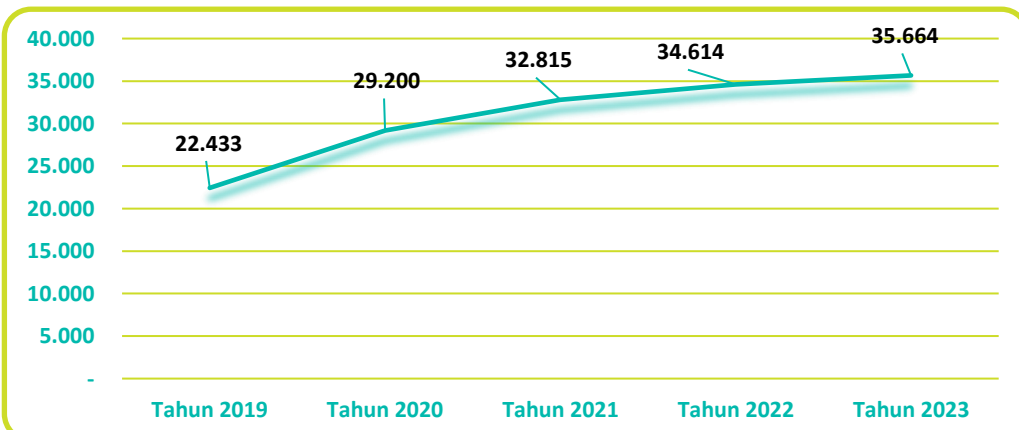
JUMLAH KAPAL : 35.664



Grafik 3.12 Distribusi Pengawasan / Pemeriksaan Keberangkatan Kapal Dalam Negeri Tahun 2023

Berdasarkan grafik 3.12 terlihat bahwa total keberangkatan kapal yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan adalah sebanyak 35.664 kapal dengan rincian sebanyak 423 kapal wilayah terjangkit sedangkan 35.241 kapal wilayah tidak terjangkit. Kapal dari wilayah terjangkit terbanyak melalui wilayah induk yaitu sebanyak 314 kapal, sedangkan jumlah paling kecil melalui Wilayah Kerja Pelabuhan Panipahan dan Bagan Siapiapi yaitu tidak ada kedatangan kapal. Sedangkan Kapal dari wilayah tidak terjangkit terbanyak melalui wilayah Sungai Pakning yaitu sebanyak 10.880 kapal, sedangkan jumlah paling kecil melalui Wilayah Kerja Pelabuhan Panipahan yaitu sebanyak 837 kapal.

Jumlah pengawasan/pemeriksaan keberangkatan kapal dalam negeri yang dilaksanakan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut



Grafik 3.13 Distribusi Pengawasan Keberangkatan Kapal Dalam Negeri Tahun 2019 S/D 2023

Berdasarkan grafik 3.13 terlihat bahwa pada tahun 2023 terjadi peningkatan pengawasan/pemeriksaan keberangkatan kapal dibandingkan

dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya aktivitas beberapa pelabuhan di wilayah induk dan wilayah kerja KKP Kelas II Dumai.

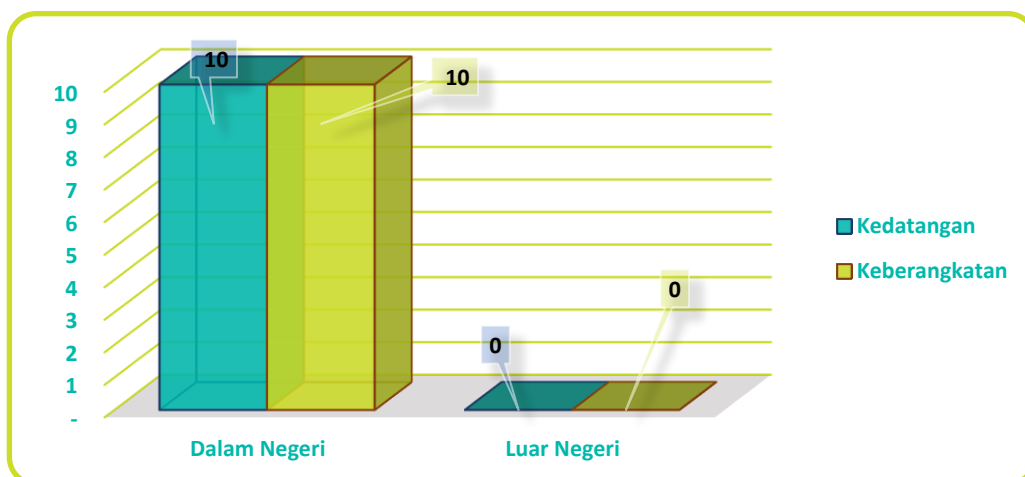
Hasil pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2023 adalah:

1. Tidak ditemukan kejadian berpotensi KKM atau faktor risikonya pada saat pemeriksaan keberangkatan kapal.
2. Semua kapal yang telah memenuhi syarat dokumen dan tidak ditemukan masalah kesehatan atau faktor risikonya diterbitkan Surat Izin Berlayar Karantina Kesehatan.

d. *Pengawasan Lalu Lintas Pesawat.*

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dinyatakan bahwa petugas kantor kesehatan pelabuhan berhak untuk melakukan pengawasan terhadap pesawat, awak maupun penumpang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pesawat yang datang maupun berangkat bebas dari faktor risiko maupun masalah kesehatan lainnya.

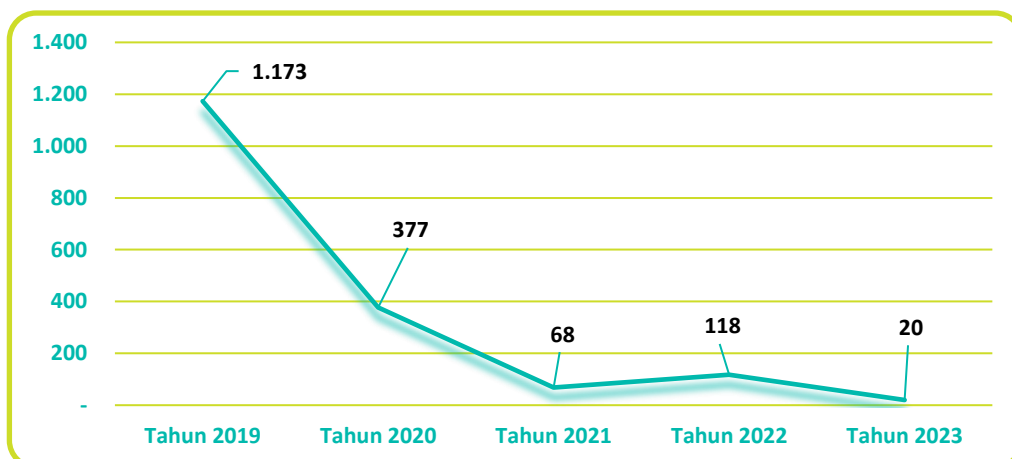
Kegiatan pengawasan/pemeriksaan kedatangan pesawat pada Wilayah Kerja Bandara Pinang Kampai pada tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3.14 Distribusi Pengawasan / Pemeriksaan Kedatangan Dan Keberangkatan Pesawat Di Bandara Pinang Kampai Tahun 2023

Dari grafik 3.14 di atas terlihat bahwa jumlah kedatangan maupun keberangkatan pesawat pada tahun 2023 yang dilakukan pengawasan adalah sebanyak 20 pesawat. Pengawasan yang dilakukan hanya untuk kedatangan dan keberangkatan dalam negeri karena Bandara Pinang Kampai Dumai bukan

merupakan Bandara Internasional, Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat yang dilakukan pengawasan selama 5 tahun terakhir adalah :



Grafik 3.15
Distribusi Pengawasan/Pemeriksaan Kedatangan Dan Keberangkatan Pesawat Di Bandara Pinang Kampai Tahun 2019 S/D 2023

Dilihat dari grafik 3.15 di atas terlihat bahwa mulai terjadi penurunan jumlah pesawat yang dilakukan pengawasan pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya edaran dari dinas perhubungan kota Dumai yang menyatakan tidak beroperasionalnya Bandara Pinang Kampai pada tahun 2023 sampai dengan batas waktu yang tidak dapat ditentukan.

2. Penerbitan Dokumen Kesehatan

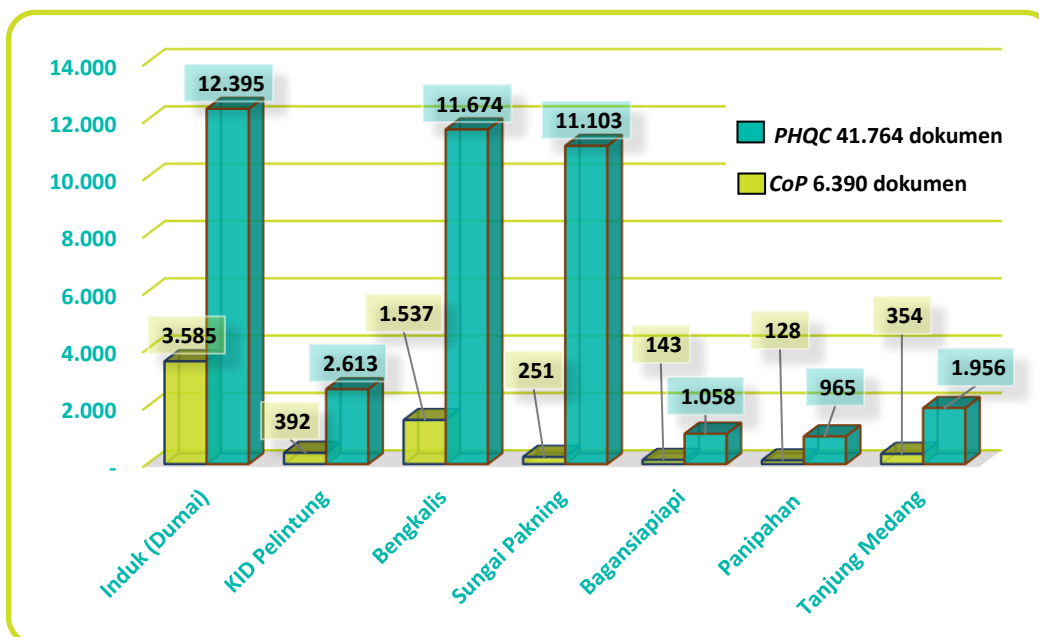
a. Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dinyatakan bahwa dokumen kesehatan untuk alat angkut (kapal laut) terdiri dari deklarasi kesehatan, sertifikat persetujuan karantina kesehatan, sertifikat sanitasi, sertifikat obat-obatan dan alat kesehatan, buku kesehatan kapal, dan surat persetujuan berlayar karantina kesehatan.

Setiap kapal yang datang dan berangkat melalui pelabuhan harus memiliki dokumen kesehatan sebagaimana ketentuan sebagaimana tersebut di atas. Untuk kapal yang datang dari luar negeri atau pelabuhan dalam negeri terjangkau wajib menyerahkan Deklarasi Kesehatan Maritim atau yang disebut *Maritime Declaration of Health (MDH)* dan setelah dilakukan pengawasan atau pemeriksaan akan diberikan Sertifikat Izin Karantina atau yang disebut *Certificate of Pratique (CoP)* baik Izin Bebas Karantina atau *Free Pratique* maupun Izin Terbatas Karantina atau *Restricted Pratique*. Sedangkan

untuk kapal yang berangkat baik ke dalam maupun ke luar negeri harus memperoleh Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan atau yang disebut *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)* yang diterbitkan oleh Pejabat pada Kantor Kesehatan Pelabuhan.

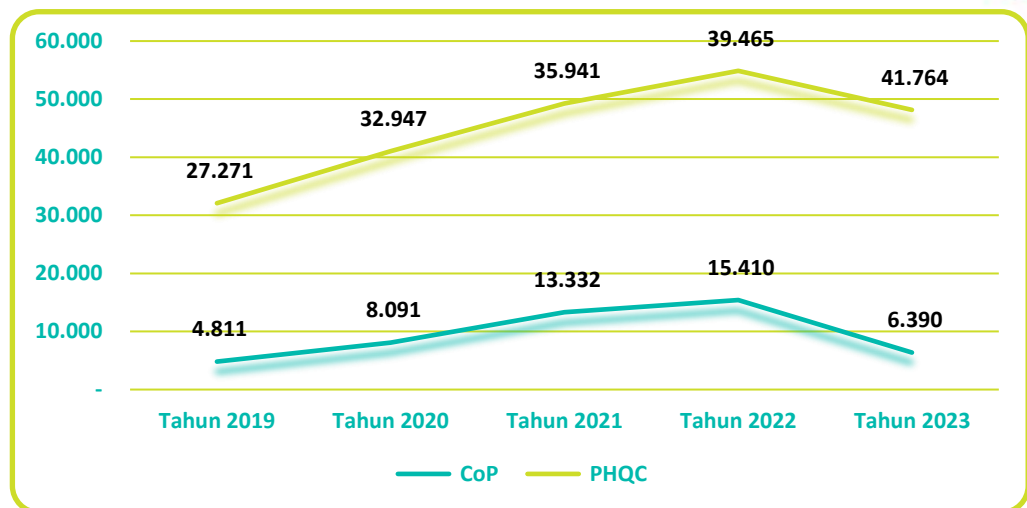
Untuk melihat jumlah dokumen *CoP* dan *PHQC* yang diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai pada tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3.16 Distribusi Penerbitan Dokumen Cop Dan Phqc Tahun 2023

Berdasarkan grafik 3.16 di atas terlihat bahwa jumlah penerbitan dokumen *CoP* pada tahun 2023 adalah sebanyak 6.390 dokumen. Jumlah dokumen *CoP* paling banyak diterbitkan wilayah induk sebanyak 3.585 dokumen dan jumlah paling kecil di Wilayah Kerja Panipahan sebanyak 128 dokumen. Jumlah penerbitan *PHQC* pada tahun 2022 adalah sejumlah 41.764 dokumen dengan jumlah penerbitan terbanyak di wilayah induk sebanyak 12.395 dokumen dan jumlah terkecil di Wilayah Kerja Panipahan sebanyak 965 dokumen.

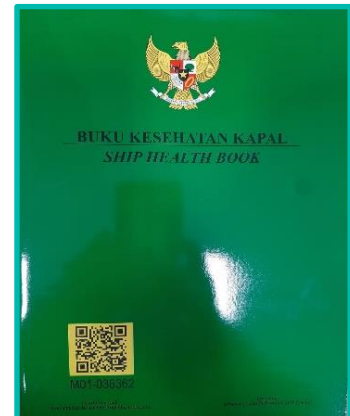
Jumlah dokumen *CoP* dan *PHQC* yang diterbitkan pada seluruh wilayah kerja KKP Kelas II Dumai selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 3.17 Distribusi Penerbitan Dokumen Cop Dan Phqc Tahun 2019 S/D 2023

Berdasarkan grafik 3.17 di atas terlihat jumlah penerbitan dokumen CoP yang diterbitkan mulai mengalami penurunan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena sejak Februari tahun 2023 tidak adanya wilayah dalam negeri terjangkau karena sudah dalam masa endemi menuju bebas covid-19. Sedangkan penerbitan PHQC juga meningkat karena meningkatnya aktivitas di beberapa pelabuhan di wilayah kerja KKP Kelas II Dumai.

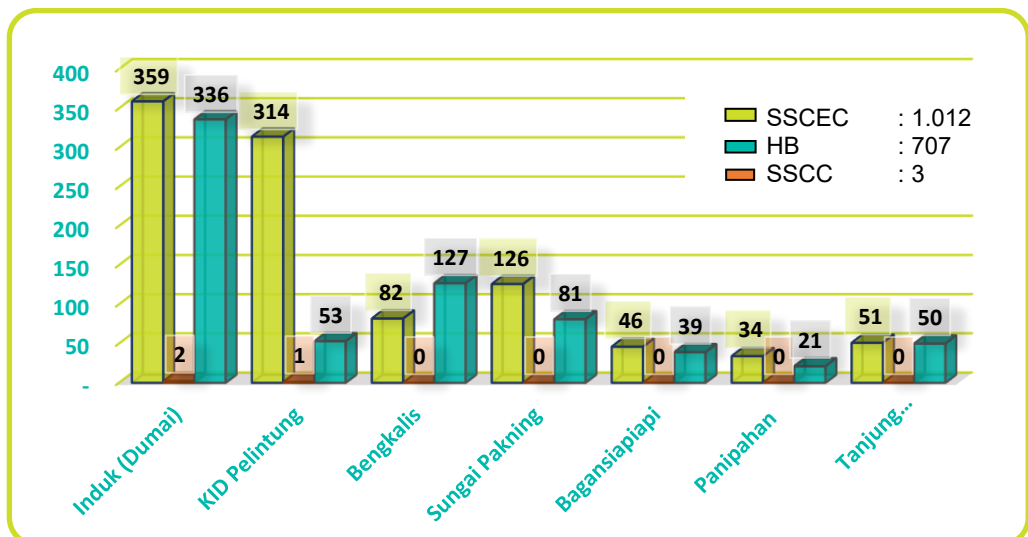
Kemudian dokumen lain yang harus dimiliki oleh setiap kapal adalah Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal atau yang disebut *Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC)* atau *Sertifikat Tindakan Sanitasi Kapal* atau yang disebut *Ship Sanitation Control Certificate (SSCC)*, yang merupakan salah satu syarat untuk penerbitan CoP maupun PHQC. Sertifikat SSCEC atau SSCC berlaku selama 6 bulan, hal ini sesuai dengan amanat peraturan kesehatan internasional atau *International Health Regulation (IHR)* 2005. Dokumen SSCEC atau SSCC harus dilakukan pembaharuan sebelum habis masa berlakunya dan bagi kapal yang belum mempunyai sertifikat ini harus dilakukan penerbitan baru. Penerbitan dokumen SSCEC/SSCC akan dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan atau tindakan penyehatan terhadap kapal yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat.



Gambar 3.4
Dokumen SSCEC dan Health Book

Dokumen Buku kesehatan (*Health Book*) harus dimiliki oleh setiap kapal yang akan berlayar dari pelabuhan Indonesia. Buku kesehatan merupakan alat komunikasi antar pelabuhan dan diisi petugas kantor kesehatan Pelabuhan mengenai keadaan kesehatan kapal sewaktu datang, selama di pelabuhan, dan akan berangkat ke pelabuhan tujuan yang ditandatangani oleh pejabat kesehatan pelabuhan kemudian disahkan oleh pejabat dari Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebelum diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*).

Untuk melihat jumlah dokumen SSCEC/SSCC dan Buku Kesehatan yang diterbitkan sepanjang tahun 2023 sebagaimana pada grafik berikut :

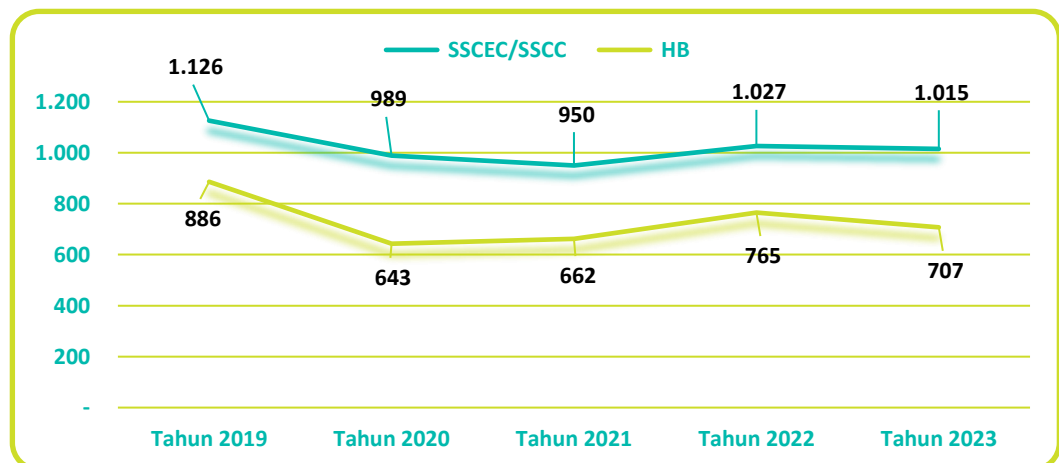


Grafik 3.18 Distribusi Penerbitan Dokumen Sscec/Sscc Dan Buku Kesehatan Tahun 2023

Berdasarkan grafik 3.18 di atas terlihat penerbitan dokumen SSCEC pada tahun 2023 adalah sebanyak 1.012 sertifikat dengan jumlah terbanyak diterbitkan pada wilayah induk yaitu sebanyak 359 dokumen dan paling kecil diterbitkan di Wilayah Kerja Panipahan sebanyak 34 sertifikat. Sedangkan

buku kesehatan yang diterbitkan pada tahun 2023 adalah sebanyak 707 buku kesehatan dengan jumlah terbanyak di wilayah Induk sebanyak 336 buku dan paling sedikit di Wilayah Kerja Panipahan dengan jumlah 21 buku kesehatan. Untuk SSCC yang diterbitkan pada tahun 2023 adalah sebanyak 3 sertifikat dengan jumlah terbanyak di wilayah Induk sebanyak 2 sertifikat dan wilayah kerja KID Pelintung sebanyak 1 sertifikat, sedangkan wilayah kerja yang lainnya tidak ada penerbitan sertifikat SSCC.

Jumlah dokumen SSCEC/SSCC dan Buku kesehatan yang diterbitkan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 3.19 Distribusi Penerbitan Dokumen Sscec/Sscc Dan Buku Kesehatan Tahun 2019 S/D 2023

Dari grafik 3.19 di atas dapat dilihat bahwa penerbitan sertifikat SSCEC/SSCC maupun dokumen Buku Kesehatan pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini sangat dipengaruhi dengan meningkatnya jumlah permintaan dari pihak kapal/ agen pelayaran yang belum memiliki dokumen, habis masa atau tidak berlaku, maupun perpanjangan masa berlaku dokumen.

b. Penerbitan Dokumen ICV (International Certificate of Vaccination)

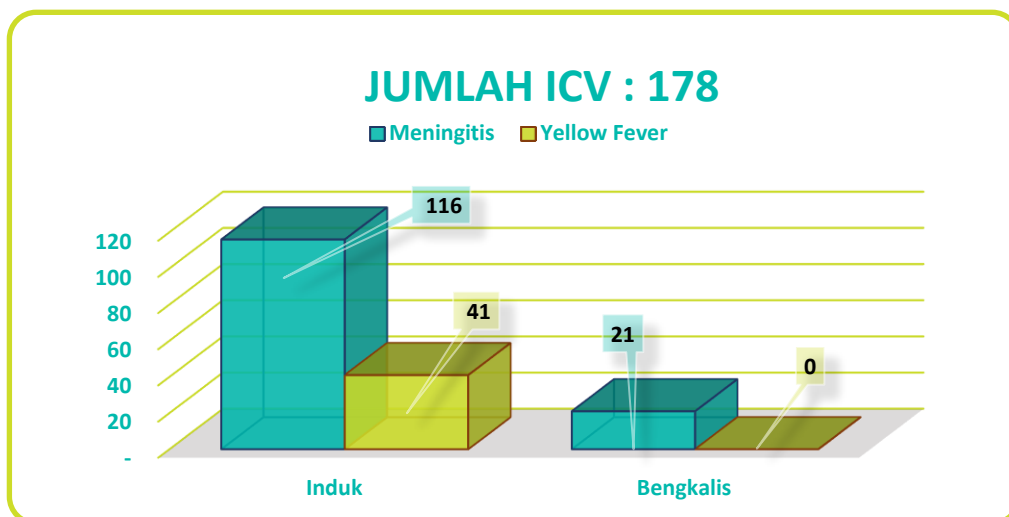
Vaksinasi internasional merupakan vaksinasi yang dipersyaratkan bagi pelaku perjalanan yang dipersyaratkan oleh suatu negara tertentu untuk dapat keluar masuk ke suatu negara atau wilayah. Vaksinasi tersebut diantaranya adalah Yellow Fever, Meningitis Meningokokal, dan Vaksinasi Polio. Vaksinasi Yellow Fever dipersyaratkan bagi pelaku perjalanan yang akan berkunjung ke daerah endemis yaitu negara-negara di wilayah Benua Afrika dan Amerika Selatan. Sedangkan Vaksinasi Meningitis Meningokokal dipersyaratkan bagi setiap pelaku perjalanan yang akan berkunjung ke negara Saudi Arabia.

Sedangkan Vaksinasi Polio dipersyaratkan bagi pelaku perjalanan yang akan masuk dan keluar ke wilayah/negara terjangkit Polio.



Gambar 3.5
Penerbitan Dokumen ICV

Pelayanan vaksinasi pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai Induk dilaksanakan oleh Substansi UK dan LW, sedangkan untuk pelayanan penerbitan buku ICV dilaksanakan oleh Substansi Pengendalian Karantina dan SE. Jumlah sertifikat ICV yang diterbitkan sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

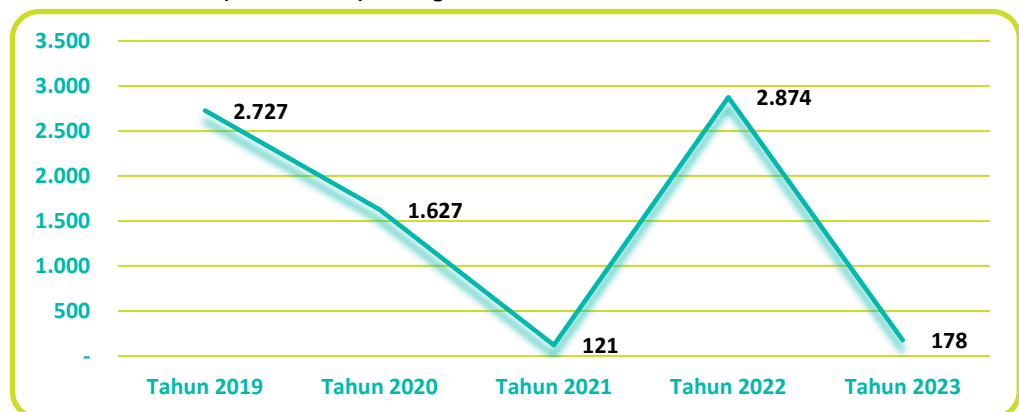


Grafik 3.20 Distribusi Penerbitan Dokumen Icv Tahun 2023

Berdasarkan grafik 3.20 di atas didapatkan bahwa jumlah ICV yang diterbitkan selama tahun 2023 adalah sebanyak 178 buku ICV dengan rincian sebanyak 137 buku ICV untuk vaksinasi Meningitis Meningokokus, 41 buku ICV untuk vaksinasi Yellow Fever.

Jumlah ICV yang diterbitkan paling tinggi yaitu di wilayah kerja induk sebanyak 157 buku ICV dan yang paling rendah di wilayah kerja bengkalis sebanyak 21 buku ICV, hal ini disebabkan wilayah kerja bengkalis hanya mengakomodir jamaah umroh yang berasal dari kabupaten kota bengkalis saja, sedangkan wilayah induk masih mengakomodir jamaah umroh yang berasal dari kota dumai, kabupaten rohil serta kabupaten bengkalis khususnya daerah kecamatan Mandau, kota duri dan pulau rupa.

Untuk melihat jumlah penerbitan ICV yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.21 Distribusi Penerbitan International Certificate Of Vaccination (ICV) Tahun 2019 S/D 2023

Berdasarkan grafik 3.21 terlihat bahwa pada tahun 2023 mulai terjadi penurunan jumlah penerbitan ICV jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena tidak diwajibkannya jamaah umroh ke Arab Saudi untuk melakukan vaksinasi terlebih dahulu sebelum keberangkatan ibadah umroh.

c. *Pengawasan Lalu Lintas jenazah (Jenazah/Abu Jenazah/Kerangka)*

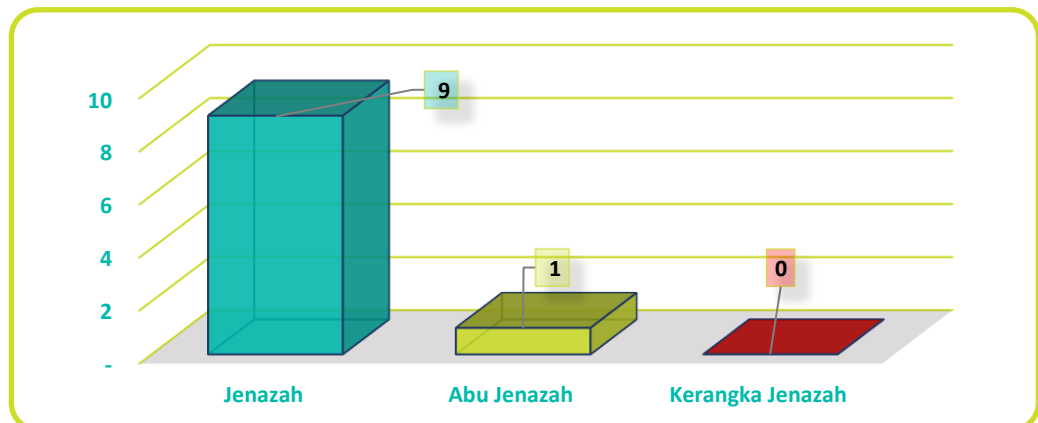
Jenazah/abu jenazah/kerangka yang datang atau berangkat melalui pintu masuk negara harus mengajukan izin angkut jenazah. Hal ini diperlukan sebagai bentuk kewaspadaan dini sebagai upaya mencegah adanya penularan penyakit yang bisa ditularkan melalui jenazah.



Gambar 3.6
Pengawasan Lalu Lintas Jenazah

Untuk mendapatkan surat izin angkut jenazah maka pihak keluarga/perwakilan harus melengkapi dokumen surat-surat yaitu surat keterangan dari RS/Dinas Kesehatan, surat keterangan pengawetan jenazah, surat keterangan dari krematorium (untuk abu mayat), surat keterangan pengepakan mayat/pemetian yang memenuhi syarat untuk alat angkut, dan surat keterangan dari kepolisian. Setelah semua dokumen dilengkapi dan penanganan jenazah telah sesuai dengan ketentuan maka jenazah diperbolehkan untuk diangkut dengan menerbitkan surat izin angkut jenazah oleh kantor kesehatan pelabuhan.

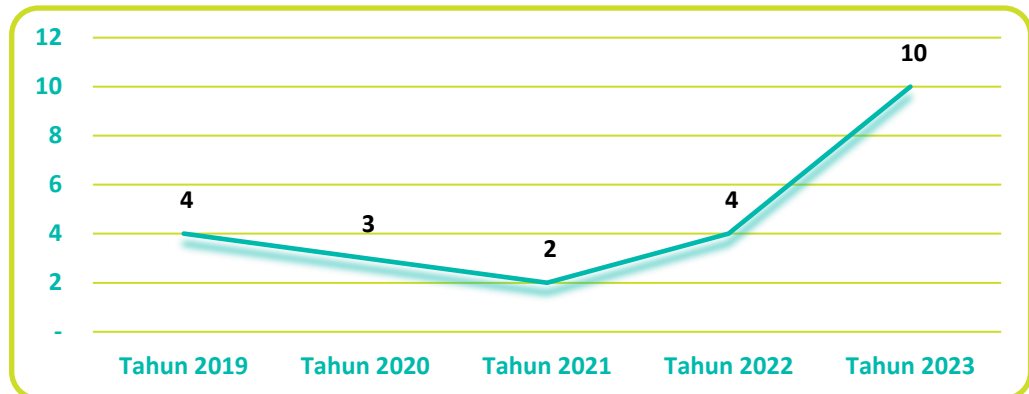
Pada tahun 2023 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai telah melakukan pengawasan dan penerbitan surat angkut jenazah sebagai berikut:



Grafik 3.22 Distribusi Pengawasan Lalu Lintas Jenazah Tahun 2023

Berdasarkan grafik 3.22 di atas terlihat bahwa pada tahun 2023 dilakukan kegiatan pengawasan lalu lintas jenazah sebanyak 10 kegiatan dengan penerbitan dokumen izin angkut jenazah. Hasil pemeriksaan dari 9 jenazah dan 1 Abu jenazah menunjukkan bahwa penyebab kematian bukan disebabkan oleh Bukan Penyakit Menular. Surat izin angkut jenazah diterbitkan

setelah semua persyaratan dokumen dan persyaratan pemetian telah memenuhi sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dan diawasi oleh petugas KKP Kelas II Dumai.



Grafik 3.23 Distribusi Pengawasan Lalu Lintas Jenazah Tahun 2019 S/D 2023

Dilihat dari grafik di atas terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir kegiatan pengawasan lalu lintas jenazah berkisar antara 1 sampai dengan 10 kegiatan per tahun.

d. *Pengawasan Lalu Lintas Obat Makanan Kosmetika Alat Kesehatan dan Bahan Adiktif (OMKABA)*

Obat Makanan Kosmetika Alat Kesehatan dan Bahan Adiktif (OMKABA) yang masuk atau keluar melalui pintu masuk negara harus mengajukan izin permohonan *health certificate* OMKABA. Hal ini diperlukan sebagai bentuk kewaspadaan dini sebagai upaya mencegah adanya penularan penyakit yang bisa ditularkan melalui OMKABA.

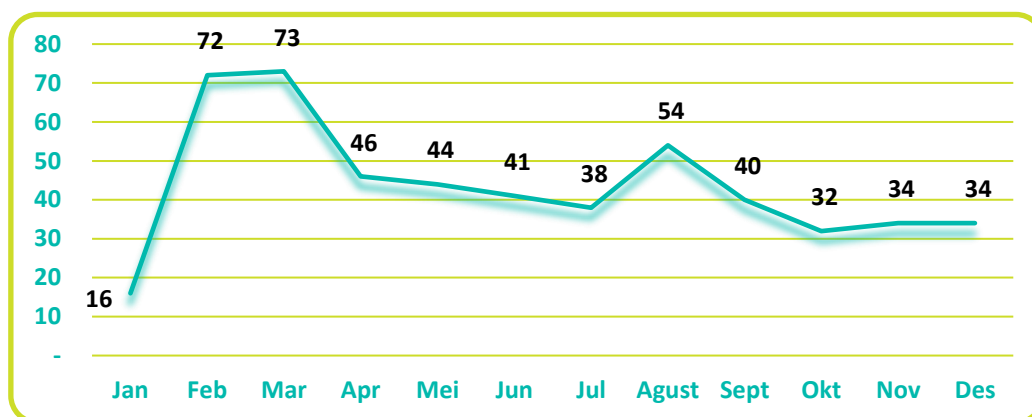
Untuk mendapatkan surat izin *health certificate* OMKABA maka pihak . Agent/eksportir/pemohon harus melengkapi dokumen surat-surat yaitu:

1. COA (*Certificate Of Analysis*) yang dikeluarkan oleh laboratorium yang terakreditasi (SNI).
2. *Invoice* (surat keterangan barang yang berisi jenis barang, jumlah barang dan harga barang).
3. PEB (pemberitahuan ekspor barang) yaitu surat keterangan barang yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea & Cukai yang berisi nama barang, nama kapal, pelabuhan tujuan, jumlah barang, harga barang dan pajak ekspor.
4. *Ocean Bill of Loading*.
5. Surat pernyataan penggunaan barang.
6. Surat kuasa dari eksportir kepada agent yang ditunjuk untuk mengurus perijinan ekspor barang (dikuasakan pihak ke tiga) yang dibubuhi materai secukupnya.

7. Nomor registrasi dari Departemen Kesehatan atau Badan POM jika produk tersebut telah dipasarkan di dalam negeri dan telah diolah.

Setelah semua dokumen dilengkapi dan penanganan OMKABA telah sesuai dengan ketentuan maka OMKABA diperbolehkan untuk diangkut dengan menerbitkan surat izin *health certificate* OMKABA oleh kantor kesehatan pelabuhan.

Pada tahun 2023 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai telah melakukan pengawasan dan penerbitan surat izin *health certificate* OMKABA sebagai berikut :



Grafik 3.24 Distribusi Pengawasan Dan Penerbitan Surat Izin *Health Certificate* Omkaba Tahun 2023

Berdasarkan grafik 3.24 di atas terlihat bahwa pada tahun 2023 dilakukan kegiatan pengawasan dan penerbitan surat izin *health certificate* OMKABA sebanyak 521 *health certificate* sedangkan 3 dokumen diterbitkan dari hasil pemeriksaan sampel makanan ke BBPOM Pekanbaru. Surat izin *health certificate* OMKABA diterbitkan setelah semua persyaratan dokumen dan persyaratan telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dan diawasi oleh petugas KKP Kelas II Dumai.



Gambar 3.7 Sampel dan *Health Certificate* OMKABA



Kegiatan pengawasan OMKABA pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai tahun 2023 terdapat laporan disebabkan :

- a. Adanya anggaran biaya pengambilan dan pemeriksaan sampel yang pada tahun 2023 untuk pemeriksaan sampel makanan yang dikirim antar wilayah di Wilayah Kerja KKP Kelas II Dumai sebanyak 3 sampel .
- b. Adanya penerbitan *Health Certificate (HC)* pada tahun 2023 karena adanya permintaan dari Agent/eksportir/pemohon sebanyak 521 sertifikat dimana dokumen *Health Certificate (HC)* yang diberikan berupa surat keterangan atau dokumen yang berasal dari aplikasi SINKARKES.
- c. Wilayah kerja yang memberikan *Health Certificate (HC)* yaitu wilayah kerja Induk.

3. Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi

Surveilans atau pengamatan penyakit adalah pengamatan terus menerus dan sistematis terhadap kesakitan dan kematian, penyebaran penyakit serta kejadian atau kondisi yang memperbesar risiko penyebaran penyakit untuk dapat mengambil suatu tindakan. Kegiatan yang dilaksanakan bertujuan supaya tersedianya data dan informasi epidemiologi secara berkesinambungan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan pencegahan penularan penyakit menular, potensial KLB, dan masalah kesehatan yang dapat menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) di pintu masuk negara.

Sasaran dari pelaksanaan surveilans epidemiologi adalah awak alat angkut, penumpang, pekerja di lingkungan pelabuhan, serta masyarakat yang ada di sekitar pelabuhan, sebagaimana uraian berikut :

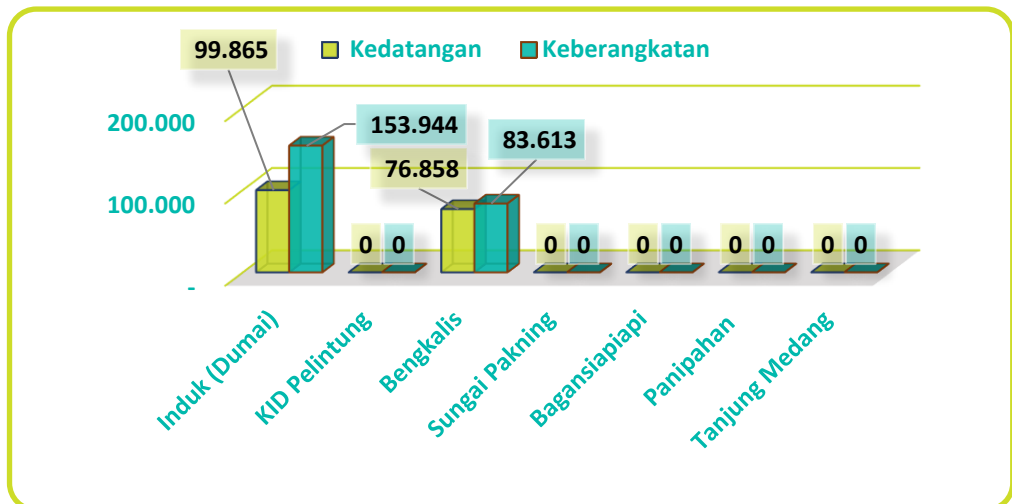
- a. Pengawasan Lalu Lintas Penumpang Kapal/Pesawat, Anak Buah Kapal (ABK) dan Kru Pesawat

1. Pengawasan/Pemeriksaan Penumpang Kapal

Penumpang kapal meliputi orang yang diantar dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan merupakan faktor risiko yang paling rentan untuk terjadinya suatu penularan penyakit menular potensial wabah antar wilayah maupun antar negara, maka sangat perlu dilakukan pengawasan/pemeriksaan.

Pengawasan/pemeriksaan dapat dilakukan melalui pengamatan secara langsung, pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan kesehatan, wawancara, dan lain-lain.

Jumlah penumpang kapal dari/ke luar negeri yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan pada tahun 2023 adalah pada grafik berikut :



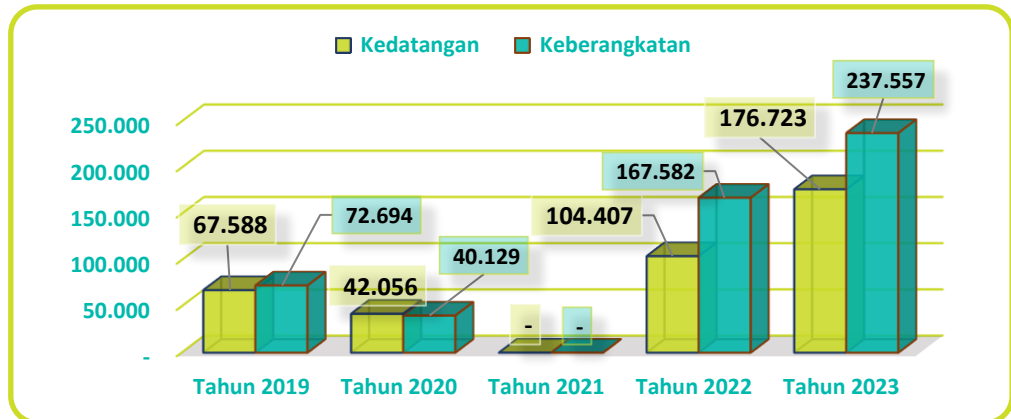
Grafik 3.25 Distribusi Pengawasan Kedatangan Dan Keberangkatan Penumpang Kapal Dari / Ke Luar Negeri Tahun 2023

Dari grafik 3.25 di atas terlihat bahwa kedatangan dan keberangkatan penumpang luar negeri tetap dilakukan pengawasan/pemeriksaan oleh KKP Kelas II Dumai walaupun status covid-19 dinyatakan telah berakhir.



Gambar 3.8 Pengawasan Lalu Lintas Kedatangan dan Keberangkatan Penumpang Luar Negeri

Jumlah penumpang kapal yang datang dan berangkat dari/ke luar negeri yang dilakukan pengawasan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

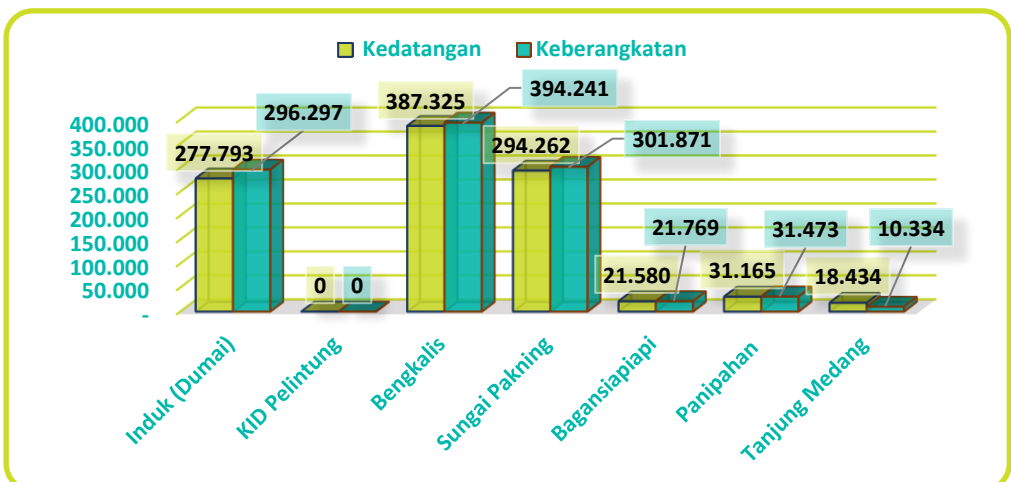


Grafik 3.26 Distribusi Pengawasan / Pemeriksaan Penumpang Kapal Dari/Ke Luar Negeri Tahun 2019 S/D 2023

Dilihat dari grafik di atas jumlah penumpang yang datang maupun yang berangkat dari/ke pelabuhan luar negeri yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan pada tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan. Hal ini disebabkan dampak dari berakhirnya pandemi COVID-19 sehingga terjadi penambahan jumlah penumpang internasional dari/ke luar negeri baik Pelabuhan Dumai maupun Pelabuhan Bengkalis.

Hasil Pengawasan/pemeriksaan terhadap penumpang kapal dari/ke luar negeri sepanjang tahun 2023 yang telah dilakukan tidak ada ditemukan penumpang yang memiliki indikasi terinfeksi atau terdeteksi penyakit menular.

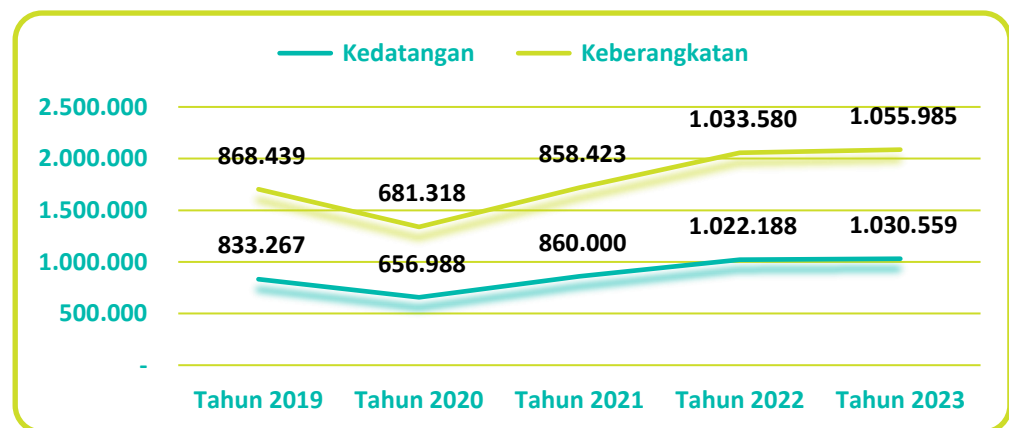
Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan penumpang kapal dari/ke dalam negeri pada tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3.27 Distribusi Pengawasan / Pemeriksaan Penumpang Kapal Dari/Ke Dalam Negeri Tahun 2023

Dari Grafik 3.27 terlihat bahwa jumlah kedatangan penumpang kapal datang yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan adalah sebanyak 1.030.559 orang, dengan jumlah terbanyak masuk melalui pelabuhan di Wilayah Kerja Bengkalis sebanyak 387.325 orang dan paling sedikit di Wilayah Kerja Tanjung Medang yaitu sebanyak 18.434 orang. Sedangkan keberangkatan penumpang ke dalam negeri adalah sebanyak 1.055.985 orang dengan jumlah terbanyak juga melalui pelabuhan Bengkalis sebanyak 394.421 orang dan jumlah terkecil melalui Wilayah Kerja Tanjung Medang sebanyak 10.334 orang.

Untuk melihat jumlah penumpang kapal yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan baik datang maupun berangkat dari/ke luar negeri selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 3.28 Distribusi Pengawasan / Pemeriksaan Penumpang Kapal Dari/Ke Pelabuhan Dalam Negeri Tahun 2019 S/D 2023

Berdasarkan grafik 3.28 terlihat bahwa jumlah penumpang kapal yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan, baik yang datang maupun berangkat dari/ke dalam negeri tahun 2023 sudah mulai mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan bertambahnya aktivitas dan penumpang kapal cepat yang datang dan berangkat melalui Pelabuhan Dumai dan Bengkalis sebagai dampak berakhirnya COVID-19.



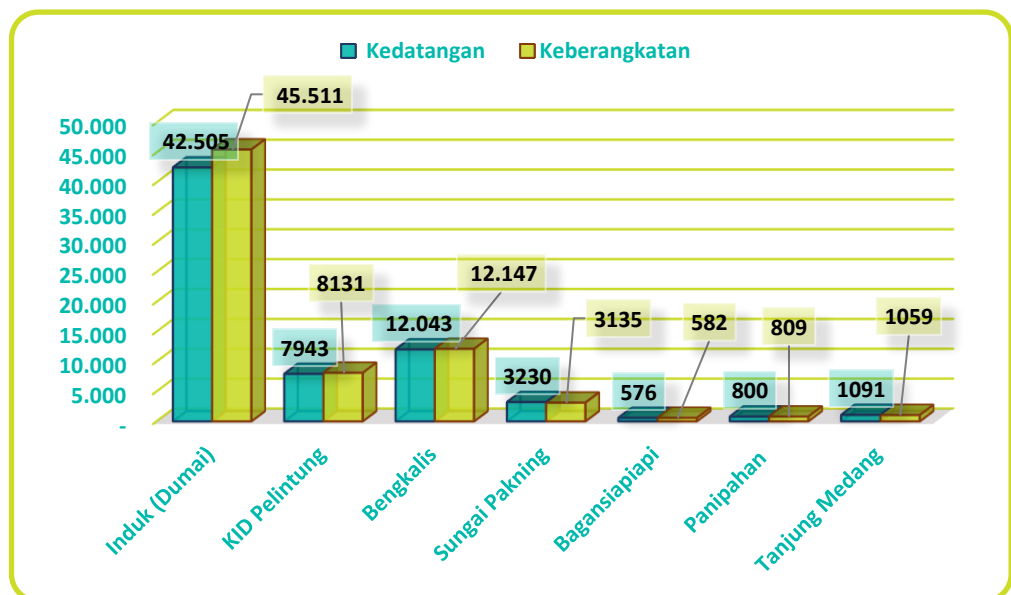
Gambar 3.9 Pengawasan Lalu Lintas Kedatangan dan Keberangkatan Penumpang Dalam Negeri

Hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan pada tahun 2023 tidak ditemukan adanya penumpang dengan indikasi penyakit yang berpotensi dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat baik yang datang maupun yang akan berangkat.

2. Pengawasan Anak Buah Kapal (ABK)

Anak Buah Kapal (ABK) merupakan faktor risiko yang paling rentan untuk terjadinya suatu penularan penyakit menular potensial wabah antar wilayah maupun antar negara, maka sangat perlu dilakukan pengawasan / pemeriksaan. Pengawasan dan pemeriksaan Anak Buah Kapal dilakukan secara langsung pada saat pemeriksaan kapal baik yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri.

Untuk melihat pengawasan Anak Buah Kapal (ABK) yang datang dan berangkat dari/ke pelabuhan luar negeri pada tahun 2023 adalah pada grafik berikut :



Grafik 3.29
Distribusi Pengawasan/Pemeriksaan Anak Buah Kapal (ABK) Dari/Ke Luar Negeri Tahun 2023

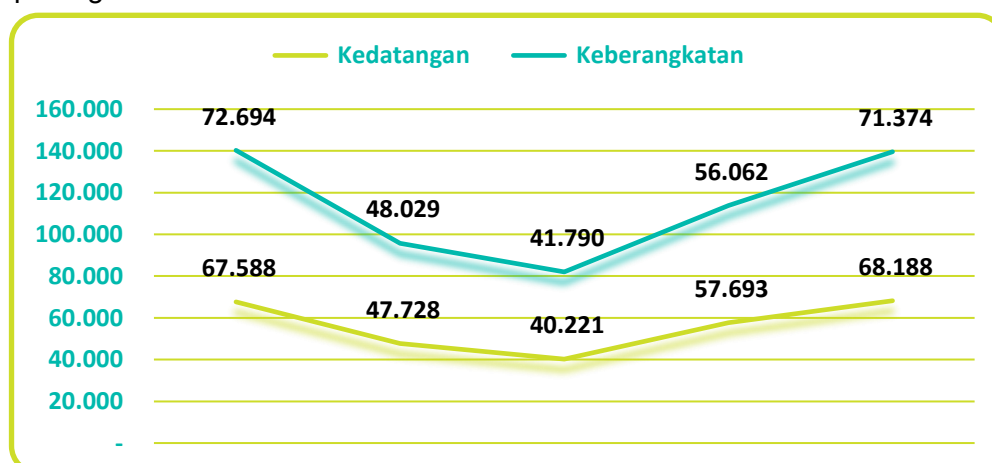
Berdasarkan Grafik 3.29 didapatkan bahwa total kedatangan ABK yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan adalah sebanyak 68.188 orang dengan jumlah terbanyak pada wilayah induk yaitu sebanyak 42.505 orang dan jumlah paling kecil pada Wilayah Kerja Bagan Siapiapi yaitu sebanyak 576 orang. Sedangkan jumlah keberangkatan ABK ke luar negeri sebanyak 71.374 orang dengan jumlah terbesar juga di wilayah induk sebanyak 45.511 orang dan jumlah terkecil di Wilayah Kerja Bagan Siapiapi sebanyak 582 orang.



Gambar 3.10 Pengawasan/Pemeriksaan Anak Buah Kapal (ABK)

Hasil pengawasan/pemeriksaan terhadap kedatangan dan keberangkatan ABK dari/ke luar negeri selama tahun 2023 adalah tidak ditemukan adanya ditemukan ABK Kapal dengan indikasi penyakit yang berpotensi dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

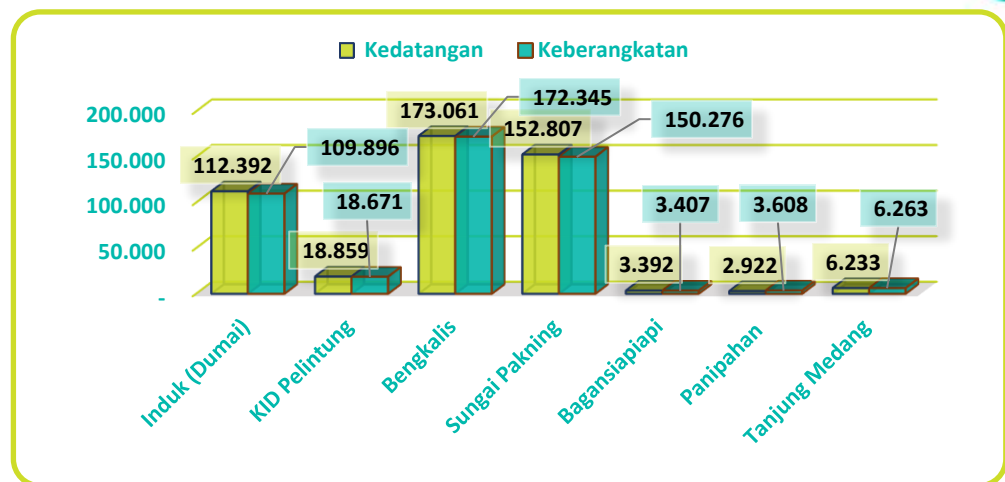
Jumlah ABK datang/berangkat dari/ke pelabuhan luar negeri yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 3.30 Distribusi Pengawasan / Pemeriksaan Anak Buah Kapal (Abk) Dari / Keluar Negeri Tahun 2019 S/D 2023

Berdasarkan Grafik di atas terlihat bahwa jumlah ABK kapal yang datang dan berangkat dari/ke pelabuhan luar negeri pada tahun 2023 mulai mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan kembali beraktivitasnya kapal cepat dari Pelabuhan Dumai/Bengkalis ke Malaysia setelah covid-19 dinyatakan telah berakhir.

Sedangkan pengawasan/pemeriksaan terhadap Anak Buah Kapal dari/ke pelabuhan dalam negeri pada tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

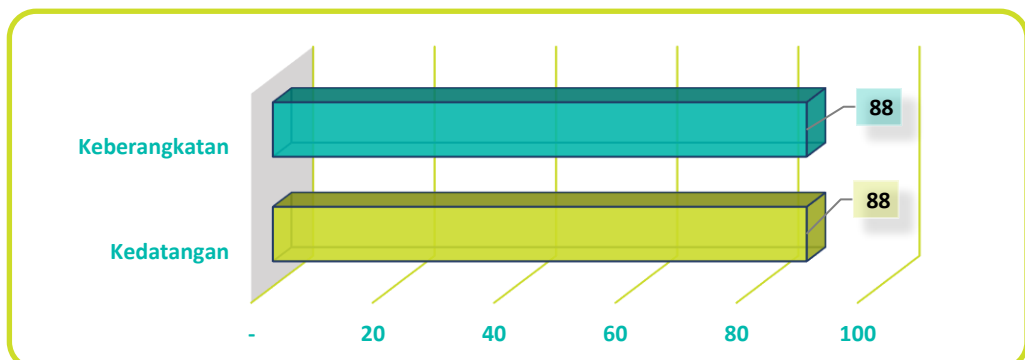


Grafik 3.31 Distribusi Pengawasan / Pemeriksaan Anak Buah Kapal (Abk) Dari / Ke Dalam Negeri Tahun 2023

Berdasarkan grafik 3.31 di atas terlihat bahwa jumlah ABK dalam negeri yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan pada tahun 2023 adalah sebanyak 469.666 orang kedatangan dan sebanyak 464.466 orang keberangkatan. Jumlah keberangkatan dan kedatangan terbanyak pada Wilayah kerja Bengkalis yaitu 173.061 kedatangan dan 172.345 keberangkatan. Sedangkan jumlah paling kecil adalah di wilayah kerja Panipahan yaitu 2.922 orang datang dan Wilker Bagan siapiapi yaitu 3.407 orang berangkat.

3. Pengawasan Lalu Lintas Penumpang Pesawat

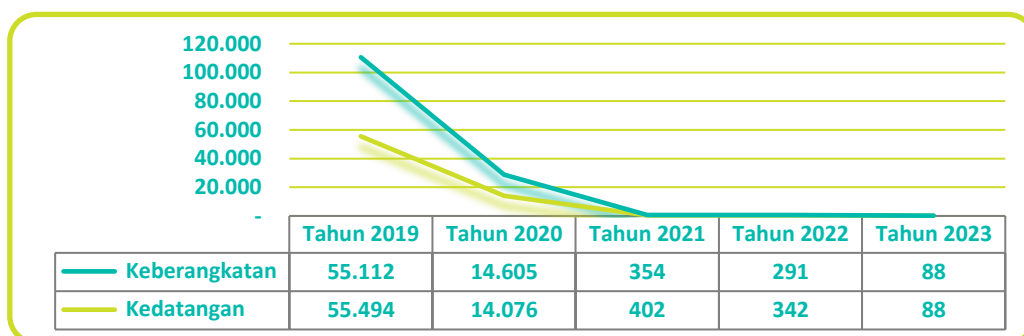
Kegiatan pengawasan/pemeriksaan lalu lintas penumpang pesawat pada Bandara Pinang Kampai Dumai tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 3.32 Distribusi Pengawasan/Pemeriksaan Kedatangan Dan Keberangkatan Penumpang Pesawat Tahun 2023

Berdasarkan Grafik 3.32 terlihat bahwa jumlah penumpang pesawat datang yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan adalah sebanyak 88 orang dan penumpang pesawat yang berangkat adalah sebanyak 88 orang. Hasil pengawasan yang dilakukan pengawasan tidak ditemukan adanya penumpang pesawat yang terindikasi penyakit KKM.

Jumlah penumpang pesawat yang dilakukan pengawasan / pemeriksaan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

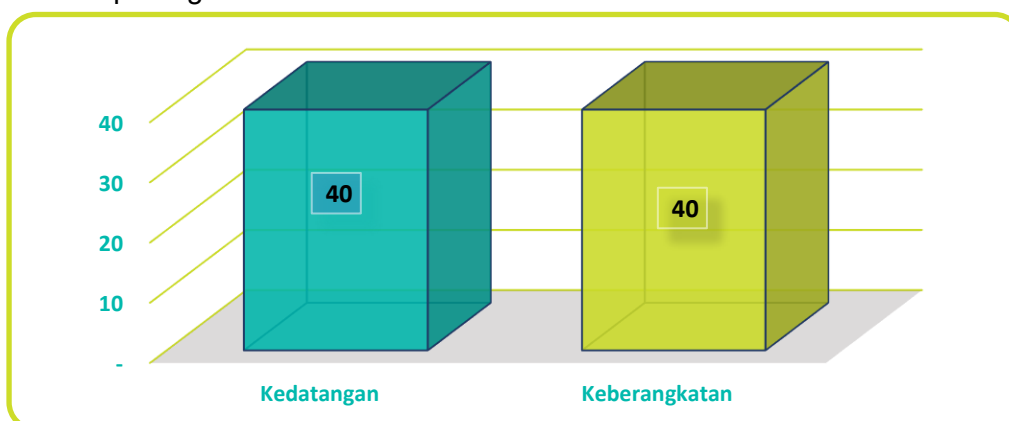


Grafik 3.33 Distribusi Pengawasan / Pemeriksaan Kedatangan Dan Keberangkatan Penumpang Pesawat Tahun 2019 S/D 2023

Dari Grafik 3.33 terlihat bahwa pada tahun 2023 pengawasan/pemeriksaan kedatangan dan keberangkatan terhadap penumpang pesawat terjadi penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya surat pemberitahuan dari dinas perhubungan kota Dumai yang menyatakan bahwa bandara pinang kampai tidak beroperasi sampai dengan waktu yang tidak dapat ditentukan.

4. Pengawasan/Pemeriksaan Kru Pesawat

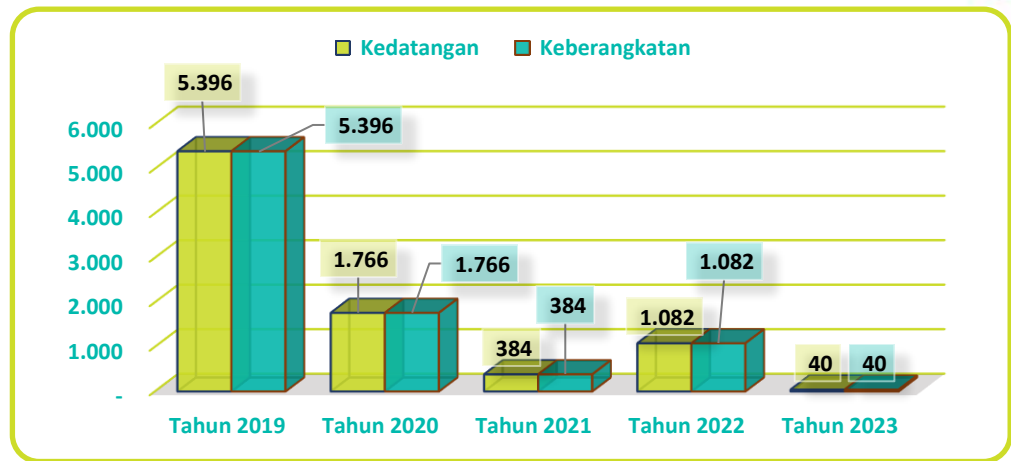
Untuk melihat jumlah kru pesawat yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan di Bandara Pinang Kampai pada tahun 2022 adalah pada grafik berikut :



Grafik 3.34 Distribusi Pengawasan / Pemeriksaan Kedatangan Dan Keberangkatan Kru Pesawat Tahun 2023

Berdasarkan grafik 3.34 jumlah kru pesawat yang dilakukan pengawasan/ pemeriksaan pada tahun 2022 adalah sebanyak 80 orang baik datang maupun berangkat. Hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya kru pesawat terindikasi penyakit KKMD.

Jumlah kru pesawat yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 3.35 Distribusi Pengawasan / Pemeriksaan Kedatangan Dan Keberangkatan Kru Pesawat Tahun 2019 S/D 2023

Berdasarkan grafik 3.35 di atas terlihat bahwa kru pesawat yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan terjadi penurunan yang sangat signifikan sekali pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena adanya surat pemberitahuan dari dinas perhubungan kota Dumai yang menyatakan bahwa bandara pinang kampai tidak beroperasi sampai dengan waktu yang tidak dapat ditentukan.

b. Surveilans Epidemiologi pada Sarana Pelayanan Kesehatan Poliklinik Non KKP

1. *Surveilans Penyakit Menular*

Surveilans atau pengumpulan data penyakit menular pada sarana pelayanan kesehatan di wilayah kerja KKP Kelas II Dumai bertujuan agar tersedianya data sebagai upaya kewaspadaan dini terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) di wilayah pelabuhan/bandara.

Untuk melihat data penyakit menular yang diperoleh pada seluruh wilayah kerja KKP Kelas II Dumai selama satu tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Distribusi Frekuensi Surveilans Penyakit Menular Pada Sarana Layanan Kesehatan Non Poliklinik Kkp Tahun 2023

No	Wilayah Kerja	Jenis Penyakit					
		Peny. Karantina /KKMD	Malaria	Demam Berdarah	TBC	Diare	ISPA
1	Induk (Dumai)	0	0	0	0	0	0
2	KID Pelintung	0	0	0	4	43	726
3	Bengkalis	0	0	1	13	214	1658
4	Sungai Pakning	0	0	0	0	81	2378
5	Bagansiapiapi	0	56	40	42	451	1644
6	Panipahan	0	980	0	51	100	294
7	Tanjung Medang	0	0	0	8	133	2160
8	Bdr. Pinang Kampai	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	1036	41	118	1022	8860
No	Wilayah Kerja	Jenis Penyakit					
		HIV/AIDS	Campak	Polio	Difteri	Pertusis	Tetanus
1	Induk (Dumai)	0	0	0	0	0	0
2	KID Pelintung	0	0	0	0	0	0
3	Bengkalis	0	2	0	0	0	0
4	Sungai Pakning	0	0	0	0	0	0
5	Bagansiapiapi	0	0	0	0	0	0
6	Panipahan	0	2	0	0	0	0
7	Tanjung Medang	0	0	0	0	0	0
8	Bdr. Pinang Kampai	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	4	0	0	0



No	Wilayah Kerja	Jenis Penyakit		Jumlah
		Hepatitis	Lain-lain	
1	Induk (Dumai)	0	0	0
2	KID Pelintung	77	0	850
3	Bengkalis	5	26	1919
4	Sungai Pakning	0	0	2459
5	Bagansiapiapi	0	0	2233
6	Panipahan	0	0	1427
7	Tanjung Medang	0	0	2301
8	Bdr. Pinang Kampai	0	0	0
Jumlah		82	26	11189

Berdasarkan tabel 3.7 didapatkan hasil pengumpulan data penyakit menular selama tahun 2023 tidak adanya ditemukan adanya kasus kejadian penyakit karantina/ KKMD. Penyakit terbanyak pada setiap wilayah kerja pada umumnya adalah ISPA sebanyak 8.860 kemudian Malaria sebanyak 1.036 selanjutnya Diare sebanyak 1.022 kasus.

2. *Surveilans Penyakit Tidak Menular*

Sementara untuk distribusi penyakit tidak menular yang dapat di pantau dari sarana pelayanan kesehatan non poliklinik KKP Kelas II Dumai pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Distribusi Frekuensi Surveilans Penyakit Tidak Menular Pada Sarana Layanan Kesehatan Non Poliklinik Kkp Tahun 2023

No	Wilayah Kerja	Jenis Penyakit				Jumlah
		Jantung	Hipertensi	Akibat Kec. Kerja	Lain-lain	
1	Induk (Dumai)	36	230	0	173	439
2	KID Pelintung	37	227	0	0	264
3	Bengkalis	0	0	0	0	0
4	Sungai Pakning	0	622	0	2441	3063
5	Bagansiapiapi	36	5909	5	2504	8454
6	Panipahan	10	3273	71	180	3534
7	Tanjung Medang	0	969	0	1120	2089
8	Bdr. Pinang Kampai	0	134	0	86	220
Jumlah		119	11364	76	6504	18063

Dilihat dari tabel 3.8 di atas terlihat bahwa kejadian penyakit tidak menular terbanyak secara berturut dari yang tertinggi sampai yang terendah yaitu lain -lain sebanyak 6.504, Hipertensi sebanyak 11.364 kasus, penyakit jantung sebanyak 119 kasus dan penyakit Akibat Kecelakaan Kerja sebanyak 76 kasus.

4. Pelaksanaan Jejaring Kerja dan Kemitraan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik lintas program maupun lintas sektoral. Berkenaan dengan hal tersebut Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai selalu melakukan koordinasi dan kemitraan kegiatan pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi dengan instansi terkait antara lain :

- a. Kegiatan pengendalian kekarantinaan/pengawasan alat angkut (kapal dan pesawat) dilakukan koodinasi dan jejaring kerja dengan kantor KSOP, Imigrasi, Kantor Bea dan Cukai, TNI/POLRI, BASARNAS, Pengelola Pelabuhan/Bandara, Pemilik Kapal, Organisasi Perusahaan Pelayaran (INSA/ISAA), Perusahaan Keagenan Pelayaran, otoritas Bandara dan Maskapai Penerbangan.



Gambar 3.11

Rapat Bersama Lintas Program/Lintas Sektor Kegiatan Kekarantinaan

- b. Jejaring kerja dan kemitraan pelaksanaan kegiatan surveilans epidemiologi serta pengendalian penyakit dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan unit layanan Kesehatan lainnya di wilayah kerja pelabuhan/bandara.



C. SUBSTANSI PENGENDALIAN RESIKO LINGKUNGAN

Pada kurun waktu tahun 2023 telah dilakukan berbagai kegiatan dan upaya dalam mendukung program pencegahan dan pengendalian penyakit, kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit dapat dicerminkan dari kinerja tiap kegiatan di dalamnya dalam mencapai target indikator yang telah ditetapkan. Uraian berikut akan menjelaskan pencapaian tujuan dan sasaran setiap kegiatan Substansi PRL dalam lingkup program pencegahan dan pengendalian penyakit.

1. Layanan Pengendalian Risiko Lingkungan

Bandar Udara maupun Pelabuhan merupakan titik simpul pertemuan atau aktifitas keluar masuk kapal, barang dan orang, sekaligus sebagai pintu gerbang transformasi penyebaran penyakit. Merupakan ancaman global terhadap kesehatan masyarakat karena adanya penyakit karantina, penyakit menular baru (new emerging diseases), maupun penyakit menular lama yang timbul kembali (re-emerging diseases). Ancaman penyakit tersebut merupakan dampak negatif dari diberlakukannya pasar bebas atau era globalisasi, dan dapat menimbulkan kerugian besar baik pada sektor ekonomi, perdagangan, sosial budaya, maupun politik yang berdampak besar kepada suatu negara atau daerah. Pengelolaan sanitasi lingkungan pelabuhan merupakan kegiatan untuk menciptakan lingkungan di wilayah pelabuhan sesuai standar, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kegiatan sanitasi lingkungan (environmental sanitation) adalah upaya pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia yang mungkin menimbulkan atau dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi perkembangan fisik, kesehatan dan daya tahan hidup manusia berkaitan dengan pengelolaan sanitasi yang baik.

Kantor Kesehatan Pelabuhan dituntut untuk mampu menangkal risiko kesehatan yang mungkin masuk melalui orang, alat angkut dan barang termasuk kontainer dari negara lain dengan melakukan tindakan tanpa menghambat perjalanan dan perdagangan. Kegiatan pengendalian risiko lingkungan, merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh KKP dalam rangka menangkal dan mencegah penyebaran faktor risiko kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan di KKP kelas II Dumai di bagian sanitasi lingkungan meliputi, Pengawasan sanitasi alat angkut, Pengawasan Pembuangan Limbah/Sampah, Pengawasan Kualitas Udara, Pengawasan Penyediaan air bersih, pengawasan sanitasi gedung dan bangunan umum, pengawasan hygiene sanitasi makanan di pelabuhan yang merupakan upaya-upaya penyehatan lingkungan dalam mencegah penyebaran penyakit karantina dan penyakit potensial wabah melalui pengawasan dan perbaikan sarana

kesehatan. Sehingga kegiatan yang dilakukan dapat dinilai dan dipertanggungjawabkan.

a. Pengawasan Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan

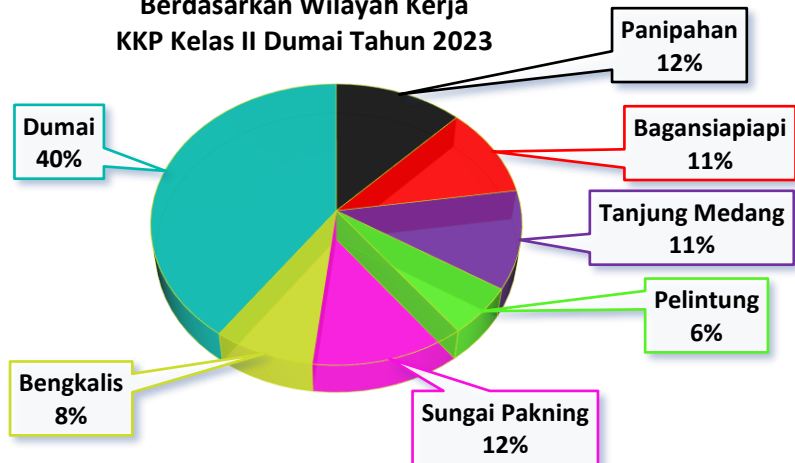
Inspeksi sanitasi terhadap Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dilakukan di delapan pelabuhan. Kegiatan dilakukan dengan observasi dan pemeriksaan kualitas lingkungan pada TPM seperti pemeriksaan sampel makanan dengan *test kit* dan observasi penjamah makanan. Kegiatan ini fokus pada TPM yang berada di wilayah perimeter pelabuhan. Pada tahun 2023 volume kegiatan sebanyak 54 layanan inspeksi TPM telah dilaksanakan dengan uraian pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.9 Distribusi Pengawasan Sanitasi TPM Tahun 2023

No	Wilker	Gol. TPM			Kon. Sanitasi		JML	Jumlah Karyawan					JML
		A1	A2	B	MS	TMS		S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Panipahan	-	52	-	52	-	52	-	-	25	35	35	89
2	Bagansiapiapi	44	-	-	44	-	44	-	-	52	6	24	82
3	Tanjung Medang	48	-	-	48	-	48	-	-	36	48	12	96
4	Pinang Kampai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pelintung	-	24	-	24	-	24	-	19	163	5	-	187
6	Sungai Pakning	-	52	-	51	1	52	-	8	57	15	10	89
7	Bengkalis	34	-	-	-	34	34	-	-	19	7	8	34
8	Dumai	130	39	-	167	3	170	21	-	222	27	39	310
Jumlah		256	167	-	386	38	424	21	27	574	143	122	887

Pada tahun 2023 jumlah TPM yang diawasi oleh KKP Kelas II Dumai berjumlah 424 TPM termasuk juga di wilayah kerja KKP Kelas II Dumai. Distribusinya dapat dilihat pada grafik berikut ini

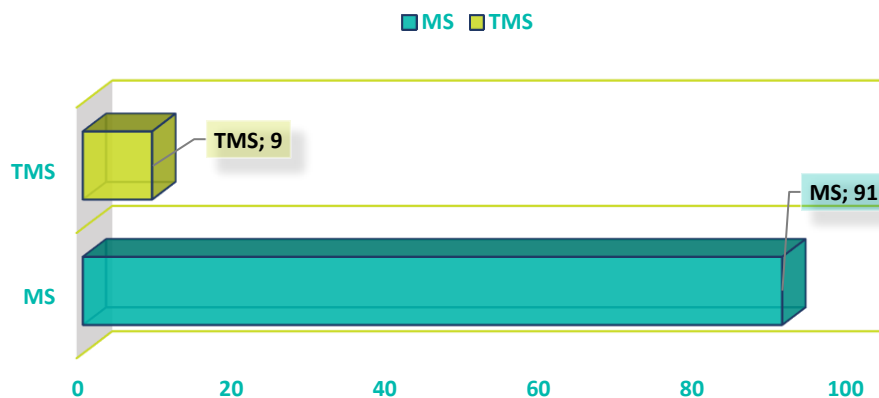
Grafik 3.36
Distribusi Pengawasan Sanitasi TPM
Berdasarkan Wilayah Kerja
KKP Kelas II Dumai Tahun 2023



Berdasarkan Grafik 3.36 distribusi pengawasan sanitasi TPM diketahui bahwa pengawasan sanitasi/IKL TPM paling banyak dilakukan di Pelabuhan Dumai yaitu sebesar 40% dari total TPM yang diperiksa dan diawasi.

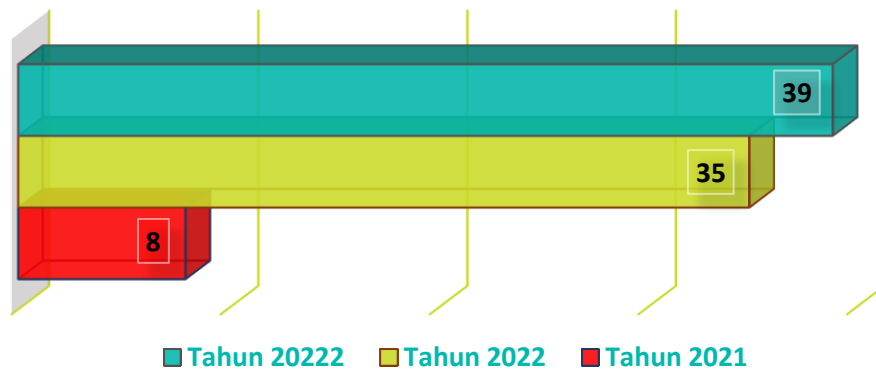
Untuk kategori kondisi sanitasi TPM yang diperiksa dapat dilihat pada grafik dibawah ini ;

Grafik3.37
Jumlah TPM Yang Diperiksa Berdasarkan Kategori Sanitasi Pada
KKP Kelas II Dumai Tahun 2023



Berdasarkan Grafik 3.37 Jumlah TPM diketahui bahwa sebanyak 91% TPM dengan kategori memenuhi syarat sanitasi dan 9% TPM dengan kategori tidak memenuhi syarat sanitasi.

Grafik 3.38
Perbandingan Faktor Risiko TPM Yang Dikendalikan
Dalam 3 Tahun Terakhir



Berdasarkan Grafik 3.38 Perbandingan Faktor Resiko TPM diketahui bahwa jumlah TPM dengan faktor risiko pada tahun 2023 sebanyak 39 kali pengendalian TPM. Ada kenaikan yang cukup signifikan dalam pengendalian faktor risiko pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 dengan kenaikan sebanyak 4 kegiatan pengendalian.

b. Pengawasan Sanitasi Gedung/Bangunan

Pengawasan hygiene gedung dan bangunan umum di pelabuhan merupakan salah satu upaya penyehatan lingkungan dalam mencegah penyebaran penyakit karantina dan penyakit potensial wabah melalui pengawasan dan perbaikan sarana kesehatan di perkantoran dan industri serta tempat-tempat umum lainnya.

Pengamatan hygiene sanitasi gedung dan bangunan umum di Bandar udara maupun pelabuhan adalah pengawasan terhadap kondisi dari komponen atau bagian-bagian bangunan serta fasilitas pendukungnya yang ada di Bandar udara/ pelabuhan laut dari kemungkinan timbulnya masalah kesehatan. Ruang lingkup dari pengawasan hygiene gedung/bangunan umum di Bandar udara/pelabuhan laut meliputi kondisi fisik bangunan gedung dan halaman, penanganan sampah, sarana pembuangan air limbah, vektor dan perilakunya.

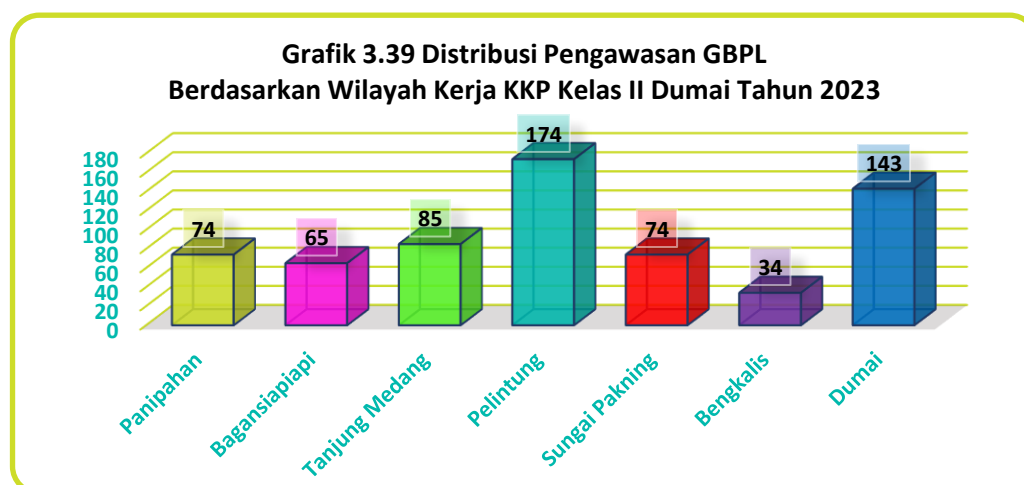
Pengamatan Hygiene sanitasi bangunan di pelabuhan Dumai menggunakan formulir pemeriksaan sesuai SOP, hanya untuk memudahkan fokus dalam pengamatan, hasil pengamatan dibagi dalam 3 bagian yaitu bagian luar bangunan, bagian dalam bangunan dan perilaku karyawan. Untuk perilaku karyawan di dapat dari hasil wawancara dengan pengelola bangunan.

Inspeksi sanitasi terhadap Tempat-Tempat Umum (TTU) dilakukan di delapan pelabuhan. Kegiatan dilakukan dengan observasi dan pemeriksaan kualitas lingkungan pada TTU. Kegiatan ini fokus pada gedung, bangunan dan lingkungan yang berada di wilayah perimeter pelabuhan. Pada tahun 2023 volume kegiatan sebanyak 54 layanan inspeksi TTU telah dilaksanakan dengan uraian pada grafik dibawah ini.

Tabel 3.10
Distribusi Pengawasan Sanitasi TTU KKP Kelas II Dumai Tahun 2023

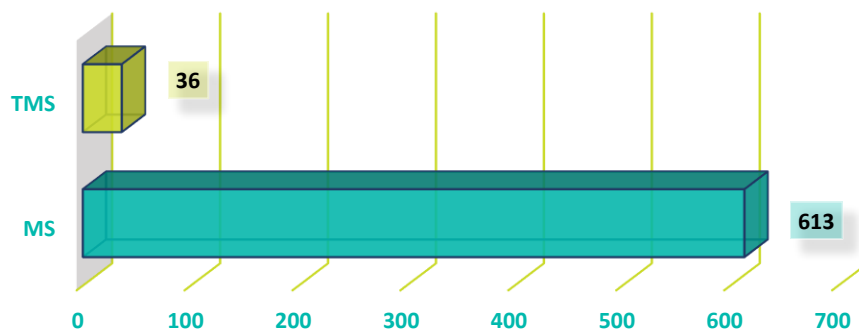
No	Wilker	Jenis TTU						Sanitasi		JML
		Kantor	Gudang	Terminal	Hotel	Pujasera	R.Ibadah	MS	TMS	
1	Panipahan	48	14	0	12	-	-	74	-	74
2	Bagansiapiapi	38	27	-	-	-	-	53	12	65
3	Tanjung Medang	61	24	-	-	-	-	85	-	85
4	Pinang Kampai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pelintung	-	-	-	-	-	-	168	6	174
6	Sungai Pakning	26	12	12	-	12	12	74	-	74
7	Bengkalis	12	-	12	-	-	10	34	-	34
8	Dumai	110	-	31	-	-	2	125	18	143
Total		295	77	55	12	12	24	445	36	649

Pada kegiatan pengamatan hygiene sanitasi gedung dan bangunan wilayah kerja KKP Kelas II Dumai tahun 2023 telah dilakukan oleh seluruh wilayah kerja yang ada di lingkungan KKP Kelas II Dumai. Secara total pada tahun 2023 pengawasan gedung dan bangunan telah dilakukan terhadap 649 (enam ratus empat puluh sembilan) bangunan, yang terdapat di wilayah-wilayah kerja KKP Kelas II Dumai. Distribusinya dapat dilihat pada grafik berikut ini :



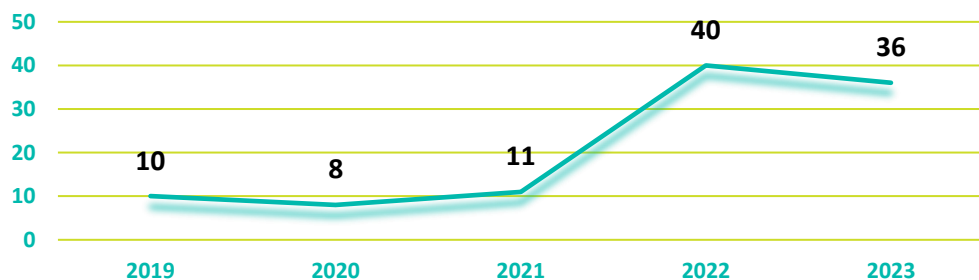
Grafik 3.39 Distribusi Pengawasan GPBL

Grafik 3.40
Jumlah TTU Yang Diperiksa
Berdasarkan Kategori Sanitasi
KKP Kelas II Dumai Tahun 2023



Berdasarkan Grafik 3.40 Jumlah TTU diketahui bahwa sebanyak 649 TTU telah diperiksa pada tahun 2023. Sebanyak 94% TTU dengan kategori memenuhi syarat kesehatan dan 6% TTU dengan kategori tidak memenuhi syarat kesehatan

Grafik. 3.41
Perbandingan Faktor Risiko TTU Yang Dikendalikan Dalam 5
Tahun Terakhir



Grafik 3.41 Perbandingan Faktor Risiko TTU

c. Pengawasan Penyediaan Air Bersih

Untuk melindungi masyarakat pelabuhan khususnya dan Indonesia umumnya dari faktor risiko lingkungan yang akan berdampak pada kesehatan, salah satunya adalah dengan tersedianya air bersih yang memenuhi syarat kesehatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas, untuk itu dibutuhkan pengawasan penyediaan air bersih yang meliputi penilaian kualitas fisik, kimia dan mikrobiologi serta penilaian tehnik penyediaan air bersih/air minum di dalam kapal.

Pengawasan penyediaan air bersih merupakan kegiatan yang berkelanjutan dimulai dari pengumpulan data, pengolahan serta analisis dan interpretasi terhadap sarana dan kualitas air bersih serta faktor risiko yang berperan pada terjadinya perubahan kualitas air yang mempengaruhi derajat

kesehatan masyarakat dan hasilnya dapat dipakai untuk tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.

Pemeriksaan sarana air bersih di kapal dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan sanitasi kapal dalam rangka pembaharuan Sertifikat Sanitasi kapal. Kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan secara langsung dengan metode observasi terhadap sarana air bersih dan pemeriksaan sampel dilapangan setelah dilakukan pemeriksaan diterbitkan sertifikat air bersih untuk kapal tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi ; pemeriksaan fisik, pemeriksaan kimia dan pemeriksaan sarana air bersih. Sementara untuk pemeriksaan sampel air langsung dilakukan di lapangan sesuai dengan peralatan yang tersedia seperti pH dan sisa Chlor. Dari sejumlah sarana dan sampel yang diperiksa semuanya memenuhi syarat yang ditentukan. Jumlah sarana air bersih yang di periksa selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

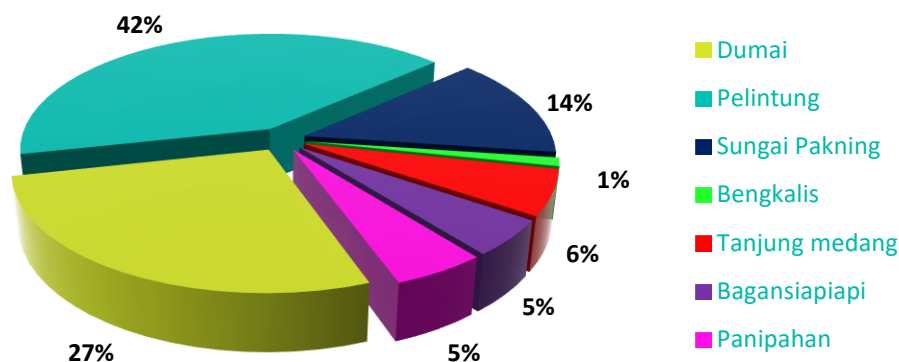
Tabel 3.11 Jumlah Sarana Air Bersih Yang Diawasi Berdasarkan Wilayah Kerja Tahun 2023

No	Wilayah Kerja	Jumlah	Kondisi Sanitasi		Ket.
			MS	TMS	
1	Dumai	212	212	-	
2	Pelintung	327	327	-	
3	Sungai Pakning	108	108	-	
4	Bengkalis	9	9	-	
5	Tanjung medang	48	48	-	
6	Bagansiapiapi	38	38	-	
7	Panipahan	40	40	-	
8	Bandara Pinang Kampai	-	-	-	
Jumlah		782	782	0	

Grafik dibawah ini adalah grafik distribusi pengawasan sarana air bersih berdasarkan wilayah kerja di KKP Kelas II Dumai, Dimana wilayah kerja terbanyak melaksanakan pengawasan SAB tersebut adalah wilayah kerja induk Pelintung sebanyak 42% dan diikuti oleh wilayah kerja Dumai sebanyak 27%. Pengawasan Sab paling sedikit dilakukan oleh wilker Pinang kampai, hal ini disebabkan karena sarana air bersih disana yang memang sedikit dan kegiatan penerbangan di bandara yang juga sedikit. Adanya wilayah kerja yang masih sedikit melaksanakan pengawasan penyediaan air bersih ini, selain karena tidak adanya anggaran pengawasan yang tersedia untuk wilayah-wilayah kerja

tersebut, juga ada wilayah-wilayah kerja yang pelabuhannya tidak ada tersedia pensuplay air bersih.

Grafik 3.42
Distribusi Pengawasan Sarana Air Bersih
Berdasarkan Wilayah Kerja KKP Kelas II Dumai Tahun 2023

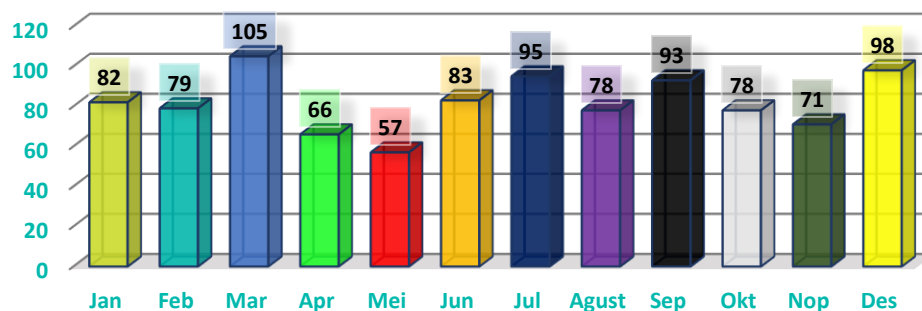


Berdasarkan Grafik 3.42 Distribusi Pengawasan Sarana Air Bersih diatas terlihat bahwa semua wilayah kerja melaksanakan pengawasan penyediaan air bersih. Pengawasan penyediaan air bersih terbanyak dilakukan oleh wilayah kerja pelabuhan induk Pelintung sebesar 42% dari total pengawasan yang dilakukan oleh KKP Dumai Kelas II Dumai.

d. Pemeriksaan Sanitasi Kapal

Pengawasan sanitasi kapal dilakukan untuk semua jenis kapal baik kapal penumpang, maupun kapal barang. Pemeriksaan sanitasi kapal dilakukan setiap kedatangan kapal dari luar negeri dan daerah terjangkau, keberangkatan yang dilakukan diseluruh wilayah kerja KKP Kelas II Dumai pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Grafik 3.43
Deskripsi Pemeriksaan Sanitasi Kapal KKP Kelas II Dumai
Tahun 2023



Berdasarkan Grafik 3.43 Deskripsi Pemeriksaan Sanitasi Kapal diatas diketahui bahwa pemeriksaan sanitasi kapal paling banyak dilakukan pada bulan

Maret yaitu sebanyak 105 kali pemeriksaan. Pada Tahun 2023 ada temuan 3 kapal dengan sanitasi Tidak Memenuhi Syarat dan dilakukan tindakan penyehatan.

e. *Tindakan Penyehatan Alat Angkut*

Pada saat ini dunia telah dihebohkan dengan terjadinya wabah penyakit menular yang disebabkan oleh sejenis virus yang dikenal dengan nama covid19. Penyebarannya begitu massif dan telah memakan banyak korban jiwa. WHO sebagai organisasi dunia dibidang kesehatan telah menetapkan sebagai Pandemi. Dengan ditetapkannya Covid19 menjadi Pandemi maka kewajiban setiap Negara untuk melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi penyebaran yang di Negara masing-masing. Bandara/pelabuhan adalah lokasi dengan potensi penyebaran virus yang sangat tinggi mengingat keluar/masuknya orang-orang dari berbagai Negara/daerah. Sehingga perlu mendapatkan dukungan berbagai lini untuk melakukan aksi pencegahan.

KKP sebagai institusi yang berfungsi dalam cegah tangkal penyakit di pintu masuk Negara juga melakukan upaya pencegahan penyakit yang dibawa oleh alat angkut dengan melakukan tindakan penyehatan alat angkut. Tindakan penyehatan yang dilakukan berupa desinfeksi, desinseksi, derratisasi/fumigasi. Pada tahun 2023 ini pelaksanaan tindakan penyehatan kapal sebagai berikut :

**Tabel 3.12 Pelaksanaan Tindakan Penyehatan Alat Angkut
KKP Kelas II Dumai Tahun 2023**

NO	BULAN	TINDAKAN PENYEHATAN			JUMLAH
		DESINFEKSI	DESINSEKSI	FUMIGASI	
1	Januari	-	-	1	1
2	Februari	-	-	1	1
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	1	-	1
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-
Jumlah		-	1	2	3

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa di KKP Kelas II Dumai pada tahun 2023 telah dilakukan tindakan penyehatan terhadap kapal sebanyak 3 (tiga) kali. Tindakan penyehatan kapal yang dilaksanakan di KKP Kelas II

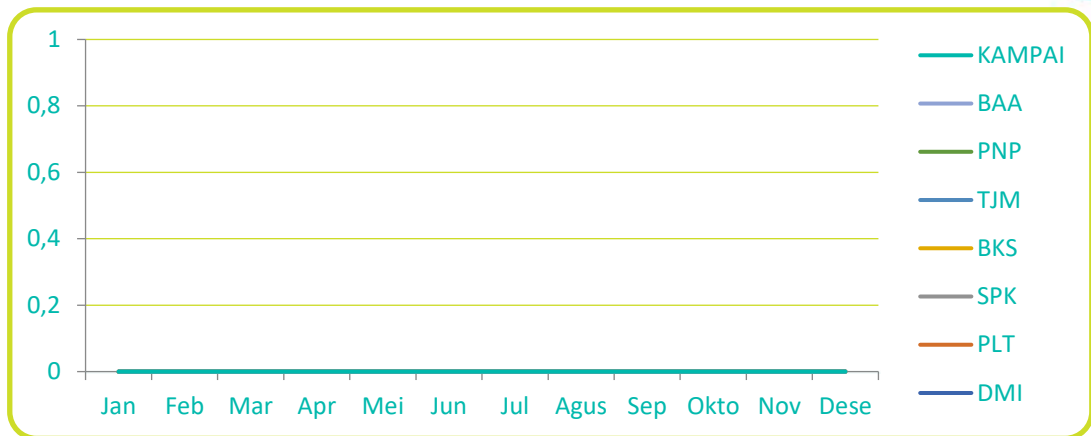
Dumai dilakukan atas dasar permintaan owner kapal, kegiatan rutin dan karena adanya temuan di kapal

Tabel 3.13 Capaian Indikator 3 KKP Kelas II Dumai Tahun 2023

NO	Parameter	TARGET %	CAPAIAN %
1	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	100	100
2	Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	100	100
3	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	100	100
4	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	100	100
5	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	100	100
6	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	100	100
7	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	100	100
8	Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	100	100
9	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	100	100

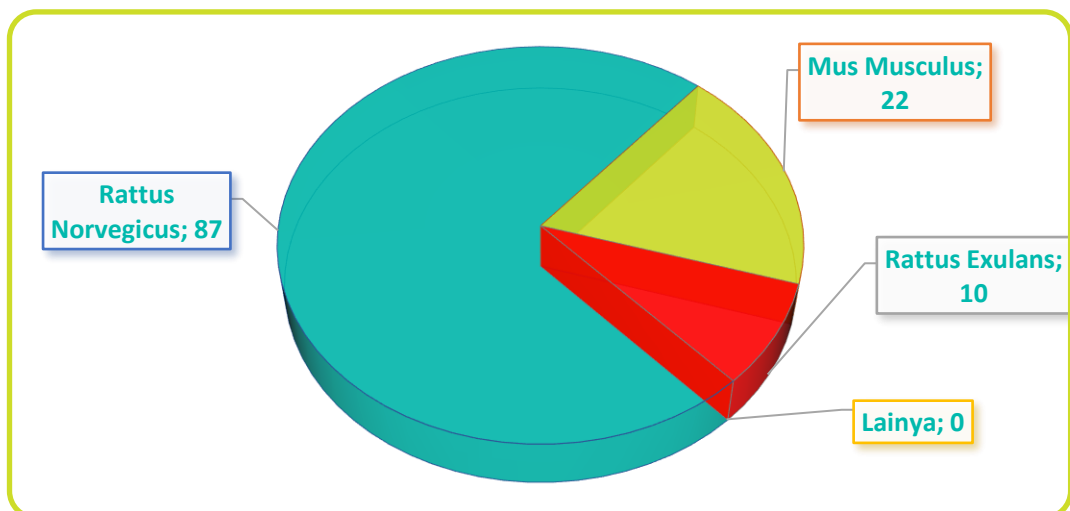
2. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1

Indeks pinjal khusus adalah jumlah pinjal *Xenopsylla cheopis* dibagi dengan jumlah tikus yang tertangkap dan diperiksa. Adapun indeks pinjal umum adalah jumlah pinjal umum (semua pinjal) dibagi dengan jumlah tikus yang tertangkap dan diperiksa. Indeks pinjal terdiri dari dua yaitu indeks pinjal khusus dan indeks pinjal umum. Indeks pinjal khusus adalah jumlah pinjal *Xenopsylla cheopis* dibagi dengan jumlah tikus yang diperiksa. Indeks pinjal umum adalah jumlah pinjal yang tertangkap dibagi dengan jumlah tikus yang diperiksa.



Grafik 3.44 Indeks Pinjal Berdasarkan Pelabuhan Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa indeks pinjal pada delapan pelabuhan sebesar 0% atau dibawah <1. Survei Vektor Pes dilakukan sebanyak 72 layanan yang tersebar pada delapan pelabuhan dengan jumlah 28.800 perangkat yang telah dipasang. Sepanjang tahun 2023, sebanyak 119 ekor tikus tertangkap dan dilakukan identifikasi untuk pemeriksaan pinjal.



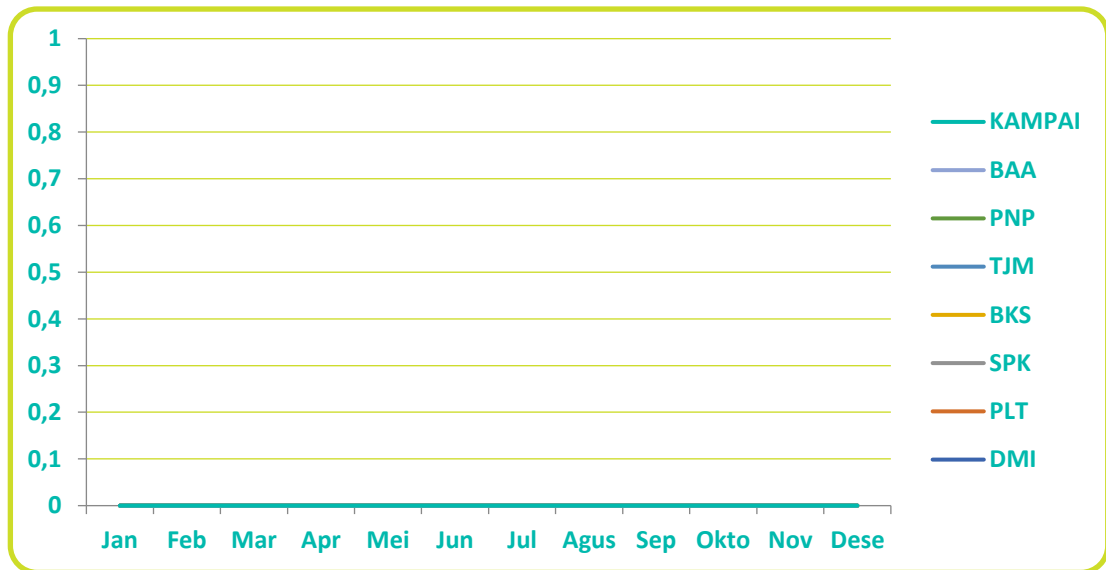
**Grafik 3.45
Jenis Tikus Tertangkap Dalam Survei Pes Tahun 2023**

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa jenis tikus *Rattus Norvegicus* menjadi jenis tikus dengan jumlah terbanyak yang tertangkap dalam survey vektor Pes. Jumlah *Rattus musculus* yang tertangkap sebanyak 87 ekor, disusul dengan *Rattus Musculus* dengan 22 ekor, *Rattus Exulans* 10 ekor.

3. Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)

Keberadaan larva *Anopheles* dilihat dari nilai indeks habitat. Indeks habitat adalah persentase habitat perkembangbiakan yang positif larva *Anopheles*, dihitung dengan cara jumlah habitat yang positif larva dibagi dengan jumlah seluruh habitat

yang diamati dikalikan dengan 100%. Pada tahun 2023 total sebanyak 14 layanan survei vektor malaria telah dilaksanakan dengan uraian hasil pada grafik dibawah ini.

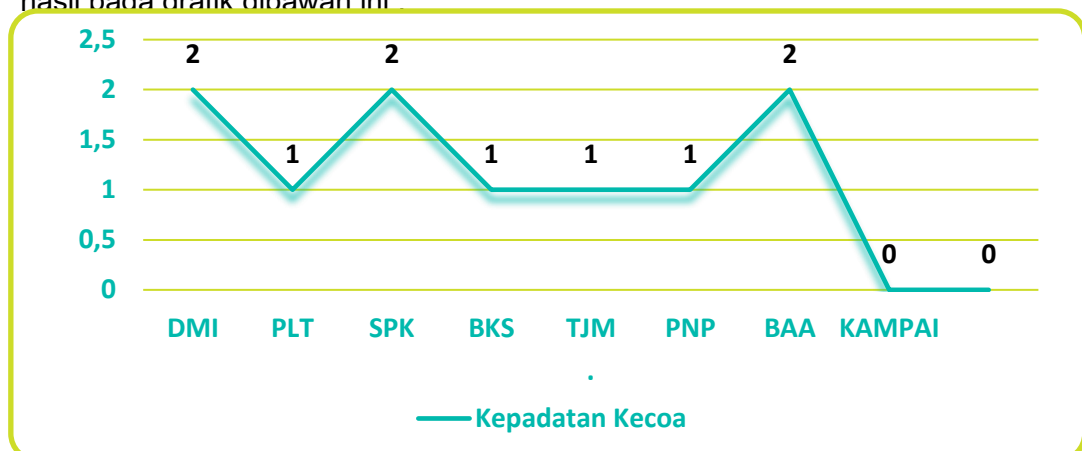


Grafik 3.46 Index Habitat Anopheles Berdasarkan Pelabuhan Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa tidak ditemukan genangan atau galian yang menjadi tempat perkembangbiakan larva *Anopheles*.

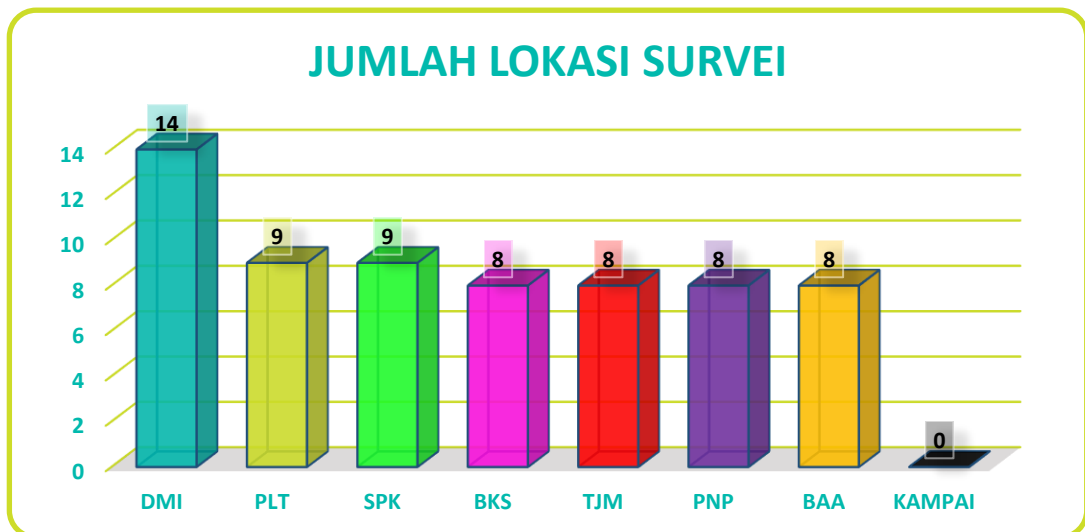
4. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2

Kepadatan kecoa mengacu kepada indeks populasi kecoa. Indeks populasi kecoa adalah angka rata-rata populasi kecoa, yang dihitung berdasarkan jumlah kecoa tertangkap per perangkap per malam menggunakan perangkap lem (sticky trap). Survei Kecoa dilakukan terhadap keberadaan ooteka, *nympa* dan kecoa dewasa pada tempat pengelolaan pangan dan tempat – tempat umum. Pada tahun 2023 sebanyak 64 layanan survei vektor diare telah dilaksanakan dengan uraian hasil pada grafik dibawah ini :



Grafik 3.47 Index Populasi Kecoa Berdasarkan Pelabuhan Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa nilai index populasi kecoa < 2 pada delapan pelabuhan yang menunjukkan bahwa index populasi dibawah nilai baku mutu. Survei dilakukan pada delapan pelabuhan yang dilakukan pada sore dan malam hari. Jumlah lokasi survei diuraikan pada pada grafik dibawah ini.

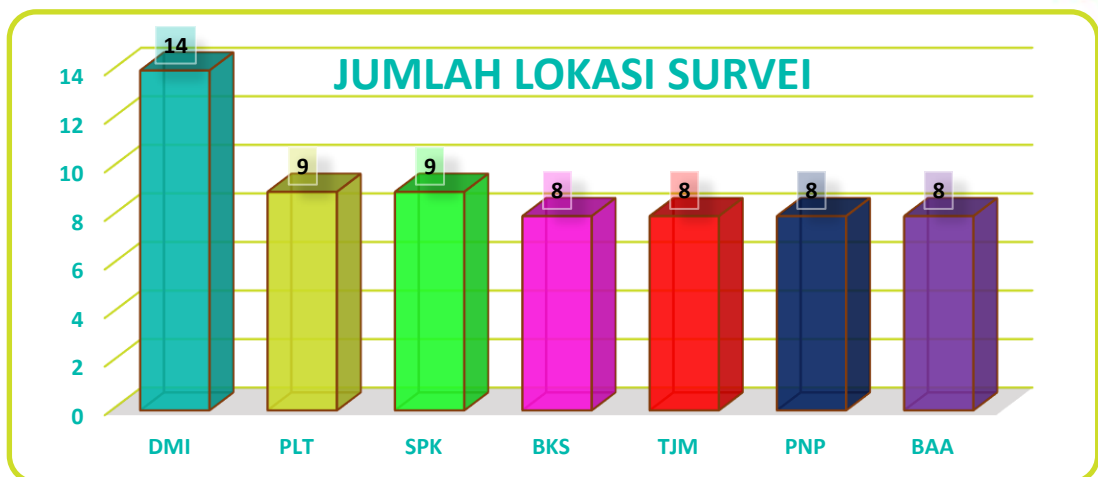


Grafik 3.48 jumlah Lokasi Survei Berdasarkan Pelabuhan Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai

Pada tahun 2023 telah dilakukan survei pada 64 lokasi yang tersebar pada delapan wilayah kerja pelabuhan. Pelabuhan Dumai menjadi pelabuhan dengan lokasi survei terbanyak dalam melakukan survei.

5. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2

Indeks populasi lalat adalah angka rata-rata populasi lalat pada suatu lokasi yang diukur dengan menggunakan flygrill. Dihitung dengan cara melakukan pengamatan selama 30 detik dan pengulangan sebanyak 10 kali pada setiap titik pengamatan. Dari 10 kali pengamatan diambil 5 (lima) nilai tertinggi, lalu kelima nilai tersebut dirata-ratakan. Survei kepadatan lalat dilakukan terhadap keberadaan lalat dewasa pada tempat pembuangan sampah yang berada pada wilayah perimeter dan buffer. Pada tahun 2023 sebanyak 64 layanan survei kepadatan lalat telah dilaksanakan dengan uraian pada grafik dibawah ini.

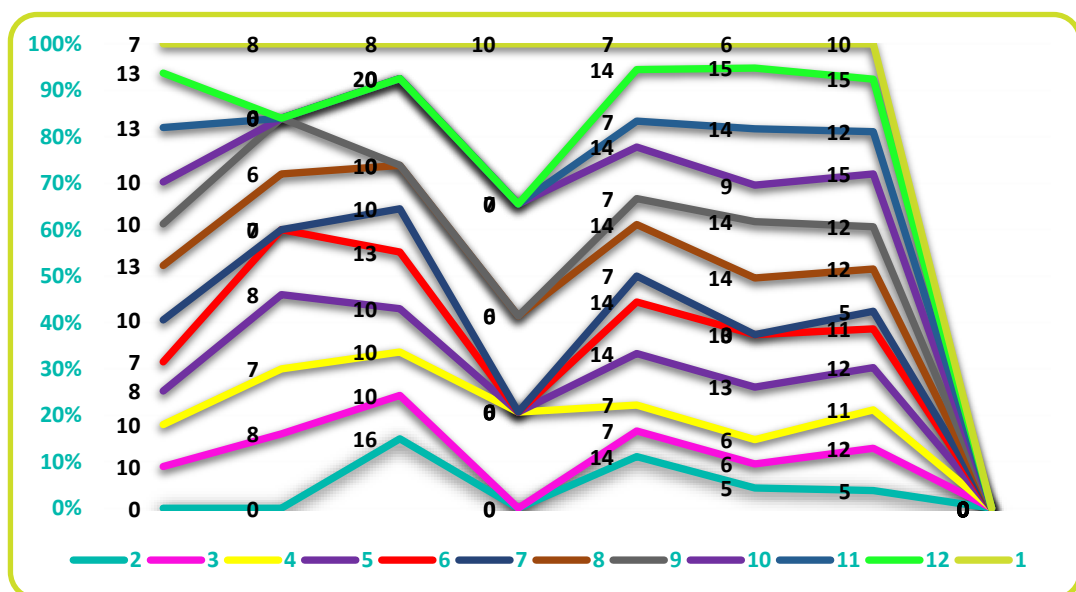


Grafik 3.49 Jumlah Lokasi Survei Berdasarkan Pelabuhan Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa pada tahun 2023 telah dilakukan survei pada 64 lokasi yang tersebar pada delapan pelabuhan. Pelabuhan Dumai menjadi pelabuhan dengan jumlah lokasi survei terbanyak yaitu 14 lokasi..

6. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0

House Index (HI) menggambarkan persentase rumah atau bangunan yang bebas jentik, dihitung dengan cara jumlah rumah yang ditemukan jentik dibagi dengan jumlah seluruh rumah yang diperiksa dikali 100%. Yang dimaksud dengan bangunan antara lain perkantoran, pabrik, rumah susun, dan tempat fasilitas umum yang dihitung berdasarkan satuan ruang bangunan/unit pengelolanya. Pada tahun 2023, sebanyak 30 layanan survei vektor DBD telah dilaksanakan uraian hasil pada grafik dibawah ini.



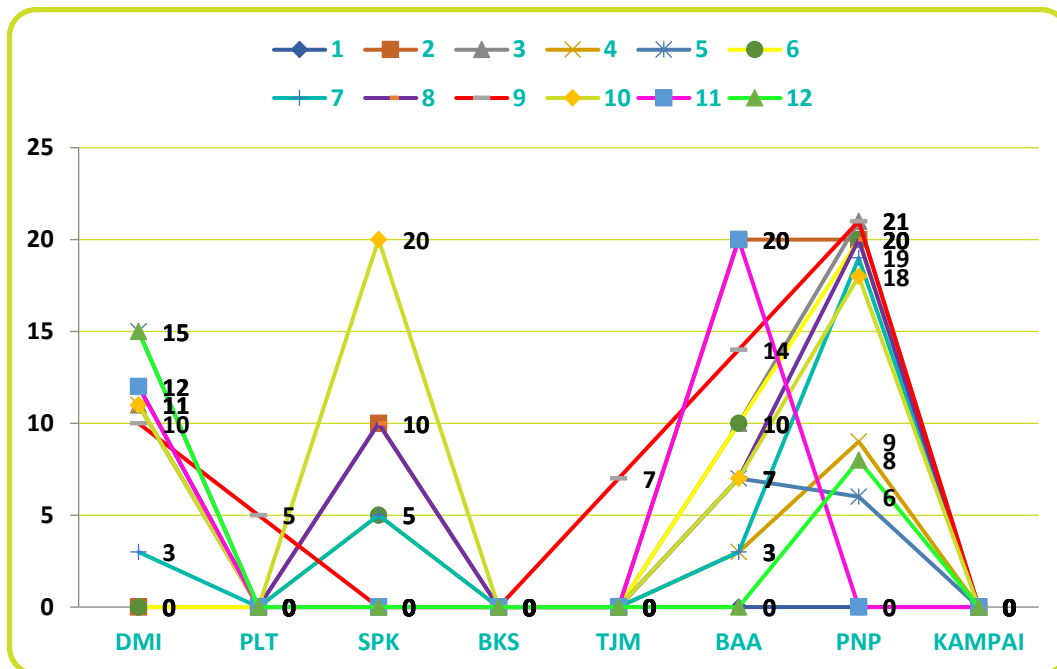
Grafik 3.50 House Index Berdasarkan Pelabuhan Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai



Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa nilai HI mengalami fluktuatif setiap bulannya. Saat survei diminggu pertama dilakukan jika diketahui terdapat infestasi larva pada rumah/bangunan, maka segera dilakukan tindakan pengendalian vektor dengan pemberian larva, *fogging* dan pemasangan ovitrap. Pada akhir tahun nilai HI diperoleh sebesar 0% pada delapan pelabuhan. Dalam survei vektor DBD pada tahun 2023 triwulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2.293 gedung/bangunan dan 4.258 kontainer telah diperiksa dan menggunakan Empat kilogram larvasida untuk pengendalian larva *Aedes*. Sebanyak dua belas liter insektisida telah digunakan untuk pengendalian vektor dengan *fogging* dengan capaian luas 15 hektar.

7. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1

House Index (HI) menggambarkan persentase rumah atau bangunan yang bebas jentik, dihitung dengan cara jumlah rumah yang ditemukan jentik dibagi dengan jumlah seluruh rumah yang diperiksa dikali 100%. Yang dimaksud dengan bangunan antara lain perkantoran, pabrik, rumah susun, dan tempat fasilitas umum yang dihitung berdasarkan satuan ruang bangunan/unit pengelolanya di wilayah *Buffer* Pelabuhan. Pada tahun 2023, sebanyak 42 layanan survei vektor DBD telah dilaksanakan dengan uraian hasil pada grafik dibawah ini.



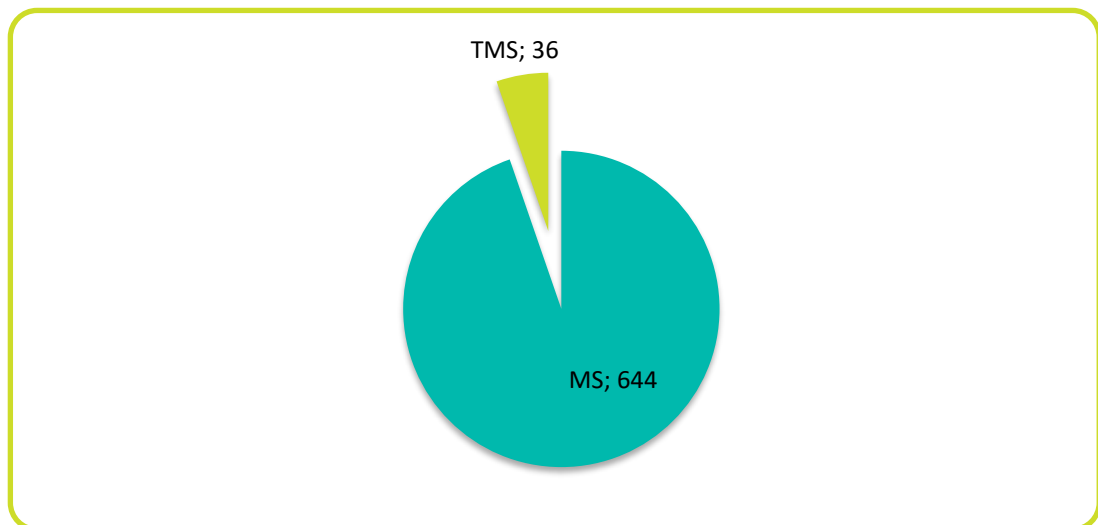
Grafik 3.51 House Index Berdasarkan Pelabuhan Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa nilai HI mengalami fluktuatif setiap bulannya. Saat survei diminggu pertama dilakukan jika diketahui terdapat infestasi larva pada rumah/bangunan, maka segera dilakukan tindakan

pengendalian vektor dengan pemberian larva, *fogging* dan pemasangan ovitrap. Pada tahun 2023 di delapan wilayah kerja pelabuhan. Dalam survei vektor DBD pada tahun 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 536 gedung/bangunan dan 969 kontainer telah diperiksa.

8. Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan

Inspeksi sanitasi terhadap Tempat-Tempat Umum (TTU) dilakukan di delapan pelabuhan. Kegiatan dilakukan dengan observasi dan pemeriksaan kualitas lingkungan pada TTU. Kegiatan ini fokus pada gedung, bangunan dan lingkungan yang berada di wilayah perimeter pelabuhan. Pada tahun 2023.

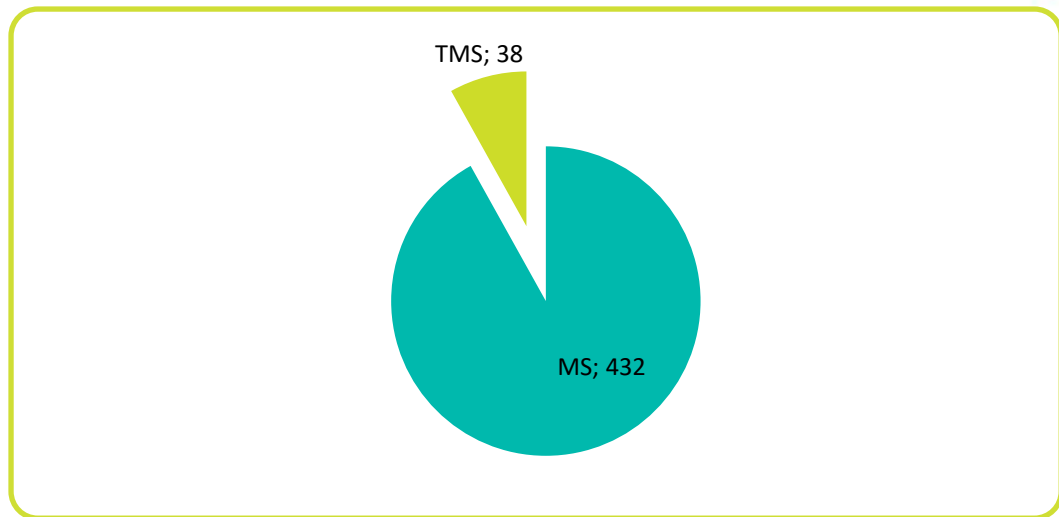


Grafik 3.52 jumlah Ttu Yang Diperiksa Berdasarkan Kategori Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa total sebanyak 680 Tempat-tempat umum telah diperiksa pada tahun 2023. Sebanyak 644 TTU dengan kategori memenuhi syarat kesehatan dan 36 TTU dengan kategori tidak memenuhi syarat kesehatan.

9. Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan.

Inspeksi sanitasi terhadap Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dilakukan di delapan pelabuhan. Kegiatan dilakukan dengan observasi dan pemeriksaan kualitas lingkungan pada TPM seperti pemeriksaan sampel makanan dengan *test kit* dan observasi penjamah makanan. Kegiatan ini fokus pada TPM yang berada di wilayah perimeter pelabuhan. Pada tahun 2023 sebanyak 19 layanan inspeksi TPM telah dilaksanakan dengan uraian pada grafik dibawah ini



Grafik 3.53 Jumlah Tpm Yang Diperiksa Berdasarkan Kategori Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa sebanyak 470 TPM total yang telah diperiksa pada tahun 2023. Sebanyak 432 TPM dengan kategori memenuhi syarat kesehatan dan 38 TMS dengan kategori tidak memenuhi syarat Kesehatan.

10. Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis.

Inspeksi sanitasi terhadap kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali pemeriksaan mikrobiologi dilakukan di delapan wilayah kerja pelabuhan. Kegiatan dilakukan dengan pengambilan sampel air bersih pada sarana air bersih yang ada di pelabuhan dan observasi sumber pencemaran di sekitar sarana air bersih tersebut. Kegiatan ini dilakukan di wilayah perimeter dan buffer pelabuhan. Pada tahun 2023 total sudah sebanyak 5 layanan dengan total pengambilan 50 sampel air bersih telah dilaksanakan.

a. Upaya yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

- Melaksanakan pengendalian faktor risiko kepada alat angkut berupa pengendalian vektor dan air yang terkontaminasi.
- Melaksanakan pengendalian faktor risiko kepada lingkungan dengan cara meningkatkan pengawasan sanitasi TMS, TPM, Air dan vektor di wilayah pelabuhan dan bandara.
- Melaksanakan kegiatan pengendalian faktor risiko sesuai dengan SOP dan standar pelayanan yang ditetapkan
- Melaksanakan kegiatan pengendalian faktor risiko sesuai dengan petunjuk teknis kegiatan.



b. Analisa Penyebab Keberhasilan.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja indikator persentase faktor risiko yang dikendalikan pada alat angkut, dan lingkungan pada tahun 2023 disebabkan beberapa hal berikut :

- Pengawasan yang ketat terhadap kedatangan kapal dan penumpang kapal.
- Tersedianya anggaran serta sarana dan prasarana yang cukup dalam melaksanakan kegiatan.
- Adanya kerjasama yang baik lintas sektoral yaitu dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai, Dinas Kesehatan Kota Dumai dan Institusi Pelabuhan
- Optimalisasi jadwal kegiatan (termasuk melaksanakan kegiatan diluar jam dan hari kerja)
- Optimalisasi SDM yang ada
- Dukungan kegiatan dari atasan
- Adanya rapat evaluasi kegiatan secara berkala
- Optimalisasi jejaring kerja lintas program dan lintas sektor dengan stake holder, pengguna jasa yang berada pada wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai.

c. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan

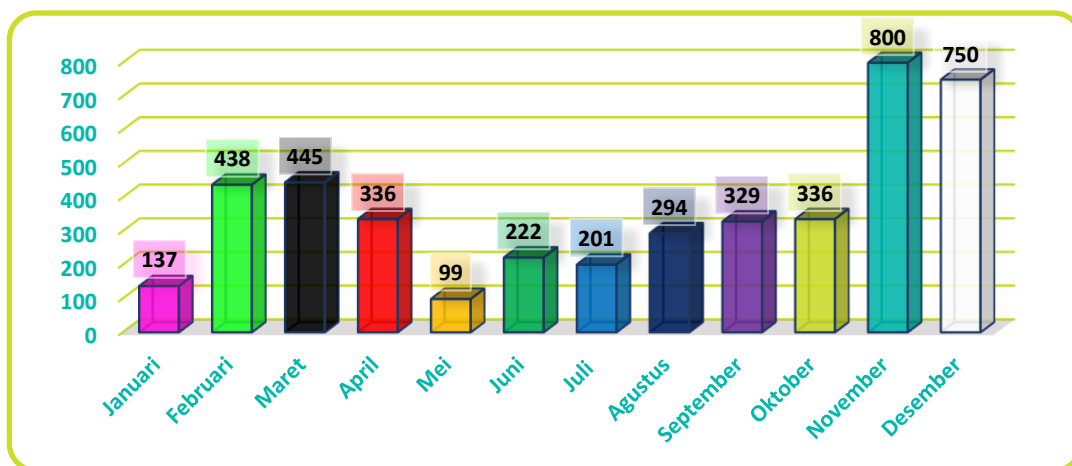
- Area pemeriksaan / observasi lapangan / survei di wilayah perimeter dan buffer membutuhkan prosedur administrasi yang panjang meskipun kegiatan rutin dilakukan sehingga pemeriksaan/observasi lapangan/survei tidak dapat dilakukan secara insidental.
- Belum banyak tersedianya Badan Usaha Swasta untuk melakukan kegiatan pengendalian vektor pada alat angkut/kapal di pelabuhan. Terkait perizinan BUS (Badan Usaha Swasta) .
- Luasnya area pemeriksaan / observasi lapangan / survei membutuhkan jumlah kader terlatih yang lebih banyak.
- Data pelaporan kegiatan dari wilayah kerja masih belum lengkap secara kuantitas dan kualitas.

D. SUBSTANSI UPAYA KESEHATAN LINTAS WILAYAH

Pelaksanaan kegiatan Bagian Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah (UKLW) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai berpedoman pada Permenkes RI No.33 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dalam Permenkes RI No.33 Tahun 2021 dijelaskan bahwa substansi UKLW mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pelatihan teknis bidang upaya kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Substansi UKLW Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai telah melaksanakan yang meliputi :

1. Program Kesehatan Terbatas

Pelayanan kesehatan terbatas di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai adalah poliklinik kantor induk yang berada di wilayah Pelabuhan Dumai dan wilayah kerja. Kunjungan pasien pada poliklinik selama tahun 2023 sebanyak 4.638 orang. Kunjungan poliklinik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai berasal dari penumpang, masyarakat umum dan pasien yang melakukan vaksinasi, pengobatan dan KIR kesehatan. Data kunjungan pasien pada poliklinik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai pada tahun 2023 diuraikan pada grafik dibawah ini.



Grafik 3.54 Jumlah Kunjungan Poliklinik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai Tahun 2023

Berdasarkan grafik diatas dapat terlihat kunjungan poliklinik terbanyak pada bulan November tahun 2023 sebanyak 800 orang (17,2%) dan paling sedikit bulan Januari tahun 2023 sebanyak 39 orang (0,84%). Terjadi peningkatan kunjungan pada November karena adanya kegiatan pengobatan massal.

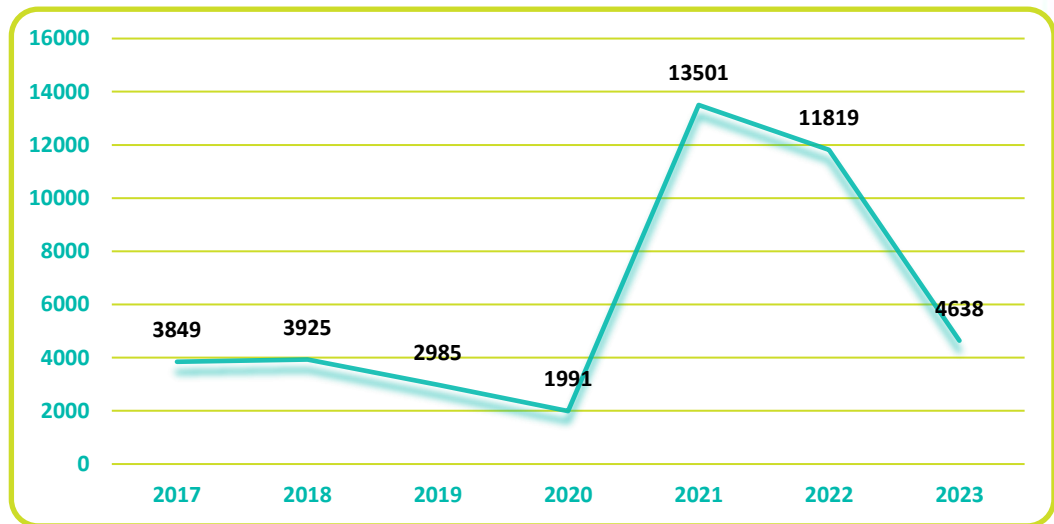
Pelayanan vaksinasi di KKP Kelas II Dumai adalah layanan vaksin meningitis meningococcus, yellow fever dan Covid 19. Sertifikat vaksinasi internasional adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa seseorang telah mendapatkan vaksinasi untuk perjalanan internasional sesuai Permenkes Nomor 23 tahun 2018. Kegiatan pelayanan vaksinasi Covid 19 dilakukan di poliklinik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai.

Pada Tahun 2023 pelayanan vaksinasi Meningitis Meningococcus di poliklinik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai sebanyak 135 orang dan vaksinasi yellow fever sebanyak 41 orang, dan pelayanan vaksinasi Covid 19 sebanyak 46 orang.



Gambar 3.12 Kunjungan Poliklinik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai

Kunjungan masyarakat yang dominan ke poliklinik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai adalah jemaah umroh yang melakukan vaksinasi meningitis , masyarakat yang melakukan vaksinansi Covid – 19 dan ABK (anak buah kapal) yang melakukan KIR untuk Sijil On sebagai salah satu syarat izin berlayar. Data kunjungan pasien pada poliklinik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai pada tahun 2017 hingga 2023 diuraikan pada grafik dibawah ini.



Grafik 3.55 Jumlah Kunjungan Poliklinik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai Tahun 2017-2023

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa kunjungan pasien di poliklinik pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dan kunjungan pasien dalam 7 tahun terakhir paling tinggi pada tahun 2021.

2. Layanan Kesehatan dan Pengawasan Pada Situasi Khusus

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai sebagai salah satu institusi yang keberadaannya di lingkungan Bandara dan Pelabuhan, dimana kedua lingkungan tersebut merupakan pintu masuk ke suatu negara atau wilayah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 salah satu fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus.



Gambar 3.13 Pelayanan Kesehatan Posko Lebaran 2023/1444 H

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai telah melakukan pelayanan kesehatan pada situasi khusus yaitu pelayanan kesehatan tahun baru 2023, pelayanan kesehatan lebaran tahun 2023/1444H, pelayanan kesehatan event

keagamaan bakar tongkang, pelayanan kesehatan event keagamaan mandi safar, bakti sosial dalam rangka Hari Kesehatan Nasional tahun 2023 dan pelayanan kesehatan pada natal 2023.

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada situasi khusus dilakukan pada arus mudik dan arus balik yang dimulai dengan kegiatan persiapan. Kegiatan pada persiapan terdiri atas penyuluhan kesehatan tentang kesiapan kebugaran fisik dan perilaku sehat, pemetaan faktor risiko kesehatan lingkungan, pemeriksaan kesehatan dan inspeksi sanitasi dan perbaikan kualitas air bersih dan sanitasi, penyiapan sumber daya manusia kesehatan dan unit pelayanan kesehatan di sepanjang jalur mudik, pengaturan sistem rujukan kesehatan, penyiapan mobilisasi sumber daya dan koordinasi lintas program dan lintas sektor serta menjalin komunikasi dan informasi.



Gambar 3.14 Pelayanan Kesehatan Event Keagamaan Bakar Tongkang



Gambar 3.15 Pelayanan Kesehatan Event Keagamaan Mandi Safar

Event Keagamaan mandi safar Mandi Safar merupakan salah satu festival budaya yang telah menjadi tradisi bagi Kabupaten Bengkalis Tanjung Medang yang setiap tahunnya dikembangkan pemerintah setempat. Pada event keagamaan mandi safar dilakukan pelayanan kesehatan pemeriksaan kesehatan pada 42 orang berupa pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, kolesterol dan asam urat.

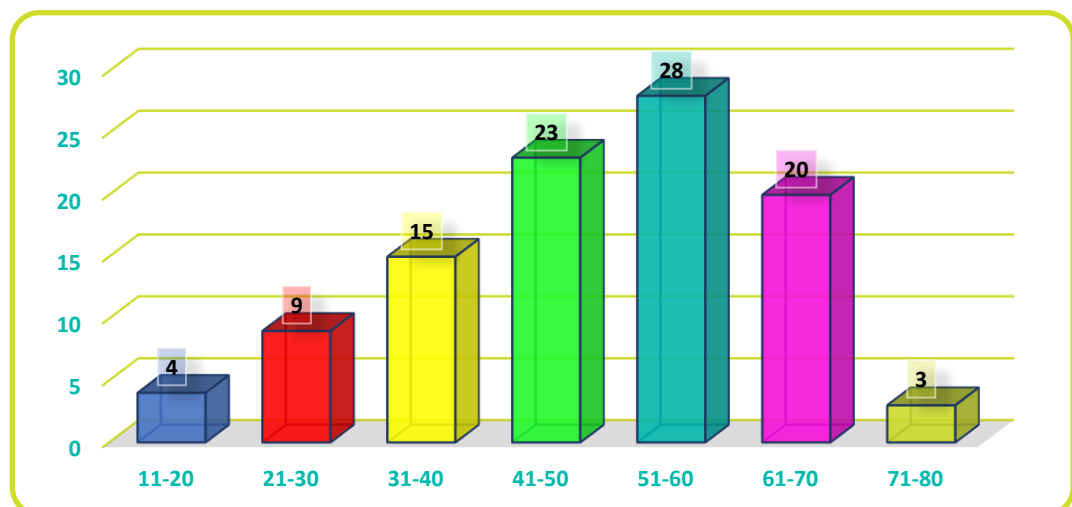


Gambar 3.16 Pelayanan Kesehatan Bakti Sosial Dalam Rangka Hari Kesehatan Nasional Tahun 2023

Kegiatan bakti sosial dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 dilaksanakan di halaman Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II. Kegiatan yang dilakukan pada bakti sosial ini berupa donor darah, pengobatan massal dan skrining penyakit tidak menular. Pada skrining penyakit tidak menular dilakukan pemeriksaan berupa pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan asam urat dan pemeriksaan kolesterol.

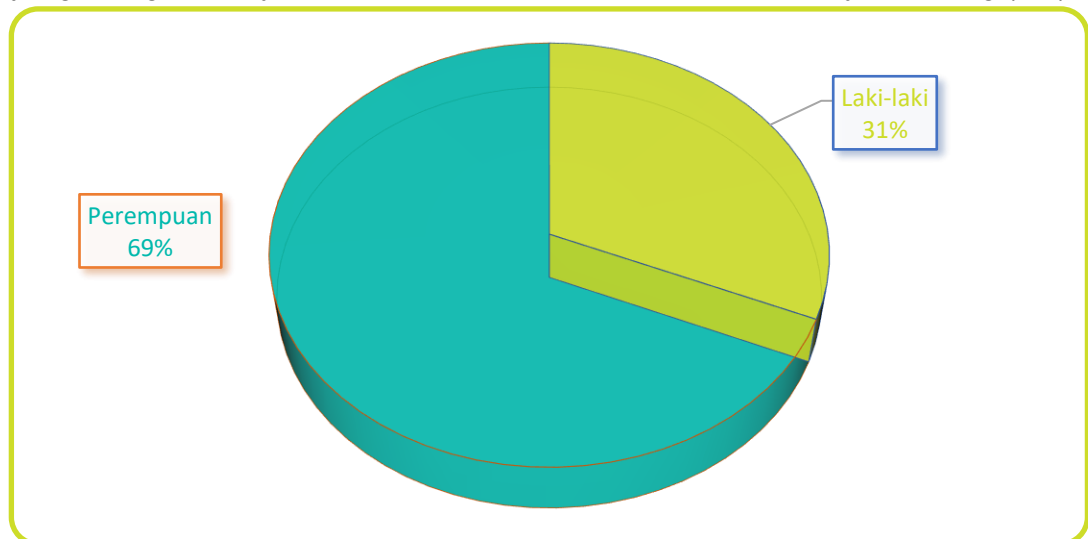
Setelah dilakukan pemeriksaan skrining penyakit menular dilakukan konsultasi dengan dokter Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai. Jika terdapat keluhan yang perlu diberikan pengobatan dilakukan pemberian obat untuk mengatasi keluhan tersebut. Pengobatan diberikan secara gratis kepada seluruh yang berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial.

Sebelum melakukan donor darah dilakukan skrining kesehatan diantaranya berat badan, tekanan darah dan hemoglobin. Dari hasil skrining didapatkan 21 orang yang bisa melakukan donor darah. Beberapa orang dinyatakan belum bisa melakukan donor karena berat badan yang kurang dan hemoglobin yang rendah.



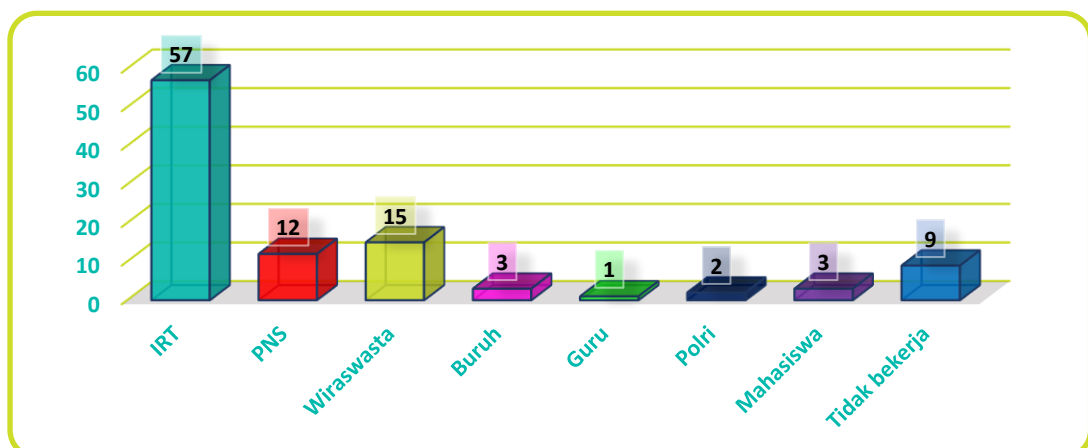
Grafik 3.56 Capaian pengobatan massal berdasarkan kelompok usia

Berdasarkan grafik dapat dilihat yang paling banyak mendapatkan pengobatan kelompok usia 51-60 tahun yaitu 28 orang (27,4%) dan kelompok usia yang paling sedikit yaitu pada kelompok usia 71-80 tahun sebanyak 3 orang (3%).



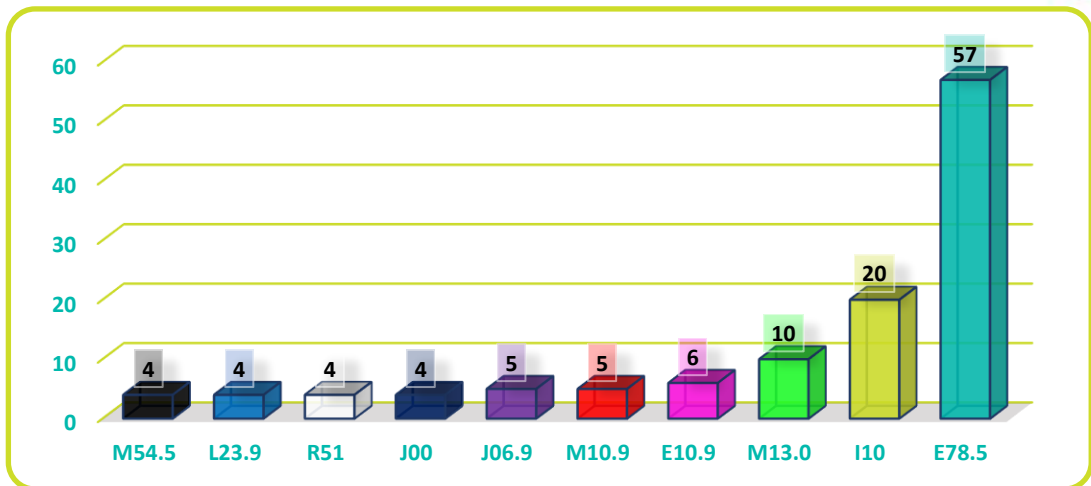
Grafik 3.57 Capaian pengobatan massal berdasarkan jenis kelamin

Dari grafik diatas dapat terlihat perempuan yang paling banyak mendapatkan pengobatan yaitu 69% jika dibandingkan dengan laki-laki sebesar 31%.



Grafik 3.58 Capaian pengobatan massal berdasarkan pekerjaan

Berdasarkan grafik dapat diketahui pada pengobatan paling banyak merupakan ibu rumah tangga yaitu 57 orang (56%). Yang mendapatkan pengobatan ini terdiri dari masyarakat sekitar pelabuhan, agen pelayaran, pegawai lintas sektor dan pegawai KKP Kelas II Dumai.



Grafik 3.59

Capaian pengobatan massal berdasarkan 10 diagnosis penyakit terbanyak

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa diagnosis terbanyak pada pengobatan bakti sosial ini adalah E78.5 (hiperlidemia) yaitu sebanyak 57 orang (55,9%).



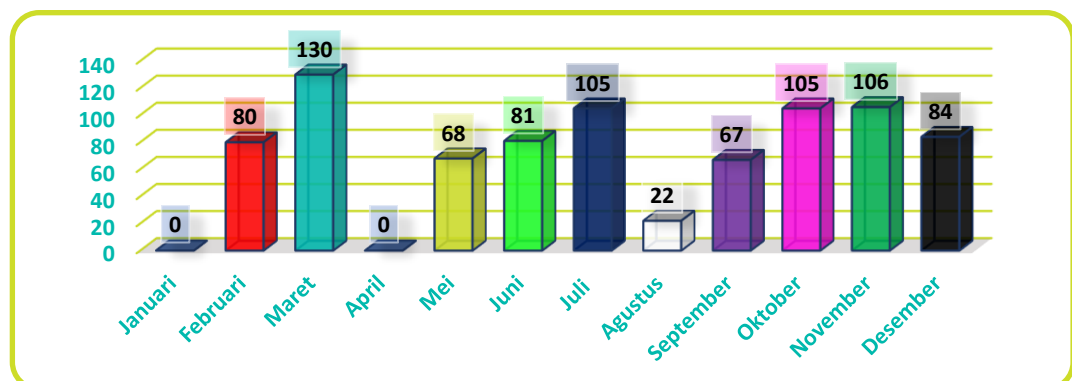
Gambar 3.17 Pelayanan Kesehatan Posko Natal 2023

3. Pelaksanaan deteksi dini (skrining) HIV

Untuk menurunkan infeksi HIV baru dan menurunkan kematian terkait HIV, kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV melalui deteksi dini HIV pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai telah dimulai sejak tahun 2006, dengan adanya Surat Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI Nomor PM 01.06/D3/III.3/1154/2016 tanggal 20 Mei 2016, direncanakan intensifikasi pelayanan bagi Pria Pekerja Pelabuhan. Pelabuhan Dumai termasuk salah satu dari 24 Pelabuhan di Indonesia yang menjadi prioritas penanggulangan HIV/AIDS.

Pada tahun anggaran 2023, target deteksi dini HIV yang ditetapkan dari Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai adalah sebanyak 500 orang. Untuk menurunkan infeksi HIV baru dan menurunkan kematian terkait HIV, salah satu kelompok yang menjadi sasaran pelayanan adalah masyarakat pelabuhan meliputi Stakeholder, anak buah kapal (ABK), tenaga kerja bongkar muat (TKBM), pengemudi truk, nelayan, ojek pelabuhan, serta pekerja formal an non formal unsur maritim di wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai.

Kegiatan deteksi dini ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota setempat melalui puskesmas, sehingga diharapkan tidak ada lagi yang belum mendapatkan pengobatan. Selain deteksi dini HIV dilakukan juga seteksi dini IMS. Pelaksanaan pemeriksaan atau tes HIV dilaksanakan di kantor induk dan semua wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai. Deteksi dini HIV dan IMS selama tahun 2023 telah dilakukan pada 837 orang dan didapatkan 1 orang dengan hasil positif. Data deteksi dini HIV yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai pada tahun 2023 diuraikan pada grafik dibawah ini.



Grafik 3.60 Jumlah Deteksi Dini HIV pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai Tahun 2023

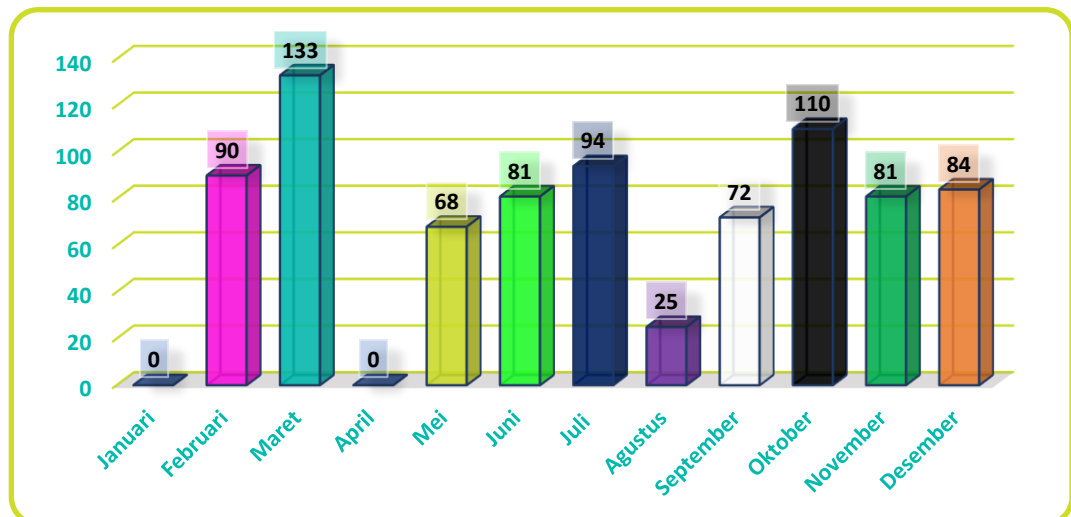
Berdasarkan grafik diatas diketahui deteksi dini HIV dan IM terbanyak pada bulan Maret tahun 2023 yaitu 130 orang. Deteksi kasus HIV selama tahun 2023 sebanyak 837 orang melebihi target pada tahun 2023 yaitu 500 orang. Kasus dengan HIV positif yang ditemukan dilakukan tindaklanjut di Puskesmas Dumai Kota.



Gambar 3.18 Deteksi Dini HIV pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai Tahun 2023

4. Deteksi Dini Terduga TBC

Usaha keras yang dilakukan berhasil membawa Indonesia sebagai negara pertama di Regional Asia Tenggara yang mencapai target TBC global yang dicanangkan waktu itu yaitu Angka Penemuan Kasus (*Crude Detection Rate/CDR*) diatas 70% dan Angka Keberhasilan Pengobatan (*Treatment Success Rate/ TSR*) diatas 85% pada tahun 2006 dan berupaya mencapai prevalensi Tuberkulosis 245 per 100.000 penduduk target pada tahun 2019. Program nasional TB yang dikembangkan memperkuat penerapan lima komponen dalam strategi DOTS, dengan fokus prioritas pada proses deteksi dini dan diagnosis yang bermutu, sistem logistik yang efektif untuk menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta pengobatan yang terstandar disertai dengan dukungan yang memadai kepada pasien. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai pada tahun 2023 telah melakukan deteksi dini terduga TBC sebanyak 849 orang.



Grafik 3.61 Deteksi Dini Terduga TBC Pada KKP Kelas II Dumai Tahun 2023

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa jumlah terbesar deteksi dini terduga TBC yang terbanyak dilaksanakan selama bulan Maret tahun 2023. Kasus positif TBC hanya ditemukan di Pelabuhan Dumai sebanyak 4 kasus. Kasus di tindaklanjuti dengan pemberian pengobatan di Puskesmas Dumai Kota. Pemeriksaan deteksi dini terduga TBC pada tahun 2023 sebanyak 849 orang telah melebihi target tahun 2023 sebanyak 500 orang.



Gambar 3.19 Deteksi Dini Terduga TBC pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai Tahun 2023

5. Pengawasan Terhadap Pelaku Perjalanan Pada Situasi Khusus Haji dan Umrah

Surat Keputusan MenKes No. 1045/Menkes/2007 tentang penetapan wilayah pengesahan *International Certificate of Vaccination* (ICV) dan pengawasan vaksinasi meningitis bagi calon jemaah calon haji. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut wilayah kerja Kantor kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai melakukan pengawasan pelayanan vaksinasi internasional dan penerbitan dokumen ICV pada jemaah calon haji, terdiri dari dua Kabupaten dan satu Kota yaitu Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis. Dalam pengesahan dan pemberian ICV Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat.



Gambar 3.20 Pengawasan Vaksinasi Jamaah Haji

Kegiatan pendampingan jamaah calon haji dari saat embarkasi dan debarkasi ke Pekanbaru tidak dilaksanakan substansi UKLW karena jarak tempuh pendek melalui Tol.

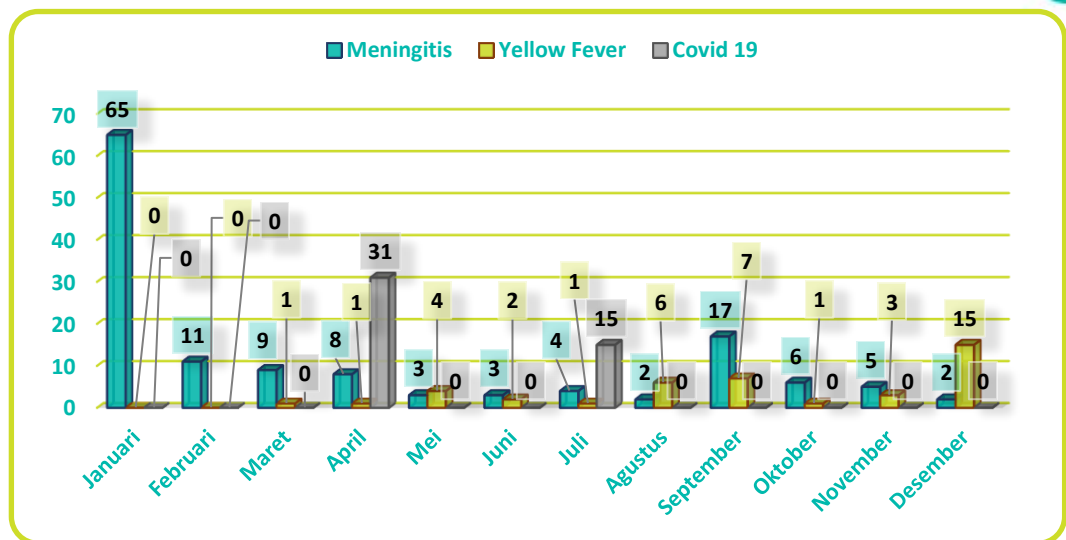
6. Vaksinasi Internasional

Sertifikat Vaksinasi Internasional adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa seseorang telah mendapatkan vaksinasi dan/atau profilaksis yang diperlukan untuk perjalanan internasional tertentu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional menjelaskan bahwa setiap orang yang akan melakukan perjalanan internasional dari dan ke negara terjangkit dan/atau endemis penyakit menular tertentu dan/atau atas permintaan negara tujuan wajib diberikan vaksinasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan.



Gambar 3.21 Pelayanan Vaksinasi pada Kantor Kesehatan Kelas II Dumai

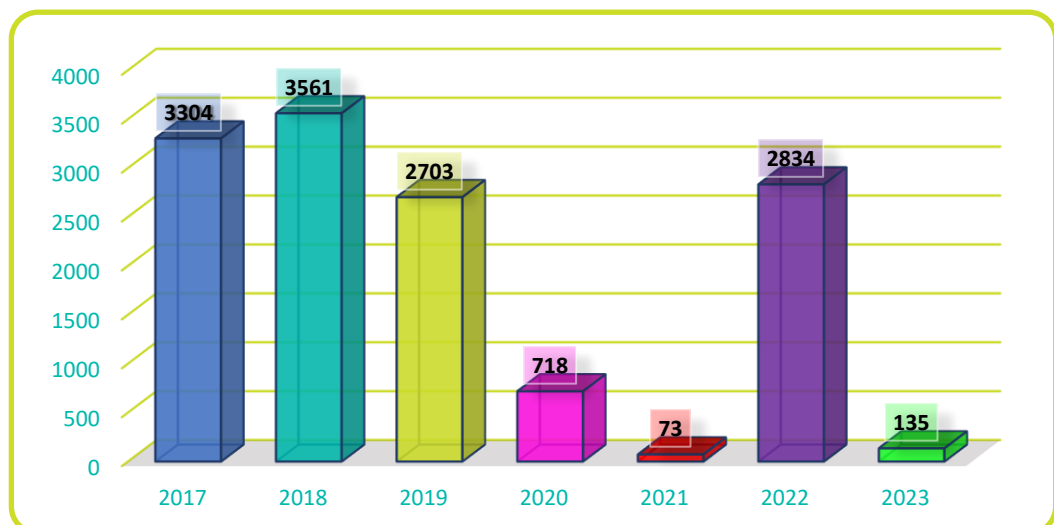
Pemberian ICV sesuai dengan ketentuan *International Health Regulation* (IHR) tahun 2005. Pemberian ICV dan Vaksinasi selain kepada jamaah haji juga diberikan kepada jamaah Umroh dan ABK, antara lain Vaksinasi Meningitis dan *Yellow Fever*. Selain vaksinasi meningitis dan yellow fever di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai juga melakukan vaksinasi Covid 19. Pada Tahun 2023 pelayanan vaksinasi Meningitis Meningococcus di poliklinik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai sebanyak 135 orang dan vaksinasi yellow fever sebanyak 41 orang, dan pelayanan vaksinasi Covid 19 sebanyak 46 orang.



Grafik 3.62 Pelayanan Vaksinasi Meningitis, Vaksinasi Yellow Fever dan vaksinasi Covid 19 Tahun 2023

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa jumlah vaksinasi Meningitis terbanyak pada bulan Januari 2023, vaksinasi covid pada bulan April 2023 dan vaksinasi yellow fever pada Desember 2023.

Data pemakaian vaksin meningitis periode 2017 hingga 2023 diuraikan pada grafik dibawah ini.



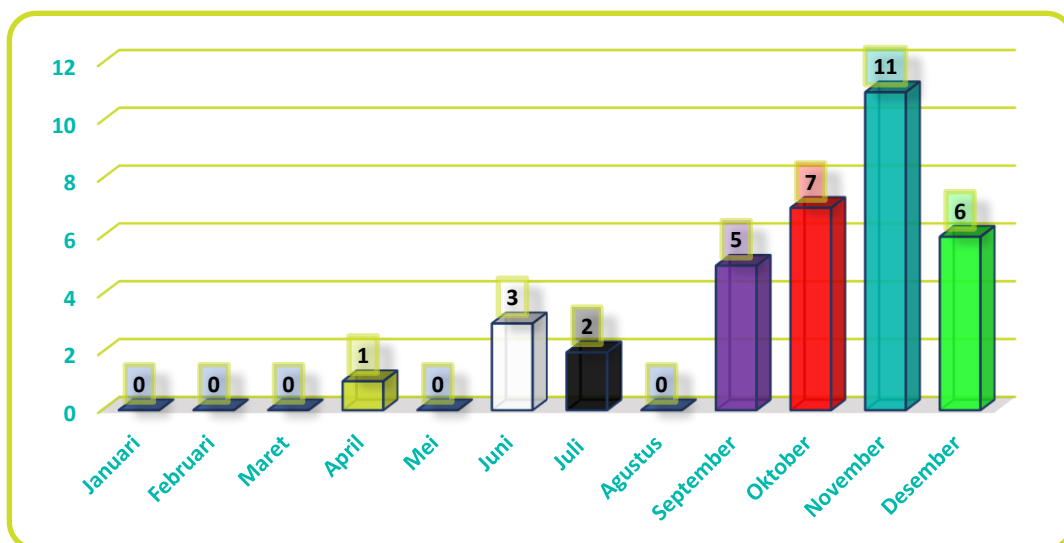
Grafik 3.63 Pelayanan Vaksinasi Meningitis Pada Poliklinik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai Tahun 2017 s/d 2023

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah pelayanan vaksin Meningitis Meningokokus pada tahun 2023 dikarena adanya aturan pemerintah yang tidak mewajibkan vaksinasi meningitis untuk keberangkatan umroh. Sehingga terjadi penurunan yang sangat signifikan pada vaksinasi meningitis.

7. Penerbitan Dokumen Laik Terbang Dan Izin Angkut Orang Sakit

Sebagai salah satu fungsi pengawasan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai melakukan pengawasan pada pelaku perjalanan. Guna mengantisipasi ancaman penyebaran penyakit serta permasalahan kesehatan masyarakat maka perlu dilakukan penilai pada penumpang yang akan berangkat. Dilakukan penerbitan surat laik terbang jika memenuhi persyaratan yang ditentukan serta aman untuk terbang di udara. Pemberangkatan orang sakit melalui udara disyaratkan yakni tidak menderita penyakit karantina/penyakit menular tertentu, tidak ada kontradiksi dengan peraturan penerbangan, serta pasien didampingi oleh keluarga/dokter/perawat.

Di pelabuhan laut juga dilakukan pemeriksaan pada pemberangkatan orang sakit untuk menentukan layak atau tidak untuk berangkat. Penerbitan surat izin orang sakit diberikan pada penumpang sakit yang setelah pemeriksaan dinyatakan dapat berangkat. Pada tahun 2023 Kantor Kesehatan Pelabuhan Dumai tidak ada menerbitkan surat laik terbang dikarenakan ditutupnya penerbangan dari dan ke Dumai. Penerbitan surat izin angkut orang sakit di poliklinik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai selama Tahun 2023 sebanyak 35 orang.



Grafik 3.64 Penerbitan Surat Izin Angkut Orang Sakit Tahun 2023

Dari grafik diatas dapat diketahui penerbitan izin angkut orang sakit terbanyak pada bulan November sebanyak 11 dan terdapat beberapa bulan yang tidak ada penerbitan surat izin angkut orang sakit.



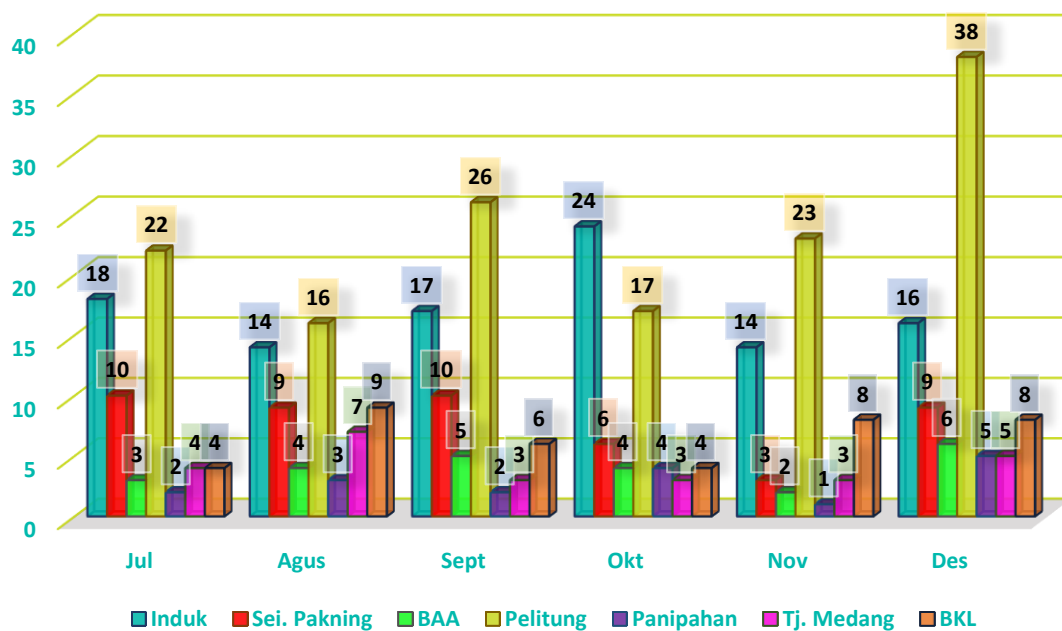
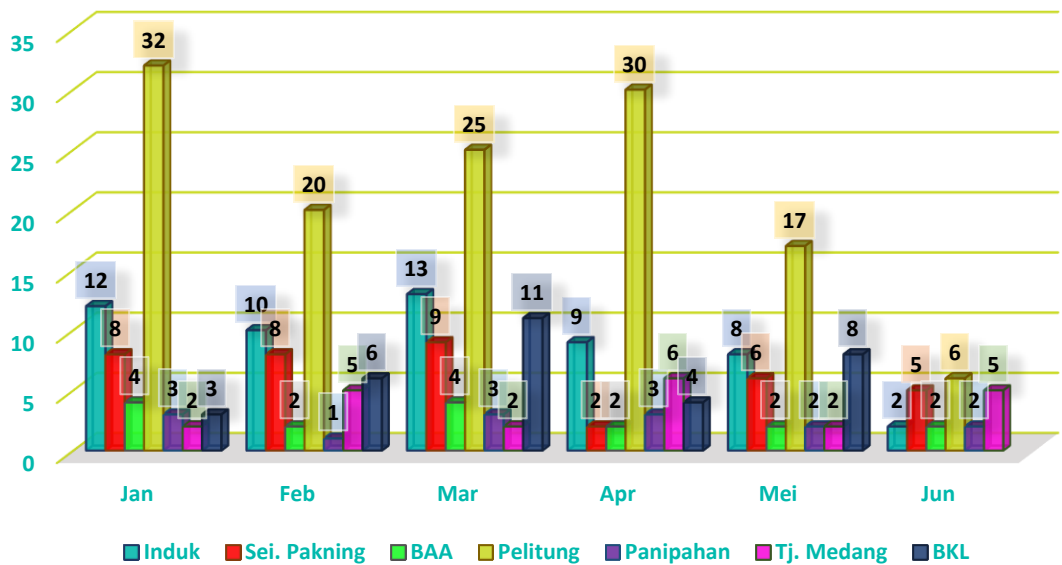
Gambar 3.22 Penerbitan Surat Ijin Angkut Orang Sakit Tahun 2023

8. Penerbitan Sertifikat P3K

Kecelakaan dan kedaruratan medik sering terjadi pada alat angkut selama dalam perjalanannya ketempat tujuan baik angkutan darat, laut, maupun udara. Untuk itu diperlukan ketersediaan obat-obatan untuk pertolongan pertama pada alat angkut sangat diperlukan, terutama alat angkut laut atau kapal mengingat jauh dan lamanya jarak tempuh yang dilalui alat angkut ini. Ketersediaan obat-obatan di kapal perlu dilengkapi dan diterbitkan sertifikat obat dan alat kesehatan yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan. Sertifikat obat dan alat kesehatan tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan dan setiap kali penerbitan sertifikat dilakukan pengecekan persediaan obat di kapal.

Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pengawasan obat dan alat kesehatan standar di alat angkut dan penerbitan sertifikat P3K di Induk sebanyak 181, Wilker Sungai Pakning sebanyak 83, Bagan Siapiapi sebanyak 44, Pelintung sebanyak 281, Panipahan sebanyak 34, Tanjung Medang sebanyak 47, Bengkalis sebanyak 78. Dengan total sertifikat P3K sebanyak 748 sertifikat.

Grafik 3.65 Penerbitan Sertifikat P3K Kapal Tahun 2023



Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa jumlah penerbitan sertifikat P3K jumlah penerbitan sertifikat P3K tertinggi pada bulan Desember tahun 2023.

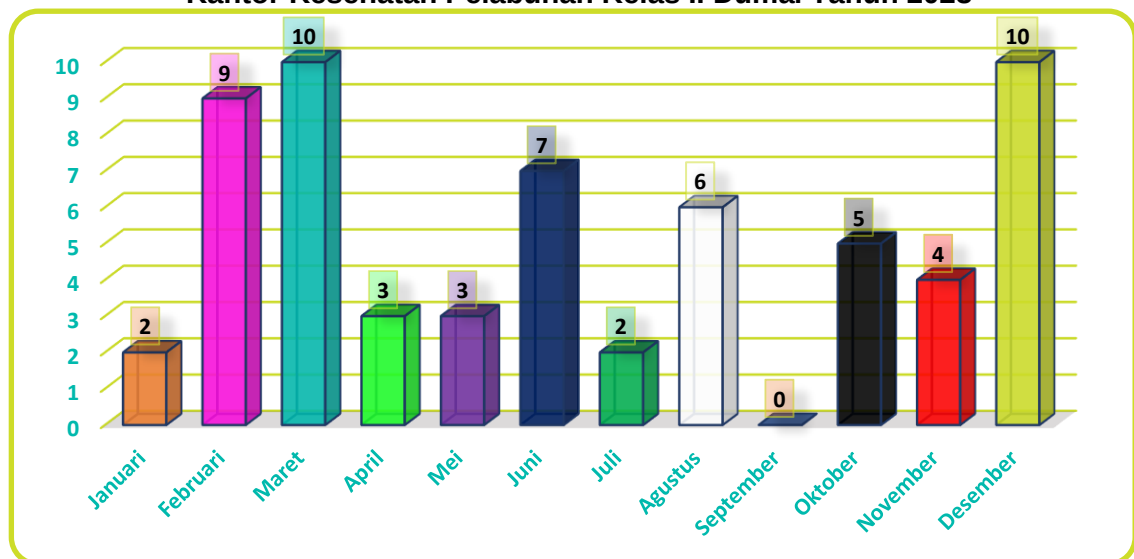


Gambar 3.23 Pengawasan Obat dan Alat Kesehatan Kapal Tahun 2023

9. Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan

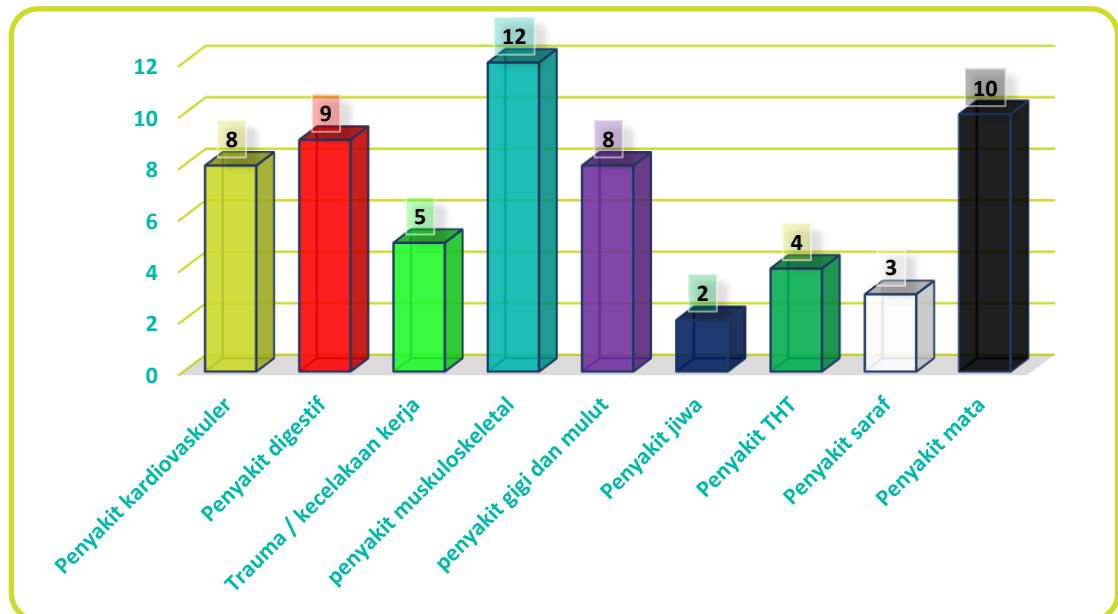
Kegiatan pelayanan kegawat daruratan medik pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai selama Tahun 2023 sebanyak 61 orang. Adapun kasus gawat daruratnya antara lain penyakit jantung, penyakit saluran cerna, penyakit Hipertensi, trauma atau kecelakaan kerja, dan sakit gigi. Penanganan dilakukan oleh Dokter dan perawat ke kapal pada saat labuh atau sandar dan penanganan kasusnya dapat dilaksanakan di kapal tanpa harus di rujuk ke Rumah sakit. Adapun rincian dapat dilihat di grafik di bawah ini.

Grafik. 3.66 Pelayanan Kegawatdaruratan Medik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai Tahun 2023



Berdasarkan grafik diatas dapat terlihat pelayanan kegawatdaruratan selama tahun 2023 paling banyak pada bulan Maret dan Desember masing-masing terdapat 10 kasus. Dan paling sedikit pada bulan September tidak ada kasus kegawatdaruratan.

Grafik 3.67 Pelayanan Kegawadaruratan Medik Berdasarkan Penyakit Tahun 2023



Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui penyakit kegawatdaruratan terbanyak selama tahun 2023 adalah penyakit muskuloskeletal.



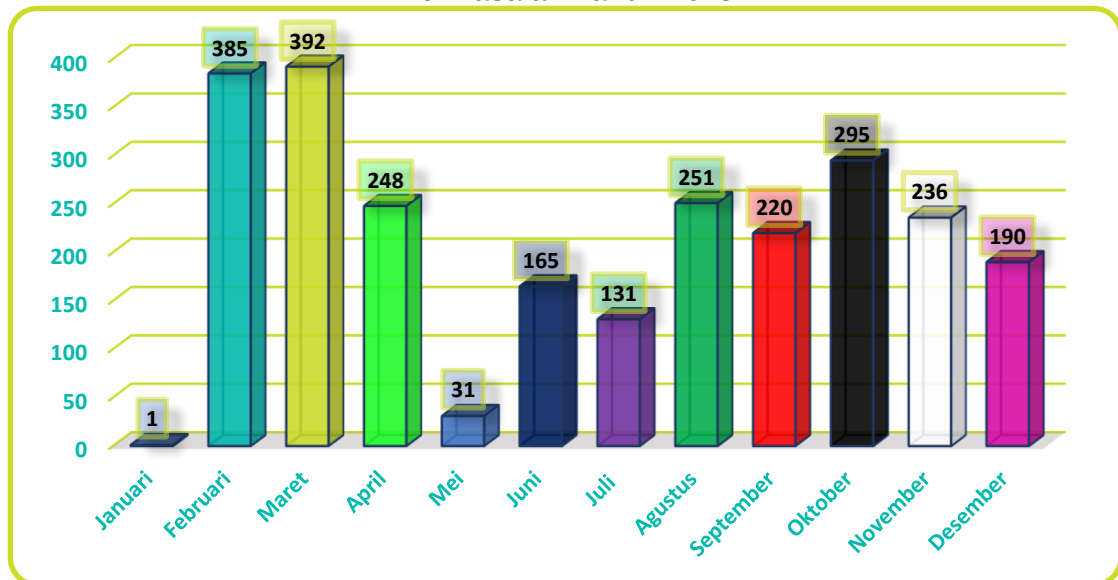
Gambar 3.24 Penanganan Kegawat daruratan Tahun 2023

10. Pengawasan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah

Salah satu pelayanan kesehatan yang di laksanakan Kantor Kesehatan Kelas II Dumai adalah penanganan kesehatan pada Pekerja Migran Indonesia Overstay (PMI-O), Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI-B). Kegiatan yang

telah dilaksanakan adalah memberikan pelayanan kesehatan terhadap pekerja migran Indonesia yang masuk dari Malaysia melalui Pelabuhan Penumpang Dumai. Jumlah tenaga kerja Indonesia bermasalah selama tahun 2023 yang masuk ke Indonesia melalui Terminal Penumpang PT. Pelindo I Cabang Dumai sebanyak 2545 orang.

Grafik 3.68 Pengawasan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Tahun 2023



Berdasarkan grafik diatas dapat terlihat pengawasan pekerja migran bermasalah paling banyak pada bulan Maret 2023 sebanyak 392 dan paling sedikit pada bulan Mei 2023.



Gambar 3.25 Pengawasan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Tahun 2023

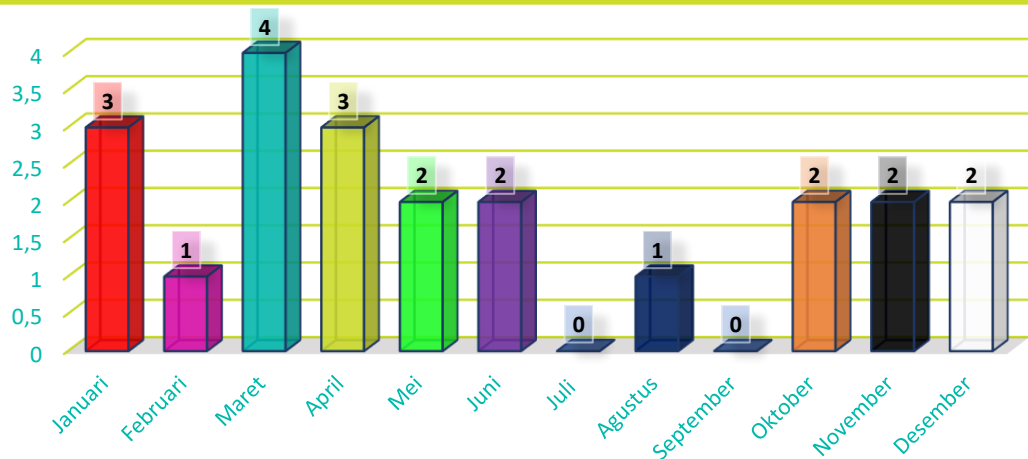
11. Pelayanan Rujukan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah merujuk orang yang sakit dengan keadaan gawat darurat ke rumah sakit. Jumlah layanan kesehatan rujukan yang dilaksanakan selama tahun 2023 adalah sebanyak 22 layanan. ABK kapal warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing mendapat perlakuan yang sama. Kasus gawat darurat yang tidak dapat dilakukan penanganannya di kapal dirujuk ke

rumah sakit untuk pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan yang lebih lanjut oleh dokter spesialis. Rumah sakit rujukan antara lain RSUD Kota Dumai dan RS. Pertamina Dumai.

Adapun kasus gawat darurat yang ditangani selama tahun 2023 seperti penyakit jantung, trauma atau kecelakaan kerja dan penyakit saluran cerna. Pelaksanaan rujukan dilakukan oleh dokter, perawat dan supir ambulance.

**Grafik 3.69 Pelayanan Rujukan Berdasarkan Penyakit
Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai Tahun 2023**

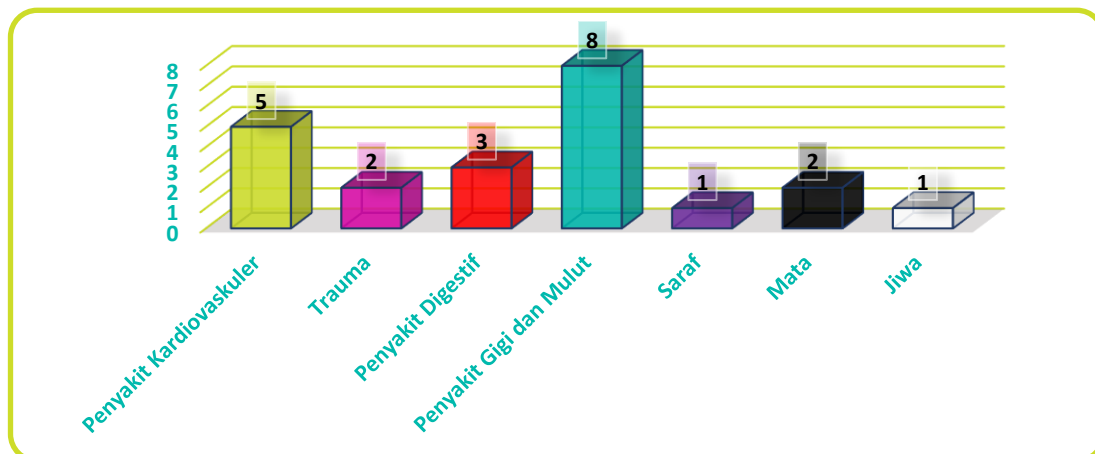


Dari grafik dapat terlihat pelayanan rujukan paling banyak dilakukan pada bulan Maret sebanyak 4 kali. Dan pada bulan Juli dan September tidak terdapat kasus kegawatan yang dilakukan rujukan.



Gambar 3.26 Pelayanan Rujukan Tahun 2023

Grafik 3.70 Pelayanan Rujukan Berdasarkan Penyakit Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai Tahun 2023



Dari grafik dapat terlihat distribusi penyakit yang dirujuk paling banyak penyakit gigi dan mulut. Penyakit terdikit selama 2023 yaitu saraf dan asma.

12. Kegiatan Sosialisasi

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang deteksi dini dan penularan Tuberkulosis maka dilaksanakan sosialisasi edutainment dan deteksi dini penyakit TBC. Sasaran sosialisasi yaitu pegawai Kantor Kesehatan Kelas II Dumai, lintas sektoral dan perwakilan agen pelayaran,



Gambar 3.27 Sosialisasi Edutainment dan Deteksi Dini Penyakit TBC

Sosialisasi juga dilakukan di wilayah kerja Bengkalis. Dengan tema tuberkulosis resisten obat. Sasaran sosialisasi ini yaitu pegawai Kantor Kesehatan Kelas II Dumai, lintas sektoral dan perwakilan agen pelayaran.



Gambar 3.28 Sosialisasi TBC Resisten Obat



BAB IV

PENUTUP

Profil ini diharapkan dapat menjadi informasi dalam membuat perencanaan serta untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang akan datang sehingga kinerja dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai dapat memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Upaya optimal telah dilakukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai tahun 2023 dengan sumber daya dan sumber dana yang telah tersedia, Profil Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai merupakan wujud dari pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan KKP Kelas II Dumai kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan seluruh *stakeholders* yang terlibat baik langsung maupun tidak dalam pelaksanaan Pembangunan kesehatan khususnya dipintu gerbang negara.

Pada tahun 2023 KKP Kelas II Dumai telah dapat melaksanakan dan merealisasikan seluruh program dengan tercapainya target indikator kinerja. Berdasarkan hasil kegiatan KKP Kelas II Dumai berhasil mencapai target seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan rata-rata capaian 103.5%.

Realisasi anggaran KKP Kelas II Dumai atas pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 adalah sebesar Rp.13.256.033.170,- atau sebesar 98,22% dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.13.495.971.000,-. Dengan persentase realisasi tertinggi berada pada indikator Kinerja Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 99,06% dan terendah pada indikator Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara sebesar 95,96%. Namun total realisasi anggaran KKP Kelas IIDumai tahun 2023 telah melewati target realisasi anggaran minimal yang ditetapkan Ditjen P2P yaitu 95%.

Kesimpulan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai tahun 2023 antara lain:

1. Sub Bagian Administrasi Umum
 - a. Jumlah jabatan fungsional berjumlah 38 pegawai, jumlahnya meningkat dari tahun sebelumnya karena pengangkatan PNS dan penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional.
 - b. Alokasi anggaran untuk Kantor Kesehatan Kelas II Dumai Rp. 13.495.971.000,- dengan rincian dana tersebut bersumber RM (rupiah murni) sebesar Rp. 11.683.541.000,- dan dana bersumber dari PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp. 1.812.430.000,-.



2. Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi

- a. Pengawasan dan pemeriksaan kedatangan kapal sebanyak 41.689 kapal, dan pengawasan keberangkatan kapal sebanyak 41.762 kapal. Semua kapal yang datang dan berangkat berasal dari pelabuhan/negara sehat, lokal transmisi dan dinyatakan bebas dari kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau faktor risikonya.
- b. Pengawasan lalu lintas jenazah dilaksanakan sebanyak 10 jenazah dengan menerbitkan sebanyak 9 surat izin lalu lintas jenazah dan 1 abu jenazah. Sedangkan kegiatan pengawasan dan penerbitan surat izin *health certificate* OMKABA sebanyak 524 dokumen dengan rincian 521 *health certificate* sedangkan 3 dokumen diterbitkan dari hasil pemeriksaan sampel makanan ke BBPOM Pekanbaru.
- c. Telah dilaksanakan penerbitan dokumen kesehatan kapal kesehatan kapal meliputi CoP sebanyak 6.390 dokumen, PHQC sebanyak 41.764 dokumen, SSCEC sebanyak 1.012 dokumen, SSCC sebanyak 3 dokumen, Buku Kesehatan Kapal (*Health Book*) sebanyak 707 buku
- d. Kegiatan Surveilans epidemiologi dilakukan terhadap ABK, penumpang kapal/pesawat yang datang dari luar maupun dalam negeri. Sedangkan untuk surveilans wilayah dilakukan pengumpulan data pada unit pelayanan kesehatan yang ada di sekitar wilayah perimeter dan buffer pada masing-masing wilayah kerja KKP Kelas II Dumai. Hasil pengamatan dari kegiatan tersebut tidak ditemukan adanya ABK, Penumpang yang terindikasi menderita penyakit yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Data yang didapat dari unit pelayanan kesehatan non KKP juga menunjukkan tidak adanya penyakit karantina dan potensial wabah.
- e. Penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV) dilakukan setelah dilakukan vaksinasi Meningitis yaitu untuk keperluan calon jemaah umrah yaitu sebanyak 137 dokumen sedangkan 41 dokumen diberikan kepada pelaku perjalanan internasional yang memerlukan vaksinasi Yellow Fever.
- f. Pengawasan lalu lintas OMKABA dilakukan terhadap komoditi dari jenis makanan dengan hasil pemeriksaan sampel di BBPOM Pekanbaru didapatkan kesimpulan tidak mengandung formalin sedangkan hasil pemeriksaan sampel yang berasal dari kapal kargo/tanker yang diperiksa oleh LABKESDA Pekanbaru didapatkan kesimpulan tidak tercemar E-Colli begitu juga dengan sampel yang diperiksa ke BBPOM Pekanbaru tidak mengandung Formalin.
- g. Jejaring kerja dan kemitraan dilakukan dengan instansi terkait telah berjalan dengan cukup baik yaitu dengan pihak KSOP, dinas kesehatan, Imigrasi, bea dan cukai, kepolisian, agen pelayaran, dan sektor terkait lainnya.



3. Substansi Pengendalian Resiko Lingkungan

- a. Jumlah TPM yang diawasi oleh KKP Kelas II Dumai berjumlah 424 TPM termasuk juga di wilayah kerja KKP Kelas II Dumai.
- b. Pengawasan sanitasi/IKL TPM paling banyak dilakukan di Pelabuhan Dumai yaitu sebesar 40% dari total TPM yang diperiksa dan diawasi.
- c. Sebanyak 91% TPM dengan kategori memenuhi syarat sanitasi dan 9% TPM dengan kategori tidak memenuhi syarat sanitasi.
- d. Jumlah TPM dengan faktor risiko pada tahun 2023 sebanyak 39 kali pengendalian TPM. Ada kenaikan yang cukup signifikan dalam pengendalian faktor risiko pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 dengan kenaikan sebanyak 4 kegiatan pengendalian.
- e. Pada kegiatan pengamatan hygiene sanitasi gedung dan bangunan wilayah kerja KKP Kelas II Dumai tahun 2023 telah dilakukan oleh seluruh wilayah kerja yang ada di lingkungan KKP Kelas II Dumai. Secara total pada tahun 2023 pengawasan gedung dan bangunan telah dilakukan terhadap 649 (enam ratus empat puluh sembilan) bangunan, yang terdapat di wilayah-wilayah kerja KKP Kelas II Dumai.
- f. Sebanyak 649 TTU telah diperiksa pada tahun 2023. Sebanyak 94% TTU dengan kategori memenuhi syarat kesehatan dan 6% TTU dengan kategori tidak memenuhi syarat Kesehatan
- g. Jumlah TTU dengan faktor risiko pada tahun 2023 sebanyak 36 TTU. Jumlah tersebut turun dibandingkan dengan jumlah TTU yang dengan faktor risiko yang dikendalikan pada tahun 2022.
- h. pengawasan sarana air bersih berdasarkan wilayah kerja di KKP Kelas II Dumai, Dimana wilayah kerja terbanyak melaksanakan pengawasan SAB tersebut adalah wilayah kerja induk Pelitung sebanyak 42% dan diikuti oleh wilayah kerja Dumai sebanyak 27%. Pengawasan Sab paling sedikit dilakukan oleh wilker Pinang kampai, hal ini disebabkan karena sarana air bersih disana yang memang sedikit dan kegiatan penerbangan di bandara yang juga sedikit. Adanya wilayah kerja yang masih sedikit melaksanakan pengawasan penyediaan air bersih ini, selain karena tidak adanya anggaran pengawasan yang tersedia untuk wilayah-wilayah kerja tersebut, juga ada wilayah-wilayah kerja yang pelabuhannya tidak ada tersedia pensuplay air bersih.
- i. Semua wilayah kerja melaksanakan pengawasan penyediaan air bersih. Pengawasan penyediaan air bersih terbanyak dilakukan oleh wilayah kerja pelabuhan induk Pelitung sebesar 42% dari total pengawasan yang dilakukan oleh KKP Dumai Kelas II Dumai.



- j. pemeriksaan sanitasi kapal paling banyak dilakukan pada bulan Maret yaitu sebanyak 105 kali pemeriksaan. Pada Tahun 2023 ada temuan 3 kapal dengan sanitasi Tidak Memenuhi Syarat dan dilakukan tindakan penyehatan.
 - k. KKP Kelas II Dumai pada tahun 2023 telah dilakukan tindakan penyehatan terhadap kapal sebanyak 3 (tiga) kali. Tindakan penyehatan kapal yang dilaksanakan di KKP Kelas II Dumai dilakukan atas dasar permintaan owner kapal, kegiatan rutin dan karena adanya temuan di kapal
 - l. Indeks pinjal pada delapan pelabuhan sebesar 0% atau dibawah <1 . Survei Vektor Pes dilakukan sebanyak 72 layanan yang tersebar pada delapan pelabuhan dengan jumlah 28.800 perangkat yang telah dipasang. Sepanjang tahun 2023, sebanyak 119 ekor tikus tertangkap dan dilakukan identifikasi untuk pemeriksaan pinjal.
 - m. Jenis tikus *Rattus Norvegicus* menjadi jenis tikus dengan jumlah terbanyak yang tertangkap dalam survey vektor Pes. Jumlah *Rattus musculus* yang tertangkap sebanyak 87 ekor, disusul dengan *Rattus Musculus* dengan 22 ekor, *Rattus Exulans* 10 ekor.
 - n. nilai index populasi kecoa < 2 pada delapan pelabuhan yang menunjukkan bahwa index populasi dibawah nilai baku mutu. Survei dilakukan pada delapan pelabuhan yang dilakukan pada sore dan malam hari. Jumlah lokasi survei diuraikan pada grafik dibawah ini.
 - o. sebanyak 680 Tempat-tempat umum telah diperiksa pada tahun 2023. Sebanyak 644 TTU dengan kategori memenuhi syarat kesehatan dan 36 TTU dengan kategori tidak memenuhi syarat kesehatan.
 - p. sebanyak 470 TPM total yang telah diperiksa pada tahun 2023. Sebanyak 432 TPM dengan kategori memenuhi syarat kesehatan dan 38 TTU dengan kategori tidak memenuhi syarat kesehatan
4. Upaya Kesehatan Lintas Wilayah
- a. Jumlah kunjungan pasien di poliklinik pada tahun 2023 4.638 pasien.
 - b. Pelayanan kesehatan pada situasi khusus yaitu pelayanan kesehatan tahun baru 2023, pelayanan kesehatan lebaran tahun 2023/1444H, pelayanan kesehatan event keagamaan bakar tongkang, pelayanan kesehatan event keagamaan mandi safar, bakti sosial dalam rangka Hari Kesehatan Nasional tahun 2023 dan pelayanan kesehatan pada natal 2023.
 - c. Jumlah masyarakat pelabuhan yang melakukan deteksi dini HIV pada KKP Kelas II Dumai tahun 2023 sebanyak 837 orang.
 - d. Jumlah deteksi dini terduga TBC pada KKP Kelas II Dumai tahun 2023 sebanyak 839 orang.



- e. Telah dilakukan pengawasan vaksinasi meningitis dan pengesahan ICV Pada Jamaah Haji
- f. Pelayanan vaksinasi pada poliklinik pada tahun 2023 yaitu vaksinasi Meningitis sebanyak 135 orang, vaksinasi yellow fever sebanyak 41 orang, dan vaksinasi Covid 19 sebanyak 46 orang.
- g. Penerbitan surat izin angkut orang sakit di poliklinik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai selama Tahun 2023 sebanyak 35 orang.
- h. Pengawasan obat dan alat kesehatan standar di alat angkut dan penerbitan sertifikat P3K pada tahun 2023 sebanyak 748 sertifikat yang tersebar di Induk dan Wilayah Kerja.
- i. Pelayanan kegawatdaruratan medik pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai selama Tahun 2023 sebanyak 61 orang
- j. Jumlah tenaga kerja Indonesia bermasalah selama tahun 2023 yang masuk ke Indonesia melalui Terminal Penumpang PT. Pelindo I Cabang Dumai berjumlah 2545 orang.

Tentunya masih banyak kekurangan dalam penyusunan Profil ini, maka diharapkan berbagai masukan yang akan sangat berharga untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut Demikian Profil Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai ini dibuat dengan harapan menjadi tambahan informasi yang berguna bagi pengembangan pelaksanaan kegiatan program dan tatalaksana administrasi yang baik guna pencapaian tujuan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai.